

**PERANAN BIRO KHUSUS PARTAI KOMUNIS INDONESIA
DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:
HENDRIKUS CHRISTIANUS
NIM: 011314015

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI

**PERANAN BIRO KHUSUS PARTAI KOMUNIS INDONESIA
DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965**

Oleh:

HENDRIKUS CHRISTIANUS

NIM: 011314013

Telah disetujui oleh :

Pembimbing

Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.

Tanggal 5 November 2007

SKRIPSI

**PERANAN BIRO KHUSUS PARTAI KOMUNIS INDONESIA
DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965**

Telah dipersiapkan dan ditulis oleh :
HENDRIKUS CHRISTIANUS
NIM : 011314015

Telah dipertahankan di depan panitia penguji
Pada tanggal 17 November 2007
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.	
Anggota	: Drs. A.K. Wilaryanto, M.M.	
Anggota	: Drs. Y.K. Subakti, M.Pd.	

Yogyakarta, 17 November 2007
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,



Drs. Iarsisius Sarkim, M.Ed, Ph.D.

PERSEMBAHAN



Karya Ini kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus

Kedua Orang Tuaku Bapak Markus Takun dan Ibu Yuliana Sarania

di Rumah.

MOTTO

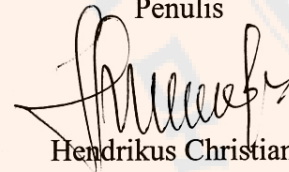
- ❖ *Bajalatn Sampae Ka Ujokng Balayar Sampe Ka Pulao (mengerjakan sesuatu hal hendaknya sampai tuntas dan berhasil.***(Peribahasa Dayak Simpakng)**
- ❖ *Tantangan tidak lebih dari sebuah batu besar yang harus kamu singkirkan Bila menghalangi Jalanmu, Mundur Bukan Akhir Dari Masalah.* **(Hendrikus Takun)**
- ❖ *Historia Magistra Vitae est (Sejarah itu guru kehidupan)* **(Cicero)**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 17 November 2007

Penulis



Hendrikus Christianus

ABSTRAK

**Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia
Dalam Gerakan 30 September 1965**

**Oleh :
Hendrikus Christianus
011314015**

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk: pertama, mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang berdirinya “Biro Khusus” Partai Komunis Indonesia, kedua, mengetahui peranan “Biro Khusus” Partai Komunis Indonesia dalam Gerakan 30 September 1965; dan ketiga, mendeskripsikan dan menganalisa hubungan antara Soeharto, Untung, Latief, Soepardjo dan Sjam Kamaruzzaman dalam Gerakan 30 September 1965.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi pustaka dan ditulis secara deskriptif analisis komparatif historis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan politik.

Hasil dari penelitian ini adalah Biro Khusus Partai Komunis Indonesia didirikan oleh D.N. Aidit ketika itu menjabat sebagai ketua Central Komite Partai, sebagai organisasi bawah tanah partai yang ditugaskan untuk melakukan penyusupan ke dalam tubuh TNI dengan menggunakan strategi Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Dalam operasinya, Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dipimpin oleh Sjam Kamaruzzaman yang beranggotakan Pono dan Waluyo.

Biro Khusus Partai Komunis Indonesia memiliki peranan penting dalam Gerakan 30 September 1965, dalam hal ini Biro Khusus Partai Komunis Indonesia sebagai perencana gerakan. Dalam merencanakan dan melaksanakan gerakan, Biro Khusus bekerjasama dengan apa yang dinamakan sebagai kelompok perwira progresif, seperti Untung, Latief, Supardjo. Mereka membentuk Dewan Revolusi yang diketuai oleh Untung.

Hubungan Soeharto dengan tokoh-tokoh kunci Gerakan 30 September 1965 seperti Untung, Latief, Supardjo dan Sjam terjalin jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Pada malam pelaksanaan Gerakan 30 September 1965, Soeharto sudah diberitahu oleh Kol. Latief, namun Soeharto tidak melakukan tindakan pencegahan dan memberitahu jenderal-jenderal yang akan diculik.

ABSTRACT

**The Role of Special Bureau of Indonesian Communist Party
in 30 September 1965 Movement.**

**By
Hendrikus Christianus
011314015**

The goals of the study are: (1) to describe and analyze the background of the establishment of “Special Bureau” of Indonesian Communist Party. (2) to recognize the role of Special Bureau of Indonesian Communist Party in 30 September 1965 Movement. (3) is to describe and analyze the relationship between Soeharto, Untung, Latief, Supardjo and Sjam Kamaruzzaman in 30 September 1965 Movement.

The method used in this study is qualitative method with library research and written in historical comparative analyzed descriptive method. The approaches used in this study are sociological and political approaches.

The findings of the study show that the Special Bureau of Indonesian Communist Party is established by D.N. Aidit who grasp as the leader of Central Committee party, as the underground organization which its function was to penetrate inside the Indonesian Armed Force body using the method of The Combination of Three Forms of Struggle. In his operation, the Special Bureau of Indonesian Communist Party led by Sjam Kamaruzzaman with Pono and Waluyo as his members.

The Special Bureau of Indonesian Communist Party has important role in 30 September 1965 Movement, in this matter the Special Bureau of Indonesian Communist Party is the movement planner. In planning and doing the movement, the Special Bureau cooperated with a group of progressive officers such as, Untung, Latief, Supardjo. They built the Revolution Council led by Untung.

Friendship between Soeharto and the key persons of 30 September 1965 movement such as, Untung, Latief, Supardjo and Sjam has good far before the movement happened. He already knew the plan of the forced picking up of the generals from Colonel Latief, but he did not take any action to prevent it or didn't contact the generals who became the victims of the movement.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : *Hendrikus Christianus*

Nomor Mahasiswa : *011314015*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia

Dalam Gerakan 30 September 1965

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : *17 November 2007*

Yang menyatakan

Hendrikus Christianus
(*Hendrikus Christianus*)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :”PERANAN BIRO KHUSUS PARTAI KOMUNIS INDONESIA DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965” dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata dharma Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Sutardjo Adikusilo J.R., S.Th. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran penyelesaian skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Segenap Dosen dan Karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang saya hormati, khususnya Dosen Pendidikan Sejarah yang telah memberi bekal pengetahuan dan membimbing penulis selama kuliah di kampus humanis.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Markus Takun dan Ibu Yuliana Sarania yang telah memberi segala dukungan dan doa, Tuhan akan membalas semuanya.
7. Buat kekasihku, terima kasih semuanya, Tuhan yang akan membalas semua kebaikanmu.
8. Dinasti Djagod dan Dinasti Deri terima kasih atas dukungannya.
9. Keluarga Besar Corps Resimen Mahasiswa Indonesia, khususnya Satmenwa Universitas Sanata Dharma yang sangat membantu mendewasakan *leadership* penulis.
10. Mas Ony Hartanto, SE, Mas Edy Purwanto, S.Pd, yang menjadi teman diskusi Penulis selama menggarap skripsi ini, dan Fransiska Sangi atas pinjaman komputernya.
11. Bapak Martinus Dalijan sekeluarga dan Bapak Ratno Gunarto sekeluarga yang telah bersedia memberi tempat berteduh dari teriknya panas dan dinginnya hujan di Kota Gudeg ini.
12. Teman-teman Pendidikan Sejarah, Putra Nabire Bung Longgimus Pekey, Bayu Lampung Sudibyo, Franshitler Njo, Andina Kalasan Putri N, dan yang saya lupa namanya tetapi ingat wajahnya (Ika Ngaglik Yuniana),

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

memberi semangat dan dukungan sehingga skripsi ini sampai ke tangan pembaca.

13. Komunitas Imam Biara Kelancema, Endi Hans Pramana, S.Sos, Pr., Nistain Odops, A.Md, Pr., Hentakun, S.Pd, SJ, serta mereka yang menunggu penulis kembali ke Pontianak, Armasari, Yovi Banyong, Hilda Monica, John Arnolus, S.Kom., Yesi, Hukim dan komunitas “Poyu Padara” Kangking.
14. Komunitas Muara Kasai Yogyakarta, Yuvensius Ruenk Sijianto, S.Pd., Dede Atui Lenyumz Sulaeman, S.E., Serpantiun Cecen, SP.
15. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih buat dukungan dan semangatnya pada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan karya ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya sampai jumpa dilain kesempatan.

Yogyakarta, 17 November 2007

Penulis,

Hendrikus Christianus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Batasan Istilah dan Landasan Teori	22
F. Hipotesis	52
G. Metodologi dan Pendekatan Penelitian	53
H. Sistematika Penulisan	64
BAB II. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA BIRO KHUSUS	
PARTAI KOMUNIS INDONESIA	66
A. Perkembangan Partai Komunis Indonesia Setelah Tahun 1950	
Dalam Konstelasi Politik Dalam Negeri	66

B. Partai Komunis Indonesia Dalam Pemilu 1955	72
C. Partai Komunis Indonesia masa Demokrasi Terpimpin 1959	79
D. Terbentuknya Biro Khusus Partai Komunis Indonesia.....	90

BAB III. PERANAN “BIRO KHUSUS” PARTAI KOMUNIS INDONESIA

DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965	97
A. Biro Khusus Partai Komunis Indonesia	97
B. Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia Dalam Gerakan 30 September 1965	110
C. Biro Khusus Sebagai Perencana Gerakan 30 September 1965	116
D. Langkah-langkah yang dilakukan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia menjelang Gerakan 30 September 1965.	119
E. Partai Komunis Indonesia ingin menjatuhkan Presiden dan merebut kekuasaanya.....	132

BAB IV. HUBUNGAN SOEHARTO, UNTUNG, LATIEF, SUPARDJO DAN SJAM KAMARUZZAMAN

DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965	137
A. Hubungan Soeharto dan Untung sebelum Gerakan 30 September 1965.....	137
B. Hubungan Soeharto dan Latief sebelum Gerakan 30 September 1965.....	141
C. Hubungan Soeharto dan Supardjo sebelum Gerakan 30 September 1965.....	144
D. Hubungan Soeharto dengan Sjam Sebelum Gerakan 30 September 1965.....	145
E. Soeharto dan Gerakan 30 September 1965.....	148

BAB V. PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	163
 DAFTAR PUSTAKA.....	 166
LAMPIRAN.....	171

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959	172
Lampiran 2. Dekrit No. 1 Tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia ...	174
Lampiran 3. Keputusan No. 1 Tentang Susunan Dewan Revolusi Indonesia ...	176
Lampiran 4. Keputusan No. 2 Tentang Penurunan dan Penaikan Pangkat.....	178
Lampiran 5. Struktur Organisasi Gerakan 30 September 1965	179
Lampiran 6. Gambar-gambar.....	180
Lampiran 7. Silabus KTSP.....	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu organisasi politik di Indonesia yang berhaluan komunis. Sel partai ini dibawa oleh Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet, seorang anggota *Sociaal Democratische Arbeiderpartij* (SDAP) dan *Sociaal Democratische Partij* (SDP) sebuah organisasi partai politik yang radikal, dan sebagai embrio Partai Komunis Belanda ke Indonesia, tahun 1913¹.

Di Indonesia, Sneevliet berhasil menanamkan pengaruhnya ke dalam organisasi *Vereniging van Spoor en Tramsweg Personeel* (VSTP), sebuah organisasi buruh kereta api di Semarang. Keberhasilan Sneevliet tersebut perlahan-lahan membuat arah aktivitas VSTP menjadi radikal, salah satu jalannya melalui surat kabar VSTP yaitu *De Volharding* (keyakinan) yang banyak memuat tulisan tentang Marxisme². Selanjutnya Sneevliet mengadakan kontak dengan orang-orang Belanda yang berhaluan sosialis yang ada di Hindia Belanda, pada tahun 1914 antara lain J.A. Brandsteder, H.W.Dekker, dan P. Bergsma. Mereka mendirikan organisasi Marxis yang pertama di Asia Tenggara, dengan sebutan *Indesche Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV). Setahun kemudian mereka menerbitkan majalah *Het Vrije Woord* (Suara Kebebasan) di Surabaya, sebagai

¹ Peter Edman, *Komunisme Ala Aidit Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965*, CIA, 2005, hlm.12.

² Setneg, *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia:Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, 1994:hlm.7.

salah satu media untuk pengembangan ajaran Marxisme. Selain itu, mereka menerbitkan pula surat kabar *Soeara Mardika* yang kemudian lebih dikenal dengan *Soeara Rakyat*,³ di kota tersebut.

Perserikatan Komunis Hindia terbentuk pada 23 Mei 1920, dan sekaligus terdaftar sebagai anggota Komunis Internasional (Komintern). Pada sekitar Desember 1920, Perserikatan Hindia Belanda mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).⁴ Namun Aidit mengatakan bahwa, tanggal 23 Mei 1920 adalah hari terbentuknya PKI dan sekaligus hari kelahirannya PKI.⁵ Sejak saat itu PKI semakin giat melakukan konsolidasi, dengan cara mengatur anggotanya secara konsentris dan mengembangkannya dengan sistem sel. PKI juga melakukan kursus-kursus politik yang memberi uraian tentang Marxisme-Leninisme, dalam rangka meningkatkan pemahaman ideologi dari para anggotanya.⁶ Dalam mengembangkan selnya, PKI menjalankan strategi bawah tanah sampai tahun 1945, setelah mengalami kegagalan dalam perlawanannya terhadap Kolonialisme Belanda tahun 1926.

Partai ini lambat laun mulai menjadi kuat kembali, seiring kedatangan orang-orang PKI dari luar negeri. Muso mulai menjadi penentu arah perkembangan PKI sejak 1947-1948. Muso dalam memimpin PKI, mulai dengan konsepnya yang dikenal dengan “*Jalan Baru Bagi Republik Indonesia*”. Tokoh ini kemudian

³ Setneg., *ibid.*, hlm.8. Lihat juga Aidit, *Pilihan Tulisan Djilid I*, Jajasan Pembaruan, Jakarta, 1959. hlm.406.

⁴ Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, Yogyakarta, Kanisius, 1988, hlm.41-42. Peter Edman, *op.cit.*, hlm.9.

⁵ Aidit, *op.cit.*, hlm. 404.

⁶ Harry Poeza, *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik Indonesia*, Jakarta: Graffiti, 1988, hlm.349.

menggabungkan sejumlah kekuatan sayap kiri antara lain: Partai Buruh, Partai Sosialis, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, Barisan Tani Indonesia dan Pemuda Sosialis Indonesia dengan PKI.⁷

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, partai ini melibatkan diri secara aktif di dalam kancah revolusi kemerdekaan. Nama Partai Komunis Indonesia tercoreng, karena telah melakukan pemberontakan di Madiun (*Madiun Affair*) pada tahun 1948.⁸ Sejak saat itu, PKI tidak dipercaya lagi ikut berkiprah dalam panggung politik Indonesia.

Namun, sejak tahun 1951 muncullah Dipa Nusantara Aidit, Nyoto, Sudisman, dan M.H. Lukman sebagai golongan muda dan Alimin sebagai satu-satunya tokoh tua dalam partai tersebut.⁹ Mereka yang kemudian menduduki kepemimpinan partai sampai dengan timbulnya kejadian-kejadian yang menjerumuskan mereka dan akhirnya menamatkan riwayat partai ini. Puncaknya setelah terjadi Gerakan 30 September 1965.

Sejak tahun 1950, Partai Komunis Indonesia bisa menunjukan eksistensinya dalam panggung politik Indonesia. Partai ini menjalankan suatu kebijakan yang bertujuan membawa massa rakyat ke dalam situasi revolusioner. Sebuah kebijakan yang sangat jelas yang menjadi tujuan sebuah partai komunis, namun hal ini dilakukan dengan membuat berbagai modifikasi. Meskipun hal tersebut tidak dapat berlangsung sampai dengan periode terakhir sejarah Partai Komunis

⁷ Goenawan Moehammad, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*, Jakarta, LSIK, 1988, hlm.20.

⁸ Peter Edman, *op.cit.*, hlm.9.

⁹ Moedjanto, *Indonesia Abad Ke-20 II Dari perang Kemerdekaan Pertama sampai PELITA III*, Kanisius, Yogyakarta, 1988, hlm.133.

Indonesia (1950-1965), akan tetapi kesuksesan berhasil diraih selama periode ini, terutama ketika berada di bawah kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit.¹⁰

Pengaruh Aidit sebagai seorang teoritis utama dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah Partai setelah tahun 1950/1951, berperan sangat besar terhadap penentuan haluan kebijakan yang diambil oleh partai, dan dari sini secara tidak langsung berpengaruh pada keberhasilan partai dalam melipatgandakan jumlah anggotanya dan meningkatkan pengaruhnya. Dalam pidato penutupan Kongres Nasional ke-V Partai Komunis Indonesia, Aidit menandakan bahwa jaman lama yang gelap untuk partai sudah ditutup, kemudian akan dimulai periode baru, yaitu periode yang dimulai dalam tahun 1951, berkembang dengan suburnya. Untuk itu semenjak tahun 1951 Partai Komunis Indonesia telah bisa mengembangkan sayapnya dan mendapatkan anggota yang banyak. Hasil kerja keras mereka yang dipimpin oleh Aidit untuk membangun partai dan jaringan ke daerah-daerah membuahkan hasil pada Pemilu pertama 1955, Partai Komunis Indonesia berhasil masuk empat besar pemenang Pemilu.¹¹

Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959, menjadi suatu 'medan perang' baru telah diciptakan dalam panggung perpolitikan dalam negeri. Timbulnya, pertentangan TNI dengan Presiden Soekarno, terutama mengenai bagaimana Partai Komunis Indonesia diperlakukan dalam konstelasi politik dalam negeri.¹²

¹⁰ Peter Edman, *op.cit.*, hlm 11.

¹¹ Admadji Sumarkidjo, *Mendung di Atas Istana Merdeka Menyingkap Peran Biro Khusus PKI Dalam Pemberontakan G-30-S*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm.71.

¹² *Ibid.*, hlm.105.

Bagaimanapun, TNI tetap merasa curiga dengan PKI serta cita-cita tersembunyi mereka. Kecurigaan TNI tidak bisa dihapuskan begitu saja, meski ada faktor Presiden Soekarno yang harus diperhitungkan, karena waktu itu PKI dekat dengan Soekarno. Sementara itu PKI sudah pasang kuda-kuda untuk menghadang TNI agar pembantaian TNI terhadap mereka (PKI) tidak terulang lagi, karena PKI menganggap sewaktu-waktu TNI akan melakukan hal yang sama terhadap mereka.¹³ Hampir setiap gerak langkah PKI dihadang oleh TNI, contohnya kegiatan PKI di tiga daerah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan dilarang oleh Pangdam setempat, yang merangkap sebagai Penguasa Perang di daerah masing-masing.¹⁴

Hal ini membuat D.N. Aidit menjadi lebih giat untuk mencari strategi, bagaimana caranya supaya bisa bebas dari kemelut terutama dengan TNI, karena TNI khususnya TNI-AD sudah memiliki sikap anti dengan komunis. Dalam keraguannya, Aidit mengambil langkah agar bagaimana organisasinya harus bersikap. Sebuah jalan baru dibuka oleh Aidit untuk menjawab keraguannya itu, Aidit lebih banyak berkonsultasi dengan tokoh Cina. Ketika berpidato di Kanton tanggal 25 September 1963, D.N. Aidit mengatakan bahwa PKI, “harus yakin mengenai kekuatannya sendiri, serta selalu akan ada di pihak Marxisme-Leninisme melawan revisionisme.”¹⁵

Selain orasi, Aidit juga menyusun strategi sebagaimana layaknya seorang pengikut Lenin. Aidit memahami apa yang harus dilakukan untuk kemajuan partai. Mengingat musuh PKI sudah semakin banyak, maka perlu langkah

¹³ *Ibid.*, hlm.106.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hlm.110.

kongkrit untuk melakukan upaya infiltrasi terhadap pihak lawan dengan tujuan, setelah mengetahui kekuatan lawan, maka dengan mudah dapat dilumpuhkan. Sejalan dengan pemikiran Lenin yang menyerukan kepada kaum *revolusioner profesional* untuk mengadakan penyusupan atau infiltrasi dan membentuk sel-sel di dalam lembaga-lembaga sosial, politik, pendidikan, dan ekonomi di tengah masyarakat seperti sekolah, gereja, serikat buruh, dan partai politik.

Lenin juga menyerukan untuk mengadakan infiltrasi ke dalam tubuh angkatan bersenjata, kepolisian dan pemerintah, Lenin juga dengan jelas menerangkan bahwa kaum komunis hendaknya melakukan kegiatan di bawah tanah, sekalipun di tempat partai-partai komunis yang sah diperbolehkan.¹⁶

Kampanye *land reform* merupakan salah satu langkah terbuka yang dilakukan oleh PKI. Namun dalam banyak hal merupakan sebuah batas akhir sejarah partai tersebut, karena seiring dengan itu, dimulai pula sebuah periode yang banyak diwarnai tindakan-tindakan yang bersifat adventurisme, sehingga membawa PKI kedalam situasi konflik terbuka dengan partai-partai lain.¹⁷

Meskipun tidak seluruhnya berhasil, usaha tersebut, telah menunjukkan bahwa PKI, siap dan mampu untuk menggerakkan seluruh organnya, pada waktu yang bersamaan memperlihatkan kekuatan basis pendukungnya-para petani, mereka yang karena berbagai karakternya telah ditempatkan oleh Aidit sebagai kaum proletar, yang merupakan pelopor revolusioner.¹⁸ Pada tahun-tahun inilah, Aidit

¹⁶ William Ebenstein, dkk, *Isme-Isme Dewasa ini*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm.24. Lihat juga, *Isme-Isme yang Mengguncang Dunia, Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme*, Narasi, Yogyakarta, 2006, hlm.42.

¹⁷ Peter Edman, *op.cit.*, hlm.174.

¹⁸ *Ibid.*

menyusun berbagai strategi yang bisa menentukan kemana arah tujuan partai akan dibawa.

Sebagai pemimpin partai politik, Dipa Nusantara Aidit, memiliki strategi untuk mengembangkan ideologi partai yang dipimpinnya. ideologi partai yaitu Marxisme-Leninisme sudah dirumuskan secara konkret dan partai ini terorganisir secara ketat. Salah satu contoh pernyataan Aidit mengenai ideologi, seperti yang tertulis dibawah ini.

“...Juga makin disadari bahwa tidak ada tugas partai yang dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak ada persiapan ideologi, oleh karena itu bagi kita kaum komunis ideologi adalah jenderal. Tanpa ideologi yang tepat tidak ada yang bisa berjalan beres sebagaimana halnya tanpa jenderal yang baik tidak ada tentara yang bisa menang...”¹⁹

Komunisme, memang memiliki pola umum taktik strategi dalam mengembangkan ajaran serta organisasi berlandaskan ideologinya, seperti: pembentukan organisasi perjuangan yang militan, salah satu cara yang dipakai adalah pembentukan dan penggunaan gerakan di bawah tanah.²⁰

Meskipun varian komunisme yang diterapkan di Indonesia, memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep aslinya yang berasal dari daratan Eropa. Namun prinsip dasar Marxisme tetap dipertahankan.²¹ Seperti halnya yang dilakukan oleh Aidit dalam mengembangkan Partai Komunis Indonesia.

¹⁹ *Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia Djakarta 7-14 September 1959*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1960, hlm.106.

²⁰ Oejeng Soewarna &Nugroho Notosusanto, *Rentjana Peladjaran Terurai tentang Komunisme*, (tanpa penerbit) Bandung, 1967, hlm.33.

²¹ Peter Edman, *op.cit.*, hlm.13.

Dalam pelaksanaan strategi tersebut, Aidit membentuk Biro Khusus, tahun 1964. Ini dilakukan, dalam rangka melaksanakan tugasnya mewujudkan metode ke tiga dari MKTBP. Aidit menunjuk kader-kader PKI yang terpilih untuk melaksanakan pembinaan terhadap anggota-anggota TNI (waktu itu ABRI). Menurut pemantauan PKI, para anggota ABRI terutama yang berpangkat masih rendah (tamtama sampai perwira menengah) mau dibina oleh PKI.

Kesejahteraan ekonomi mereka yang kurang diperhatikan negara-lah, yang menjadi titik lemah anggota ABRI sehingga berkiblat kepada PKI. Dalam strategi ini PKI mengemukakan wacana diskusi yang mempertajam perbedaan antara bawahan dan atasan. Antara bawahan dan atasan ada kalanya terdapat perbedaan dalam kondisi sosial ekonominya. Perbedaan-perbedaan yang ada ini selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan jalan mempertajam dan meluaskan rasa perbedaan tersebut.²²

Biro Khusus juga bertugas mengumpulkan info untuk diolah dan diserahkan kepada Aidit, dan melaksanakan tugas-tugas yang tidak mungkin dilakukan oleh alat-alat formal PKI.²³ Setelah berhasil membentuk Dewan Harian Politbiro yang hanya terdiri dari empat orang, yaitu: Aidit sendiri, Lukman, Sudisman, dan Nyoto organisasi bisa lebih efektif bekerja dan kemungkinan bocornya segala rahasia partai semakin kecil. Biro Khusus adalah alat dari Ketua CC-PKI, yang sekaligus Ketua Dewan Harian Politbiro, sehingga akses hanya ada pada Aidit semata.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 41.

²³ *Ibid.*, hlm.171.

²⁴ Admadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hlm.110.

Setelah Aidit memperkenalkan teorinya tentang kemungkinan *coup d'état* bermutasi menjadi revolusi, Aidit dengan Biro Khususnya menjalin kerjasama dengan apa yang disebut “Kelompok Perwira Muda yang Maju”. Biro Ketentaraan yang lebih dikenal sebagai Biro Khusus ini, mempunyai jaringan luas dalam Angkatan Bersenjata, dibawah koordinasi Syam Kamaruzaman alias Syamsul Qamar bin Mubaidah.²⁵ Setelah dibentuk, Biro Khusus ditugaskan Aidit selaku ketua CC PKI untuk membina para anggota TNI-AD dari daerah CDB (Central Daerah Besar).

Sebut saja, Letkol Untung, Kolonel Latief dan Brigjen Soepardjo merupakan orang-orang yang berhasil dibina menjadi kader oleh Biro Khusus Partai Komunis Indonesia.²⁶ Hal ini mengacu pada strategi subversi Partai Komunis Indonesia, yang dikenal dengan nama MKTBP atau Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan, yang dimulai tahun 1954.²⁷ Melalui sidang Politbiro CC PKI pada tahun 1954, PKI telah merumuskan metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan. Metode revolusi ini mencakup unsur-unsur berikut:

- a. Perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh tani dan tani miskin.
- b. Perjuangan revolusioner kaum buruh di kota-kota, terutama kaum buruh angkutan.
- c. Bekerja secara intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan Angkatan Bersenjata.

²⁵ Harsutejo, *G30S Sejarah Yang Digelapkan Tangan Berdarah CIA dan Rejim Suharto*, Hasta Mitra, Jakarta, 2003, hlm.169.

²⁶ Eros Djarot,dkk., *op.cit.*

²⁷ Setneg, *op.cit.*, hlm.37.

Khusus mengenai pelaksanaan metode ketiga MKTBP, yakni bekerja secara intensif di kalangan musuh-terutama di kalangan Angkatan Bersenjata, karena organisasi ini menunjukkan anti dengan organisasi komunis khususnya Partai Komunis Indonesia. Sehingga cukup beralasan jika Partai Komunis Indonesia melakukan penyusupan terhadap tubuh TNI pada waktu itu melalui Biro Khususnya dengan tujuan akhir untuk melumpuhkan kekuatan TNI. Mengingat tingkat kerahasiaan Biro Khusus, maka pelaksanaannya hanya dilakukan oleh kader-kader Partai Komunis Indonesia yang benar-benar terpilih dan sangat terbatas, dan itupun ditunjuk langsung oleh D.N. Aidit sebagai ketua partai.

Setelah dibentuk, Biro Khusus bertugas untuk mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis ke dalam tubuh ABRI (TNI) guna menyusun potensi kekuatan bersenjata. Kemudian mengusahakan agar setiap anggota ABRI yang telah bersedia menjadi anggota PKI dan disumpah, dapat membina para anggota ABRI lainnya. Dalam rangka mengembangkan pengaruh dan ideologi komunis di lingkungan ABRI dapat ditempuh dengan cara penyelenggaraan diskusi yang teratur, sampai mereka menjadi pengikut dan dapat dipercaya. Selain itu juga, Biro Khusus mencatat para anggota ABRI yang telah dibina atau menjadi pengikut PKI, agar sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan PKI sendiri.

Menyibak mengenai Peranan Biro Khusus PKI dalam Gerakan 30 September 1965, semata-mata hanya untuk menyatukan persepsi awal sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut. Penulisan mengenai Peranan Biro Khusus PKI dalam Gerakan 30 September 1965 bukanlah dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan

mengenai peranan organisasi rahasia bentukan Aidit tersebut, karena selama ini penulisan yang mengupas masalah tersebut masih samar-samar. Penulisan ini semata-mata hanyalah sebuah kajian ilmiah, yang berusaha menyajikan fakta-fakta sejarah secara objektif.

Dalam skripsi ini, juga akan dibahas mengenai hubungan antara Soeharto dan para pelaku Gerakan 30 September 1965. Hubungan antara Soeharto dengan pelaku gerakan sebut saja Untung, Latief dan Supardjo serta Sjam Kamaruzzaman merupakan hubungan individual dan kebetulan berjalan baik. Namun, hubungan baik belum cukup untuk mengaitkan Soeharto dengan gerakan tersebut.

Demikian juga halnya dengan banyaknya dugaan yang menyebutkan bahwa Soeharto diuntungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut. Walaupun, setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965, Soeharto dikenal sebagai pahlawan yang mengendalikan dan membebaskan Indonesia dari pengaruh komunisme.

B. Rumusan Masalah

Setelah ditentukan batasan-batasan, baik mengenai batasan ruang dan waktu, perlu adanya perumusan sejumlah permasalahan yang terintegrasi dan kronologis. Sehingga selain maksud tulisan menjadi jelas, juga akan didapat kerangka pikir yang logis dan bulat. Berdasarkan pada pokok permasalahan yaitu Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia Dalam Gerakan 30 September 1965, maka ada sejumlah permasalahan yang akan dijadikan kajian lebih lanjut. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya “Biro Khusus” Partai Komunis Indonesia?
2. Apa peranan “Biro Khusus” Partai Komunis Indonesia dalam Gerakan 30 September 1965, sehingga Partai Komunis Indonesia Terlibat dalam Gerakan 30 September 1965?
3. Bagaimana hubungan Suharto dengan Untung, Latief, Supardjo dan Sjam Kamaruzzaman yang sudah mendapat pengaruh dari Partai Komunis Indonesia, dalam Gerakan 30 September 1965?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Menganalisis secara mendalam, tentang Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dalam Gerakan 30 September 1965.

b. Tujuan Khusus:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa latar belakang terbentuknya Biro Khusus Partai Komunis Indonesia.
2. Untuk mengetahui Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa hubungan antara Soeharto dengan Untung, Latief, Soepardjo dan Sjam Kamaruzzaman, Dalam Gerakan 30 September 1965.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulisan sejarah Indonesia, yaitu untuk memperkaya khasanah penulisan sejarah lokal di Indonesia.
- b. Bagi Universitas Sanata Dharma, untuk melaksanakan salah satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian untuk Ilmu Pengetahuan Sosial.
- c. Bagi dunia keguruan dan ilmu pendidikan, penelitian ini akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah Indonesia khususnya sejarah Partai Komunis Indonesia.
- d. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan, pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer, merupakan kesaksian dari seseorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera lain atau dengan alat mekanis disebut juga saksi pandang mata.²⁸ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sumber primer merupakan sumber yang didapat secara langsung oleh orang pertama atau seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa yang terjadi.

1. Sumber Primer:

Pilihan Tulisan Djilid I dan II, karangan D.N. Aidit terbitan Jajasan Pembaruan, Jakarta, tahun 1959. Buku ini berisikan mengenai artikel-artikel D.N. Aidit dalam menyambut Kongres Nasional Ke-VI PKI pada pertengahan tahun 1959. Isi seluruh pilihan tulisan D.N. Aidit dimulai sejak tahun 1951 dan dalam buku tersebut juga dipaparkan mengenai sejarah lahir dan berkembangnya Partai Komunis Indonesia.

Serba-Serbi Dokumen Partai (Komunis) yang dikeluarkan oleh Depagitprop C.C. Partai Komunis Indonesia, Djakarta, tahun 1962. yang berisikan mengenai organ-organ Partai Komunis Indonesia yang disusun secara bertingkat yaitu, Komite Central (CC) di tingkat pusat, Komite Daerah Besar (CDB) ada di daerah tingkat I, Komite Seksi (CS) di daerah tingkat II, Komite Sub Seksi (CSS) di daerah kecamatan, Komite Resort (CR) di desa-desa, serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Komunis Indonesia.

²⁸ Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, Jakarta, 1985, hlm. 35.

Saksi dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965. Center For Information Analysis, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta, tahun 2005. Buku ini berisikan mengenai dokumentasi dan rekaman berbagai kesaksian yang pernah dipublikasikan berbagai media massa mengenai tragedi 30 September 1965. Selain kesaksian dari para pelaku juga ada kesaksian dari keluarga korban.

Gerakan 30 September Antara Fakta dan Rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah, Center For Information Analysis, Center for Information Analysis & Media Pressindo Yogyakarta tahun 1999. Berisikan mengenai kisah dan kesaksian para pelaku gerakan: Menyambungkan “The Missing Link” mengenai Letkol Untung, eksepsi Kolonel Latief, kisah dan apologi Serma Boengkoes, Sjam Kamarussaman yang misterius, eks Brigjen Supardjo. Selain itu juga dikemukakan kesaksian para keluarga korban penculikan dan pembunuhan pada peristiwa tersebut.

Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia tahun 1959 jilid I & II yang diterbitkan oleh Jajasan Pembaruan, Jakarta tahun 1960. Buku ini memuat segala hal yang berkaitan dengan Kongres Nasional Partai Komunis Indonesia, yaitu kumpulan pidato pertanggung jawaban ketua Centra Comite Partai Komunis Indonesia dalam hal ini Dipa Nusantara Aidit, dan pidato-pidato para pengurus Partai dari berbagai Central Daerah Besar dan dokumen ini juga memuat tentang perubahan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Komunis Indonesia, serta pidato-pidato yang berupa penegasan mengenai ideologi yang sudah baku bagi partai mereka yaitu ideologi komunis.

2. Sumber sekunder:

Selain sumber primer, ada juga sumber sekunder yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. menurut Louis Gottschalk, sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya.²⁹ Sehingga, sumber sekunder dapat disebut juga sebagai sumber yang diperoleh dari orang kedua, yaitu orang yang memperoleh berita dari sumber primer. Jadi bukan dari tangan pertama atau disebut sumber primer lain yang tidak sejaman dengan peristiwa atau sumber yang diperoleh dari seseorang yang tidak langsung menyaksikan peristiwa yang terjadi.

Adapun sumber sekunder yang digunakan untuk mendukung penulisan skripsi ini antara lain:

Mendung Di atas Istana Merdeka Menyingkap Peran Biro Khusus PKI Dalam Pemberontakan G-30-S, karangan Atmadji Sumarkidjo Terbitan Times Communication & Pustaka Sinar Harapan Jakarta, tahun 2000. Buku ini mengungkapkan semua fakta yang sudah diverifikasi mengenai semua peristiwa yang berkaitan dengan yang terjadi di tahun 1965, Buku ini juga mengungkapkan keterlibatan Biro Khusus PKI yang belum pernah diketahui sebelumnya berdasarkan sumber fakta dari Team Pemeriksa Pusat (Teperpu) yang sejak awal melihat semua hal yang berkaitan dengan pemberontakan tersebut dari sisi yuridis formal.

Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi (Terjemahan oleh Rahman Zainuddin, Bernard Hidayat, Masri Maris. Diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia 2005) karangan Victor Miroslav Fic. Buku ini merupakan

²⁹ *Ibid.*

publikasi serius terbaru (terbit pertama kali di New Delhi, India, tahun 2004). Buku ini menerangkan bahwa tragedi kudeta 1 Oktober 1965 merupakan konspirasi antara Sukarno-Aidit-Mao-Tse-tung (Cina) untuk membersihkan pucuk pimpinan Angkatan Darat, namun pada akhirnya menjatuhkan Sukarno sendiri dan hancurnya Partai Komunis Indonesia.

Buku *Komunisme Ala AIDIT Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965*, (terjemahan) karangan Peter Edman, Center For Information Analysis tahun 2005, berisikan mengenai sejarah partai tersebut sampai tahun 1950, selain itu juga dipaparkan mengenai biografi D.N. Aidit, membahas mengenai kiprah Aidit sebagai ketua Partai Komunis Indonesia sampai dengan kajian mengenai berbagai kejadian seputar gerakan 30 September 1965 yang akhirnya menyeret PKI ke arah kehancuran.

Sukarno, Tentara, PKI, Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965. Karangan H. Rosihan Anwar, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia Jakarta 2006. Berisikan catatan Rosihan Anwar “in the mood of diaries at the crucial moment” yang menggambarkan prolog segitiga kekuasaan seru antara Sukarno-Tentara dan PKI.

Menyingkap Dua Hari Tergelap di Tahun 1965 Melihat Peristiwa G30S dari Perspektif Lain, karangan James Luhulima, diterbitkan oleh buku Kompas Jakarta, September 2006. Berisikan mengenai aktivitas tokoh-tokoh penting seperti mencuatnya nama Suharto setelah G30S, membahas juga peran PKI dan menceritakan juga bagaimana D.N. Aidit menemukan ajalnya. Selain itu juga

menjelaskan bagaimana peran Laksdya Omar Dhani dalam membawa AURI pada kurun waktu terjadinya G30S.

Isme-isme Dewasa Ini edisi kesembilan, karangan William Ebenstein dan Edwin Fogelman alih bahasa oleh Alex Jemadu, terbitan Erlangga Jakarta tahun 1987. Berisikan mengenai Komunisme, teori Marxis, sumbangan Lenin bagi teori komunisme, komunisme dari Marx hingga Lenin, kemudian dibahas juga mengenai komunisme Uni Soviet, Warisan Leonid Breznev, selain itu dibahas juga mengenai komunisme Cina dari Mao sampai empat program modernisasi.

Isme-Isme, Yang Mengguncang dunia Komunisme Fasisme Kapitalisme Sosialisme, karangan William Ebenstein terbitan Narasi Yogyakarta, tahun 2006. Yang membicarakan tentang wakil-wakil utama dari masing-masing pihak-komunisme dan fasisme di pihak totaliter, kapitalisme dan sosialisme di pihak demokrasi.

Taktik-Taktik Front Persatuan Komunis di alam Demokrasi Terpimpin, terbitan Kursus Kader Katolik Gunung Sahari 88 Djakarta V/3 (tanpa tahun terbit). menjelaskan mengenai sifat taktik, bentuk-bentuk front persatuan, front rakyat, front kesatuan dari Tiongkok, dan front pembebasan. Selain itu juga membahas mengenai PKI dan masa peralihan ke Demokrasi Terpimpin, dan di sana dipaparkan mengenai front persatuan nasional, penolakan terhadap pemerintahan parlementer, komunisme di bawah demokrasi terpimpin, serta yang terakhir kemungkinan perlawanan komunis.

Komunisme di Asia, terbitan Kursus Kader Katolik Gunung Sahari 88 Djakarta V/3 (tanpa tahun terbit). Yang berisikan mengenai siapa itu seorang

komunis, konperensi Cominform di Calcuta 1947, gerak langkah penolakan pengaruh komunis di Asia Selatan khususnya di Indoa, Sri Langka, Birma, Pakistan. Juga dibahas mengenai Quo Vadis Asia Tenggara terhadap komunis, dan wilayah Asia lainnya seperti Tiongkok, Vietnam.

Siapa Sebenarnya Soeharto Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI II. Tulisan Eros Djarot, dkk terbitan Mediakita Jakarta, tahun 2006. Buku ini menguak fakta baru di seputar peristiwa G-30-S/PKI. Buku ini mengemukakan mengenai bagaimana para pelaku sejarah mengungkapkan peran dan pembangkangan Soeharto, para pelaku sejarah mengungkapkannya melalui wawancara yang dilakukan oleh team Detak Files. Dalam hal ini lebih disinggung bagaimana juga hubungan Soeharto dengan para pelaku Gerakan 30 September yang menewaskan para petinggi AD tersebut.

Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30 S, karangan Baskara Tulus Wardaya, terbitan Galang Press Yogyakarta tahun, 2006. Buku ini mencoba melihat tragedi '65 dalam perspektif yang lebih luas, khususnya berkaitan dengan hidup dan perjuangan Bung Karno, kemudian mencoba melihat peran berbagai pihak lain dalam tragedi itu. Selain itu juga dibahas mengenai peristiwa 1 Oktober 1965.

Kehormatan Bagi Yang Berhak, karangan Manai Sophiaan, terbitan Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Jakarta, tahun 1994. Berisikan mengenai bagaimana Gerakan 30 September 1965 itu terjadi, dan membahas pula mengenai putusan dewan harian politbiro PKI, serta Biro Khusus dan ditulis juga mengenai campur tangan CIA dan KGB dalam peristiwa 30 September 1965, secara garis

besar buku ini mau mengatakan bahwa Bung Karno tidak terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.

Indonesia Abad Ke-20 Jilid I dan II, karangan G. Moedjanto, terbitan Kanisius Yogyakarta, tahun 1988. Membahas mengenai Pemberontakan Partai Komunis di madiun dan Gerakan 30 September 1965 secara tegas mengatakan bahwa PKI terlibat dalam gerakan tersebut disamping adanya persoalan intern TNI-AD.

G 30 S Sejarah yang Digelapkan Tangan Berdarah CIA dan Rejim Suharto, karangan Harsutejo, terbitan Hasta Mitra Jakarta, tahun 2003. Berisikan mengenai latar belakang sejarah Proklamasi Kemerdekaan dan Perang Kemerdekaan, terorisme, pemberontakan dan CIA, Dekrit Presiden, serta berbagai macam isu dan tinjauan kejadian serta menelisik beberapa tokoh yang terlibat dalam G 30 S, dan dibahas juga mengenai Agen Syam Ketua Biro Khusus PKI.

Lenin Pikiran, Tindakan dan Ucapan, karangan Edy Haryadi, terbitan Komunitas Studi Untuk Perubahan Jakarta, tahun 2000. Yang berisikan mengenai sejarah kehidupan Lenin, negara dan revolusi, dan secara umum membedah mengenai fenomena keberadaan negara, secara historis, filosofi dan praktis menurut pandangan Vladimir Ilyich Ulyanov atau Lenin, dan pemahaman mengenai teori-teori Marxis.

Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern, karangan Sutarjo Adisusilo, J.R., terbitan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, tahun 2005. Berisikan mengenai Sejarah pemikiran Yunani klasik, pemikiran renaissance dan modernisasi, sejarah pemikiran tentang liberalisme, pemikiran modern tentang demokrasi, sejarah pemikiran tentang kapitalisme, pemikiran

Marxisme dan dampaknya, sejarah pemikiran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejarah HAM dan implementasinya.

Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme, karangan Franz Magnis Suseno. Buku ini menjelaskan pokok-pokok pemikiran Karl Marx secara objektif dan kritis. Setelah mengemukakan bentuk sosialisme utopis yang mendahului Marx: dari paham Marx, ia kemudian menelusuri perkembangan pemikiran Marx muda tentang peran filsafat kritis dan keterasingan manusia sampai terbentuknya teori tentang hukum-hukum yang mendasari perubahan masyarakat dan kritik terhadap kapitalisme. Selanjutnya digariskan juga bagaimana ajaran Marx menjadi “Marxisme” , ideologi perjuangan kaum buruh, serta memperkenalkan aliran-aliran terpenting dalam Marxisme.

Selain itu juga digunakan buku-buku yang berkaitan erat dengan pembahasan bidang garapan skripsi ini, seperti Buku *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX; Revolusi, Nasionalisme, Demokrasi, Komunisme*, karangan Sutardjo Adisusilo. Buku karangan Imam Soedjono, “*Yang Berlawanan*” *Membongkar Tabir pemalsuan Sejarah Partai Komunis Indonesia. Memahami Ilmu Politik* karangan Ramlan Surbakti, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* karangan Miriam Budiardjo, *Sejarah dan teori Sosial* karangan Peter Burke, *Intelijen Teori, Aplikasi dan Modernisasi* yang disusun oleh Y. Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Sosiologi Politik* oleh Maurice Duverger, *Psikologi Sosial* oleh W.A. Gerungan, *Intelligence Fungsi dan Peranannya* oleh P. Napitupulu, *Pengantar Ilmu Sejarah* karangan Kuntowijoyo. *Lenin Pikiran, Tindakan dan Ucapan*, karangan Edy

Haryadi, Serta buku-buku dan sumber-sumber dari internet yang relevan dan berkaitan dengan topik penulisan skripsi ini.

Serta buku-buku pembanding seperti : *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Buku karangan Moerdiono, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI*. Buku karangan Nugroho Notosusanto & Ismail Saleh, *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*. Rentjana Peladjaran Terurai Tentang Komunisme, karangan Oejeng Soewarna dan Nugroho Notosusanto. *Katastrofi Mendunia, Marxisma Leninisma Stalinisma Maoisma Narkoba* karangan Taufik Ismail.

E. Batasan Istilah dan Landasan Teori

1. Pengertian dan Batasan Istilah

Dalam penulisan skripsi ini, akan dikemukakan pembatasan pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan skripsi ini, sehingga diharapkan tidak terjadi ambiguitas dalam pemakaian istilah-istilah tersebut. Penulis juga akan menguraikan beberapa hal seputar judul dan istilah yang sering muncul dalam penelitian ini. Penjelasan beberapa pengertian istilah tersebut penting, karena merupakan landasan berfikir dan sebagai pembatasan masalah. Hal ini dibuat, agar diharapkan apa yang menjadi tujuan penulisan dapat tercapai, yaitu ingin mengetahui Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia Dalam Gerakan 30 September 1965. Diharapkan juga, nantinya ada kesamaan persepsi mengenai konsep-konsep yang dikemukakan.

Skripsi yang berjudul “Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia Dalam Gerakan 30 September 1965” perlu dikemukakan batasan-batasan pengertian yang berkaitan dengan judul tulisan.

Pengertian “peranan” berasal dari kata dasar ‘peran’ yang artinya pemain sandiwar. Peran yang diberi akhiran -an menjadi “peranan” diartikan sebagai sesuatu yang dapat menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.³⁰

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peran (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hal dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan, karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau sebaliknya. Lebih lanjut dikatakan bahwa, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi organisasi, serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh organisasi kepadanya. Peran sangat penting karena dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.³¹

Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana peranan yang lebih menunjuk pada fungsi Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, ketika peranannya menjadi organ bawah tanah Partai Komunis Indonesia, menyingkap kekuatan lawan politik PKI dalam hal ini TNI khususnya TNI-AD, dengan menyusup ke dalamnya, sehingga dapat merencanakan Gerakan 30 September 1965, untuk melapangkan jalan PKI ke arah kekuasaan tunggal partai dalam pemerintahan Indonesia.

³⁰ Poerwadarminta, *op.cit.*, hlm.506.

³¹ Soerjono Soekanto,(1990), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 268.

Pengertian “biro” artinya adalah kantor³², sedangkan dalam kamus besar ilmu pengetahuan, “biro” merupakan organisasi yang dibentuk secara rasional dan hirarkis untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang dan badan-badan guna melaksanakan tugas-tugas administratif yang telah ditetapkan sebelumnya.³³ Sedangkan “Khusus” artinya adalah tidak umum, khas, istimewa.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dapat diartikan sebagai, suatu organisasi khas atau istimewa Partai Komunis Indonesia yang dibentuk oleh pimpinan partai secara rasional dan hirarkis untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang dan badan-badan organisasi dalam Partai Komunis Indonesia guna melaksanakan tugas administratif partai yang sudah ditetapkan oleh ketua Central Komite PKI dalam hal ini Dipa Nusantara Aidit, peranan yang dijalankan oleh Biro Khusus dilakukan layaknya sebuah organisasi intelijen, yang melakukan penyusupan ke dalam tubuh organisasi lain yang dianggap lawan politiknya seperti, TNI, PNI dan organisasi lainnya di Indonesia sehingga, setelah mengetahui kekuatan lembaga yang disusupi maka dengan mudah ditaklukan. Sulit untuk menentukan siapa-siapa anggota Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kerahasiaan organisasi tersebut.

Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, bekerja layaknya sebuah organisasi intelijen untuk kepentingan Partai Komunis Indonesia sendiri. Sejak abad ke-19 kegiatan-kegiatan intelijen (intelligence) telah mempunyai organisasi yang teratur.

³² *Ibid.*, hlm.144.

³³ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LKPN, Jakarta, 2006, hlm.115.

³⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi II)*, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995, hlm. 498.

Istilah intelligence atau dalam bahasa Indonesia intelijen berasal dari kata inteligensia, yang artinya adalah kecerdasan. Ini memberikan makna bahwa pekerjaan intelijen memerlukan kecerdasan. Dalam arti luas, intelijen atau intelligence merupakan suatu proses yang dalam pengelolaanya memerlukan pemikiran, untuk menghasilkan informasi penting, sesuatu yang telah dan akan terjadi.³⁵ Untuk melaksanakan ini diperlukan suatu alat yang disebut kecerdasan. Namun makna kecerdasan dalam intelijen tidak hanya berarti sekedar pintar menguasai ilmu intelijen, namun juga bermakna memiliki banyak akal, mampu memahami masalah, mampu membaca situasi dan mampu menyesuaikannya dengan cepat. Dengan menggunakan kecerdasan, intelijen mendapatkan fakta sebagai bahan baku, kemudian membuat analisa, lalu membuat kesimpulan tentang sesuatu yang terjadi.

Sejarah kegiatan intelligence bermula ketika Napoleon III mendirikan intelligence politik sebagai badan yang permanen dalam pemerintahannya; sewaktu perang saudara di Amerika, intelligence militer telah mendapat bentuk terorganisir dengan nama *Military Intelligence Service*, kemudian badan ini dilengkapi lagi dinas intelligence angkatan laut (*Naval Intelligence Service*).³⁶

Namun, seiring dengan perkembangan jaman, dunia intelligence mengalami kemajuan. Negara seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki dinas intelligence terkenal. Di Amerika Serikat, terdapat CIA (*Central Intelligence Agency*) dan FBI (*Federal Bureau of Investigation*), di Inggris terdapat JIB (*Joint Intelligence Division*), yang mengkoordinir PID (*Political Intelligence Division*)

³⁵ Wahyu Saronto, *Intelijen Teori, Aplikasi dan Modernisasi*, Ekalaya Saputra, Jakarta, 2001, hlm. 7.

³⁶ P. Napitupulu, *Intelligence Fungsi dan Peranannya*, Bhatara, Jakarta 1966, hlm.11.

dan MI (Military Intelligence) yang mempunyai antara lain MI-5 khusus untuk kegiatan intelligence negatif, MI-8 untuk penterjemahan kode-kode rahasia dan MI-11 khusus untuk agitasi dan propaganda dan *Scotland Yard*. Di Jerman jaman Hitler dikenal juga Abwehr dan Gestapo (Geheime Staatspolizei). Jaman Mussolini di Italia dikenal dengan OVRA (Opera Volontaria per la Repressione Antifascista), di Uni Soviet terdapat Cheka yang mengalami perubahan nama menjadi OGPU kemudian NKVD, kemudian menjadi KGB dan berubah menjadi KGB serta akhirnya menjadi MVD (Kementerian Urusan Dalam Negeri) yang merupakan gabungan dari MGB dan MVD yang dipimpin oleh Beria selain itu juga ada badan intelijen Uni Soviet yang bernama GRU (Intelligence Tentara Merah), di Indonesia jaman pemerintahan Soekarno kita kenal juga BKI (Badan Koordinasi Intelligence) yang sekarang menjadi BIN (Badan Intelijen Negara) dan DPKN (Dinas Pengawas Keselamatan Negara) dari Departemen Angkatan Kepolisian, Begitu juga dengan Partai Komunis Indonesia, dalam upaya untuk menguasai atau mendominasi semua lawan politiknya, maka dibentuklah Biro Khusus, sebagai sebuah organisasi intelijen partai yang berlambang palu arit tersebut.

Dalam mempertahankan dominasi politiknya, Aidit berpedoman pada apa yang dilakukan oleh Lenin. Lenin sendiri mengatakan:

“...Kegiatan komunis, harus dilakukan dengan dua jalan. Pertama, kaum pekerja harus membentuk organisasi-organisasi buruh dengan tujuan-tujuan ekonomi sebagai pokok. Organisasi yang bekerja secara terbuka, sah, dan sedapat mungkin secara umum. Berdampingan dengan organisasi-organisasi semacam itu, harus ada perkumpulan-perkumpulan kecil kaum revolusioner

profesional yang diatur menurut organisasi tentara dan polisi, yang paling terpilih dan seluruhnya dirahasiakan...”³⁷

Hal ini dilakukan Lenin untuk melindungi Revolusi dari anasir-anasir kontra-revolusi dan untuk melakukan pengawasan terhadap lawan-lawan politik yang anti Soviet, maka tahun 1921 Lenin dengan pemimpin-pemimpin tua dari Bolsjewik³⁸ mendirikan suatu polisi rahasia yang dinamakan Cheka. Cheka mempunyai tugas menjadi polisi di dalam negeri dan melakukan kegiatan spionase di luar negeri. Di sini dapat dilihat keunikan dinas rahasia Uni Soviet dimana Intelligence positif dan negatif digabungkan dalam satu badan, dan selama Uni Soviet masih berdiri sifat tersebut tetap dipertahankan.³⁹ Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Aidit dalam menundukan lawan-lawan politiknya agar Partai Komunis Indonesia tetap eksis dalam konstelasi politik dalam negeri.

Biro Khusus merupakan sebuah biro ketentaraan Partai Komunis Indonesia yang memiliki jaringan luas dalam Angkatan Bersenjata dibawah koordinasi Sjam, Pono dan Bono. Pembentukannya tidak pernah diumumkan, sehingga sangat sulit untuk mengetahui eksistensinya secara rinci, sehingga banyak mantan tahanan Pulau Buruyang diwawancarai, mengatakan bahwa biro ini ilegal. Pembentukannya tidak pernah diputuskan dalam rapat-rapat CC PKI, sebagai badan formal dalam partai yang berlambang palu arit tersebut yang berperan

³⁷ William Ebenstein, dkk, *op.cit.*, hlm.41-42.

³⁸ Di dalam Marxisme Rusia, terjadi perpecahan yaitu adanya sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan berfikir terus dalam garis Marxis satu dengan nama Mensjewiki. Mereka menumpahkan perhatiannya kearah mengorganisir kaum buruh dan sarekat-sarekat sekerja. Terdapat juga pikiran kritis terhadap Marxisme yang seolah-olah menggambarkan revisionis di Eropa Timur. Pada sayap kiri seluruh titik berat terletak dalam aksi revolusioner. Marxisme merupakan kepercayaan mutlak atas panggilan revolusi dan penghidupan komunis di kemudian hari. Sayap kiri ini bernama Bolsjewik yang memiliki pemimpin besar bernama Lenin.

³⁹ Napitupulu, *op.cit.*, hlm.83.

menjalankan kebijaksanaan tertinggi antara dua kongres. Dalam menjalankan aksinya, biro khusus bekerjasama dengan apa yang dinamakan “Kelompok Perwira Muda yang Maju” untuk melaksanakan putusan Dewan Harian Politbiro, mendahului mengadakan gerakan memukul Angkatan Darat sebelum Partai Komunis Indonesia yang menaunginya hancur karena telah terbukti menjadi pelaku Gerakan 30 September 1965.⁴⁰

Partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisir secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum, guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun itu merupakan hasil perpaduan dari berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan cara memberi dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah.⁴¹

Komunisme dalam hal ini mengandung dua pengertian. Pertama, ada hubungannya dengan komune (*commune*), satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasi dari komune-komune itu. Menurut Delier Noer, komunisme juga menunjukan milik atau kepunyaan bersama.⁴² Komunisme juga dimengerti sebagai sistem sosial politik, ideologi dan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai marxisme.⁴³

⁴⁰Manai Sophiaan, (1994), *Kehormatan Bagi Yang Berhak*, Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Jakarta.hlm.76.

⁴¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm.116.

⁴² Delier Noer, *Pemikiran Politik Negeri Barat*, Mizan, Bandung, hlm. 3.

⁴³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1982, hlm.87.

Menurut J. Hulsebos, komunisme merupakan suatu gerakan marxis, malahan satu-satunya marxis yang bersifat murni. Menurut materialisme sejarah, bentuk-bentuk masyarakat disebabkan alat-alat produksi yang terdapat pada suatu masa. Contohnya sebelum terdapat mesin, maka masyarakat industri yang kita kenal sekarang tidak mungkin ada, tetapi sesudah ada mesin-mesin, timbulnya masyarakat industri tidak terhalang lagi.⁴⁴

Menurut Franz Magnis Suseno, komunisme juga dapat dikatakan sebagai gerakan dan kekuatan politik partai-partai komunis sejak revolusi Oktober 1917 di bawah pimpinan Lenin, kemudian menjadi kekuatan politis dan ideologi internasional. Istilah komunisme ini juga dapat dipakai untuk ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme yang merupakan ajaran atau ideologi komunisme. Marxisme merupakan salah satu komponen dalam sistem ideologi komunis.⁴⁵

Manifesto Komunis, merupakan program federasi kaum komunis, yakni kelompok imigran Jerman yang bermukim di London. Manifesto Komunis merupakan pernyataan yang disusun oleh Karl Marx dan F. Engels ditahun 1847 ini, atas perintah “Serikat Komunis”. Diterbitkan tidak lama sebelum revolusi bulan Februari 1848. manifesto Komunis didasarkan pada ajaran perjuangan-kelas; Sosialisme bukanlah angan-angan, muluk-muluk yang harus diwujudkan oleh filantrop-filantrop yang tinggi budipekertinya; Sosialisme adalah hasil perkembangan masyarakat dan harus diperjuangkan oleh golongan yang berkepentingan, yakni kaum proletar. Untuk perjuangan tersebut, haruslah kaum

⁴⁴J. Hulsebos, *Komunisme Pengaduan, Djandji atau Antjaman?*, P.T. Pembangunan Djakarta, 1955, hlm.26.

⁴⁵ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 5.

buruh diseluruh dunia bersatu secara internasional. Sebagai semboyan untuk persatuan ini dipakai kalimat penutup manifesto komunis itu: “Kaum proletar diseluruh dunia bersatulah!”. Manifesto komunis berpengaruh karena sosialisme demokrasi maupun komunisme berakar pada manifesto tersebut.⁴⁶

Timbulnya faham komunis dilatar belakangi oleh situasi sosial awal abad ke-19 di Eropa Barat, ketika kaum buruh hidup dalam keadaan sangat menyedihkan. Sistem kapitalisme yang mendominasi perkembangan sektor industri dan lebih mengutamakan keuntungan ekonomis, telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kehidupan kaum buruh. Dengan demikian yang nampak dalam kapitalisme adalah sistem pemerasan seperti halnya feodalime. Buruh dalam hal ini dibayar dengan harga pasar penuh dari tenaganya, dan hanya dibayar sebesar itu, sehingga nampak sangat tidak mencerminkan nilai sesungguhnya sebagaimana dihasilkan oleh tenaga kerjanya.⁴⁷ Ketidakadilan tersebut menimbulkan ketegangan dua kelas dalam masyarakat industri. Ketegangan ini juga memunculkan perjuangan kelas dan pada akhirnya perjuangan kelas ini akan menghasilkan suatu masyarakat tanpa kelas, dimana sarana-sarana produksi menjadi milik bersama. Artinya perjuangan kelas mutlak perlu untuk mewujudkan masyarakat komunis sehingga dalam masyarakat yang telah mencapai komunisme penuh, prinsip ekonomi telah meningkat menjadi “setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya dan menerima sesuai dengan kebutuhannya”.⁴⁸

⁴⁶T.S.G. Mulia, *Ensiklopedia Indonesia*, W. Van Hoeve, Bandung, Tanpa tahun terbit, hlm.893.

⁴⁷ Sutardjo Adi Susilo, *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik sampai Modern*, Univ. Sanata Dharma, Yogyakarta, 2005, hlm. 163.

⁴⁸ Michael Hart. *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1985, hlm.162. Lihat juga, *Program Partai Komunis Unisoviet*, Bagian Penerangan Kedutaan Besar URSS Indonesia, 1961. hlm.64.

Karl Marx menjelaskan bahwa, langkah-langkah yang perlu diambil oleh kaum revolusioner untuk mewujudkan masyarakat komunis setelah kemenangan politis berhasil dicapai, pertama yang harus dicapai adalah membentuk pemerintahan diktator proletariat.⁴⁹ Setelah itu, mereka harus segera meluncurkan proses nasionalisasi dan sosialisasi alat-alat produksi serta penghapusan hak milik dan sistem kapitalisme, setelah proses tersebut dilakukan, maka terbentuklah fase masyarakat komunis secara penuh.

Sosialisme adalah keadaan masyarakat sesudah penghapusan hak milik pribadi atas alat-alat produksi.⁵⁰ Revolusi sosialis tidak langsung menghasilkan sosialisme. Langkah pertama adalah diktatur proletariat dan sosialisme negara, sesudah kapitalisme dihancurkan, negara semakin kehilangan fungsinya. Sosialisme tercapai apabila negara sudah tidak ada lagi.⁵¹ Komunisme dalam kaitannya dengan istilah Marxisme, dipahami tidak hanya sebagai sistem sosial, politik, dan ideologi saja, tetapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan pada nilai-nilai Marxisme yang ditafsirkan oleh Lenin.⁵² Marxisme adalah suatu ajaran pembebasan, paham tersebut mengajarkan bahwa manusia dapat menentukan perjalanan sejarah dan menghentikan segala penindasan dan segala pertentangan kelas.⁵³ Komunis Internasional (KOMINTERN) disebut juga Internasionale III, merupakan suatu badan kolektif internasional dari partai-partai

⁴⁹ Menurut Lenin, diktator proletariat merupakan bentuk pemerintahan yang berkuasa pada masa transisi, dari sebuah masyarakat kapitalis menuju terbentuknya masyarakat komunis. Diktator proletariat memiliki tugas pokok, melakukan transformasi secara revolusioner dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis.

⁵⁰ Franz Magnis Suseno, *op.cit.*, hlm. 172.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 172-173.

⁵² Miriam Budioarjo, *op.cit.*, hlm.77.

⁵³ Hulsebos. *op.cit.*, hlm.77.

komunis diseluruh dunia, yang didirikan atas prakarsa Lenin dalam bulan Maret 1919.⁵⁴

Partai Komunis Indonesia merupakan partai komunis tulen, dengan ideologi Marxisme-Leninisme tulen, sehingga tidak heran kekhasan partai ini berbeda dengan partai-partai yang berbasis pada nasionalis dan agama sebagai ideologinya. Partai Komunis Indonesia yang berideologikan Marxisme-Leninisme, menolak pluralisme demokratis. Hal ini sudah menjadi jiwa partai komunis di mana pun mencari monopoli kekuasaan dengan tujuan untuk mendirikan sistem Marxisme-Leninisme di bawah pimpinan partai yang eksklusif. Dalam kehidupan demokrasi, partai komunis merupakan salah satu pemain, namun begitu partai komunis berhasil memegang kekuasaan, dia tidak akan pernah melepaskannya secara sukarela. Partai komunis akan menyingkirkan kekuatan-kekuatan politik lain, menghapus pemilihan umum yang bebas dan memasang aparat kontrol totaliter terhadap masyarakat yang akan menindas segala perlawanan. Sama halnya dengan apa yang dilakukan Aidit dengan membentuk biro khusus partai untuk melakukan manuver-manuver dan propaganda terhadap lawan politiknya demi mencapai kekuasaan, yang berujung pada Gerakan 30 September 1965 dan akhirnya menjadi episode terakhir kehidupan Partai Komunis Indonesia.

Sebagai salah satu partai politik di Indonesia yang berazaskan marxisme-Leninisme (ajaran Marxisme yang ditafsirkan oleh Lenin dan dikenal dengan Komunisme), Partai Komunis Indonesia bertujuan membentuk masyarakat sosialis di Indonesia, yang disesuaikan dengan kondisi rakyat Indonesia, dengan

⁵⁴ Aidit, *op.cit.*, hlm.97.

adat-istiadat yang ada di Indonesia, psikologi serta kebudayaan Indonesia, sehingga menjadi soko guru utama dalam revolusi itu. Komunisme yang diterapkan oleh Aidit tidak terlalu bertumpu pada komunisme yang dikembangkan Karl Marx atau Mao, namun Aidit memadukan antara keduanya. Menjadi Marxisme yang khas Indonesia yang memiliki berbagai ciri khas khusus pribumi. Dengan demikian varian komunisme yang diterapkan di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep aslinya yang berasal dari daratan Eropa, meskipun tetap mempertahankan prinsip dasar Marxisme, sesuai dengan lambang partai tersebut yang melukiskan perpaduan palu dan arit, palu manifestasi kaum buruh yang berwadah pada SOBSI dan arit adalah manifestasi kaum tani yang diwadahi BTI. Kedua lambang tersebut tidak dapat dipisahkan.⁵⁵

Pemberontakan atau *rebellion* adalah perlawanan kepada pemerintahan yang sah dengan cara kekerasan dan perjuangan bersenjata atau suatu tindakan menentang atau resistensi secara terbuka terhadap pemerintahan yang ada.⁵⁶ Pemberontakan politik yang sering terjadi dan amat ditakuti adalah bentuk revolusi yang disertai dengan tindakan kekerasan yang kejam, penuh tipu daya dan tidak berperikemanusiaan. Pada dasarnya, semua bentuk revolusi mengandung bahaya yang mengancam eksistensi negara.⁵⁷

Revolusi berasal dari bahasa Latin *revolvere* yang berarti menjungkir-balikkan kembali. Revolusi dalam arti luas adalah menjungkir-balikkan tata nilai yang lama

⁵⁵ D.N. Aidit, *Lahirnya PKI dan Perkembangannya*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1960, hlm.404.

⁵⁶ Baskara T. Wardaya, *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal'65 hingga G30S*, Galang Press Yogyakarta, 2006, hlm.169.

⁵⁷ John RG Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 6.

diganti dengan yang baru atau suatu perombakan dari akar-akarnya.⁵⁸ Melancarkan revolusi dalam arti sempit adalah mengubah suatu tata kemasyarakatan atau kenegaraan dengan kekerasan. Revolusi juga diartikan sebagai perubahan yang dilakukan dengan jalan mengesampingkan azas-azas lama dan diganti dengan yang baru.⁵⁹ Selain itu revolusi juga diartikan sebagai perubahan di bidang sosial politik yang serba cepat, mendadak dan disertai dengan kekerasan dan perlawanan bersenjata. Secara lebih sempit, revolusi sering diartikan sebagai pemberontakan bersenjata.⁶⁰

Selanjutnya revolusi memiliki implikasi yang lebih jauh yakni suatu pergantian suatu golongan satu oleh golongan lain.⁶¹ Pengertian revolusi dalam arti sempit adalah perubahan dengan tiba-tiba atau perubahan yang hebat yang sifatnya baik dan tetap atau mengarah pada kemajuan atau perkembangan. Selanjutnya revolusi memiliki implikasi yang lebih jauh, yakni pergantian suatu golongan oleh golongan yang lain, apabila tidak dijalankan dengan pemberontakan yang dahsyat, maka dijalankan dengan perebutan kekuasaan.⁶²

Hampir semua definisi ilmu sosial kontemporer mengenai revolusi menekankan pada perubahan negara dan struktur kelas dengan kekerasan. Revolusi yang lazim adalah definisi menurut tokoh-tokoh sebagai berikut:⁶³ Menurut *Theda Skocpol* revolusi adalah perubahan cepat dan mendasar pada negara dan struktur kelas masyarakat berbarengan dengan dan sebagian

⁵⁸ Kursus Kader Katolik, *Kristalisasi Politik*, Sekretariat Nasional, Jakarta, 1966, hlm. 192.

⁵⁹ T.S.G. Mulia, *Ensiklopedia Indonesia*, W. Van Hoeve, Bandung, *op.cit*, hlm.320.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 193.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.190.

⁶² Crane Brinton, *Anatomi Revolusi (terjemahan)*, Bhratara, Jakarta, hlm.13-14.

⁶³ John Forlan (Ed), *The Future Revolution; masa depan revolusi di era globalisasi dan mendefinisi ulang makna revolusi*, Yogyakarta, Insist Press, 2004, hlm.34.

berlangsung memulai, pemberontakan kelas bawah. Menurut *Anthony Giddens* yang mendefinisikan revolusi sebagai perebutan kekuasaan negara melalui cara-cara kekerasan oleh para pemimpin gerakan massa, kemudian kekuasaan tersebut digunakan untuk memprakarsai proses reformasi sosial besar-besaran. *Charles Tilly* mengatakan revolusi sebagai peralihan kekuasaan negara dengan paksa di mana setidaknya dua blok pesaing yang berbeda membuat klaim yang tidak sama untuk menguasai negara, dan jumlah masyarakat yang signifikan dalam kekuasaan negara tersebut menerima klaim masing-masing blok.⁶⁴

Menurut *John Forlan* revolusi merupakan setiap peristiwa yang partisipasinya dikaitkan dengan partai sosialis revolusioner dan menuntut perubahan politik inkonstitusional maupun perubahan radikal struktur kelas pedesaan atau keduanya. Biasanya tuntutan-tuntutan tersebut berkenaan dengan tuntutan penggulingan paksa atas sistem politik yang ada.⁶⁵ *Eisenstadt* mengartikan revolusi sebagai suatu gerakan yang paling terpadu dari seluruh gerakan sosial maupun yang menghendaki pembaharuan dan perubahan secara menyeluruh, bila perlu dengan kekerasan dalam rangka menciptakan suatu tatanan sosial yang baru yang lebih baik.⁶⁶

Kudeta, berarti perebutan kekuasaan secara mendadak melalui kekerasan oleh mereka yang memegang sejumlah kekuatan militer atau pemerintahan. Berbeda

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 197.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.5.

⁶⁶ Sutardjo Adisusilo, *Nasionalisme, Revolusi dan Perubahan Sosial di Perancis Sekitar Tahun 1789*, SPPS Seri XV, No.5, Februari 1989, IKIP Sanata Dharma Yogyakarta, hlm.10.

dengan revolusi yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kelompok militer, kudeta dilaksanakan dari atas.⁶⁷

Gerakan dalam bahasa Inggris “*movement*” yang berarti tindakan, suatu kegiatan atau aktivitas yang diimplementasikan pada suatu aksi yang ingin membuat sesuatu berubah baik secara evolusi maupun revolusi. Gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh Dewan Revolusi yang menggunakan pasukan Cakrabirawa (Pasukan Pengawal Presiden Soekarno), Pemuda Rakyat dan beberapa satuan dari Diponegoro dan Brawijaya yang pro komunis, bertindak menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat di Lubang Buaya. Yang Berhasil diculik dan dibunuh disinyalir sebagai perwira yang anti Partai Komunis Indonesia ialah Jendral A. Yani, Suprpto, Haryono M.T., S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo. Sedangkan Jendral A.H. Nasution dapat menyelamatkan diri, namun puterinya Ade Irma Suryani dan Ajudannya Letnan Satu Pierre Andreas Tendean menjadi korban salah sasaran para penculik yang akan menculik Jenderal A.H. Nasution. Penculikan dan pembunuhan semacam terjadi juga di Yogyakarta atas diri Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono, masing-masing Komandan dan Kepala Staf Resimen 072 Pamungkas.⁶⁸ Dalam hal ini biro khusus Partai Komunis Indonesia bertindak sebagai perencana gerakan yang sebelumnya sudah disusun secara rapi melalui Sjam Kamaruzzaman, Pono dan Waluyo. Biro khusus ini menjalankan perintah dari ketua politbiro Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit.

⁶⁷ Hassan Sadhily, *Ensiklopedi Indonesia Jilid II*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1980, hlm.714

⁶⁸ Moedjanto II, *op.cit.*, hlm.140-141.

2. Gerakan 30 September 1965 Menurut Berbagai Pendapat

Berbagai pendapat yang muncul dalam menterjemahkan Gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan pertanyaan siapa dalang dalam gerakan tersebut. Antonie C.A. Dake dalam bukunya *"In the Spirit of the Red banteng"*, yang dikutip oleh Manai Sophiaan, mengungkapkan tragedi ini mengacu kepada keterlibatan Partai Komunis Indonesia sebagai perencana.⁶⁹ Center for Information Analysis juga memastikan bahwa banyak tokoh Partai Komunis Indonesia menjadi penggerak dan Pelaksana gerakan tersebut, fakta itu sudah terbukti.⁷⁰

Benedict R. Anderson dan Ruth McVey, menyimpulkan bahwa G 30 S 1965 merupakan puncak dari konflik intern di tubuh Angkatan Darat (*A Preliminary Analysis of The October 1, 1965 in Indonesia, Cornell Paper*) Menurut Anderson dan Mc. Vey bahwa Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan puncak konflik yang ada di dalam tubuh Angkatan Darat karena di dalam tubuh Angkatan Darat sendiri ada kekuatan yang bertentangan yaitu sayap kanan yang memihak A.Yani dan Nasution dan sayap kiri yang memihak Presiden Sukarno.⁷¹

Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson, menyatakan bahwa dalang utama G 30 S 1965 adalah CIA yang ingin menjatuhkan Sukarno dan kekuatan komunis. CIA bekerja sama dengan sebuah *klik* di Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Teori ini cukup kuat bila dikaitkan dengan konteks Perang Dingin, hal ini berkaitan juga dengan pembahasan yang ada dalam buku-buku George Mc. T.

⁶⁹ Manai Sophiaan, *op.cit.*, hlm.25.

⁷⁰ Center for Information Analysis, *Gerakan 30 September antara Fakta dan rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999, hlm.7.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.16.

Kahin tentang keterlibatan CIA dalam kasus PRRI dan Permesta sebelumnya, maka bukan mustahil CIA juga memegang peranan dalam G 30 S 1965. Jadi dalam hal ini CIA mempunyai andil yang cukup besar dalam G 30 S 1965 mengingat peranan CIA yang cukup besar dalam pemberontakan-pemberontakan daerah sebelum maupun pasca Gerakan 30 September 1965 yaitu dalam pembantaian massal terhadap orang-orang PKI tahun 1965-1966.⁷²

Pendapat kalangan militer orde baru yang mengatakan bahwa seluruh peristiwa tersebut didalangi, kalau bukan dikerjakan sendiri oleh PKI dengan memperlalat unsur ABRI atau TNI. Persiapan gerakan telah dilakukan sejak lama dengan tujuan untuk merebut kekuasaan dan menciptakan masyarakat komunis di Indonesia. Bukti-bukti yang dikemukakan adalah fakta bahwa para jenderal dibawa ke Halim Perdanakusuma, tempat latihan Gerwani. Bukti lain yaitu kehadiran D.N Aidit di Halim, tempat jasad para jendral dibuang. Hal itu semakin memperkuat tuduhan terhadap PKI sebagai pelaku G 30 S 1965. Menurut teori ini bahwa PKI-lah dalang dalam G 30 S 1965 dengan asumsi bahwa PKI ingin merebut kekuasaan negara dan menggulingkan ideologi Pancasila.⁷³

Berdasarkan pendapat Wertheim bahwa bukan PKI dan bukan para perwira muda AD, melainkan Soeharto-lah yang menjadi otak G 30 S 1965 tersebut. Teori Wertheim ini lebih menekankan pada keterlibatan Soeharto dalam G 30 S 1965, bahkan menduga bahwa Soeharto adalah dalang yang berdiri di belakang kejadian

⁷² *Ibid.*, hlm.117.

⁷³ Dhaniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.201.

berdarah tersebut dengan mengacu kepada kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh inti pelaku Gerakan 30 September 1965.⁷⁴

Pendapat yang dikemukakan oleh Wieringa yang mengajukan tesis dua kudeta yaitu, kudeta pertama dilakukan oleh perwira menengah Angkatan Darat dan kudeta kedua yang dikerjakan oleh Soeharto sendiri ketika dia menumpas para pelaku kudeta yang membunuh enam jenderal dan seorang perwira. Kudeta Soeharto tersebut mencapai puncaknya pada kudeta kedua ketika Sukarno menyerahkan kekuasaan dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966.⁷⁵

3. Landasan Teori

Teori, merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli yang telah diakui keabsahannya, sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa. Landasan adalah dasar, patokan atau sesuatu yang dijadikan. Jadi, landasan teori adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan telah diakui kebenarannya tentang suatu peristiwa. Pendapat para ahli yang telah diakui keabsahannya tersebut, dijadikan patokan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep adalah suatu rancangan yang telah difikirkan, dan rancangan tersebut belum bisa diakui keabsahannya.⁷⁶

Teori juga memberikan ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi dan juga mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejala-gejala yang telah dan atau sedang terjadi.⁷⁷ Dalam konteks ini, teori tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.207.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.208.

⁷⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.67.

⁷⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 10.

fakta-fakta tentang penelitian mengenai peranan biro khusus Partai Komunis Indonesia.

Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini, maka akan digunakan berbagai teori seperti di bawah ini:

a. Teori Kudeta

Kudeta adalah perebutan kekuasaan secara mendadak melalui kekerasan oleh mereka yang memegang sejumlah kekuatan militer atau pemerintahan, dan kudeta dilakukan dari atas.

Kondisi yang cocok bagi terjadinya kudeta adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya krisis yang berkepanjangan yang diikuti dengan terjadinya pengangguran secara besar-besaran dan krisis ekonomi ini disertai dengan kesenjangan sosial politik. Rakyat miskin hanya bisa menonton kemewahan serta korupsi oleh kelompok konglomerat dan birokrat. Lebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin menyebabkan rakyat miskin semakin menderita dan kondisi ini dapat memicu terjadinya kudeta terhadap pemerintahan demi membela nasib rakyat.⁷⁸
2. Perang yang lama atau kekalahan besar dalam bidang militer/diplomatik. Kekalahan ini dapat memicu terjadinya kudeta terhadap pemerintah.⁷⁹
3. Instabilitas kronis di bawah sistem multipartai, di mana di bawah pemerintahan sistem multipartai, stabilitas politik tidak stabil. Di Indonesia sendiri pernah mengalami sistem multipartai pada masa liberal

⁷⁸ Asvi Warman Adam, *Pelurusan Sejarah Indonesia*, Tride.Yogyakarta. 2004, hlm.29.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.30.

sehingga sering kali terjadi pergantian kabinet dan ketidakstabilan kondisi politik.⁸⁰

Pelaksanaan kudeta sendiri diibaratkan seperti pisau yang harus ditancapkan kepada jantung pasien dalam waktu yang tepat dan tidak boleh keliru. Bila dalam operasi militer, ada pasukan cadangan yang belum diterjunkan, khusus untuk kudeta berlaku azas totalitas. Malam kudeta dan sebelumnya diisi dengan aktivitas yang tersusun rapi. Setelah kudeta harus dilakukan stabilisasi massa dan stabilisasi birokrasi dan perlu dipersiapkan komunikasi pertama yang dikeluarkan setelah terjadi kudeta.⁸¹

Claude E. Welch, berpandangan bahwa apabila anggota militer mengakui keunggulan pemerintah sipil, kemungkinan campur tangan militer tidak akan timbul. Welch menganggap ada *tujuh faktor pendorong* keterlibatan militer yang di beberapa negara terjelma dalam bentuk kudeta yakni kemerosotan ekonomi, perpecahan para politisi terkemuka, keadaan ekonomi sosial yang tidak stabil, korupsi serta rendahnya kesadaran politik.⁸²

Setelah pemerintah sipil berhasil dijatuhkan, pimpinan kudeta berusaha untuk membenarkan tindakannya dalam merebut kekuasaan dengan menonjolkan masalah-masalah ekonomi, politik dan sosial yang tidak dapat ditangani oleh para politisi. Penguasa-penguasa baru itu menyatakan bahwa pemerintahan militer dalam satu periode saja cukup dapat memperbaiki kekurangan sistem politik yang ada. Akan tetapi, retorika mereka belum tentu sesuai dengan tindakan-tindakan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.31.

⁸¹ _____, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 192.

⁸² Muhammad Rusli Karim, *op.cit.*, hlm 46.

yang mungkin mereka lakukan. Negara yang berdasarkan kekuatan militer belum tentu akan berhasil dalam menangani kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh pemerintah sipil.⁸³

b. Teori Pemberontakan

Aristoteles mengemukakan bahwa ada dua motivasi dasar yang mendorong dan merangsang manusia untuk mengobarkan api pemberontakan yaitu keuntungan dan kehormatan. Lebih lanjut Aristoteles mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan yaitu

pertama, kondisi manusia yang menyebabkan pemberontakan itu yaitu kondisi sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya ketidakpuasan kepada pemerintah di mana di dalam masyarakat tidak ada kesamarataan.

Kedua yaitu keinginan dan impian yang hendak diraih yaitu sesuatu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri yang merupakan penyebab utama pecahnya pemberontakan.

Ketiga yaitu kondisi politik yang tidak sehat yang menyebabkan manusia tidak puas dan memberontak yaitu keuntungan, kehormatan, ketakutan, ketidakseimbangan, kekurangwaspadaan dan ketidakcocokan.⁸⁴

Selanjutnya juga dikemukakan tentang bagaimana mencegah timbulnya pemberontakan dengan melakukan tiga hal yaitu *pertama* dengan mengembangkan pendidikan, *kedua* dengan meningkatkan kepekaan dan rasa hormat dan tunduk pada hukum yang berlaku dan *ketiga* dengan melaksanakan

⁸³ *Ibid.*, hlm 47.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

keadilan dalam bidang hukum, administrasi dan pembangunan. *James C Davies* menganalisa penyebab terjadinya pemberontakan bahwa penurunan tingkat kepuasan akan kebutuhan dasar manusia akan menimbulkan frustrasi yang sangat potensial untuk melahirkan pemberontakan.

Kebutuhan dasar di sini meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial dalam masyarakat seperti pergaulan dan penghargaan kepada sesama, kebutuhan akan prestise dan kebutuhan akan keinginan untuk mempertinggi kemampuan kerja. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi pemberontakan kepada pemerintahan dalam suatu negara.

c. Teori Revolusi

Secara umum, revolusi terjadi karena situasi dan kondisi khusus yang menyebabkan meletusnya revolusi di suatu negara. Namun demikian, di setiap terjadinya revolusi ternyata mempunyai sebab yang hampir sama. Di antara *penyebab terjadinya revolusi ialah* struktur dan kondisi masyarakat, dinamika konsep pemikiran kelas menengah dalam masyarakat, keresahan dalam bidang politik dan terjadinya keresahan sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kesenjangan sosial dan ketidakadilan hukum. Keseluruhan alasan inilah yang menjadi sebab sebuah revolusi.⁸⁵

Akibat revolusi bisa sangat beragam. Hal ini tergantung tidak hanya pada faktor-faktor yang menyebabkan revolusi, pengaruh yang ditimbulkan oleh negara-negara asing serta permasalahan dan sumber daya yang dihadapi oleh pemenang dari perjuangan revolusioner.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm.192.

Akibat dari revolusi itu sendiri menurut Eisenstadt yaitu: *pertama*, perubahan secara kekerasan terhadap rezim politik yang ada, *kedua*: penggantian elit politik atau elit yang sedang berkuasa dengan yang lainnya, *ketiga*: perubahan secara mendasar seluruh bidang kelembagaan utama seperti dalam bidang sosial ekonomi dan *keempat*: pemutusan secara radikal dengan segala hal yang telah lampau serta *kelima*: memberikan kekuatan ideologis dan orientasi kebangkitan mengenai gambaran revolusioner. Hal ini mengandaikan revolusi tidak hanya membawa transformasi kelembagaan dan keorganisasian, melainkan juga perubahan terhadap sistem pendidikan dan sistem moral yang akan menciptakan manusia baru.⁸⁶

Maka jika dikaitkan dengan revolusi di Cina yang menghasilkan negara yang berdasarkan partai sosialis dan Meksiko menghasilkan partai negara kapitalis, maka revolusi yang terjadi pada Gerakan 30 September 1965 di Indonesia mengakibatkan hancurnya PKI, munculnya TNI-AD sebagai figur kekuatan militer dan jatuhnya kekuasaan Sukarno serta munculnya orde baru.

d. Teori Konflik

Konflik dapat dibedakan menjadi dua; yang *pertama*, konflik ideologi atau paham. Konflik ini dapat berlangsung dalam tataran konsep atau tertutup, tetapi dapat juga bersifat terbuka artinya dapat terjadi dalam persidangan atau konflik fisik atau perang. Contohnya yaitu konflik antara Uni Soviet dan Amerika dalam Perang Dunia II, atau pertentangan antara Mao Zedong dengan Chiang Kai Sek di China menjelang, selama dan sesudah Perang Dunia II.⁸⁷

Dalam sejarah Indonesia pun diketahui bahwa konflik ideologi pernah terjadi, baik yang masih secara tertutup maupun terbuka, khususnya pada periode

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

⁸⁷ -----, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta, Adi Pustaka, 1990, hlm.100.

berlakunya UUDS 1950, karena adanya kemajemukan azas, dasar, maupun ideologi yang dianut oleh partai-partai di Indonesia. Periode berlakunya UUD 1950-1959 juga sering dinamai dengan masa berlakunya sistem parlementer di Indonesia, merupakan periode penuh dengan pertentangan. Periode ini merupakan bagian dari suatu masa yang ditandai dengan suatu pertikaian ideologi yang pada hakekatnya merupakan kelanjutan munculnya perbedaan paham serta kemajemukan aliran atau ideologi dalam masa-masa sebelumnya.⁸⁸

Pada umumnya, partai-partai politik waktu itu mengacu pada ideologinya masing-masing yang dapat bersifat keagamaan, kebangsaan maupun ideologi yang terpengaruh oleh aliran-aliran yang berkembang di dunia barat baik yang sosialis maupun komunis. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan konflik ideologi.⁸⁹

Konflik yang *kedua* yaitu konflik organisasi yang terjadi karena perbedaan pendapat, pandangan, interpretasi, persepsi serta kepentingan antar individu atau kelompok dalam suatu organisasi, seperti yang terjadi pada Aidit dan Tan Liang Dji, yang berakhir pada kemenangan pihak Aidit. Sehingga sejak tahun 1951, Aidit mengambil alih pimpinan Partai Komunis Indonesia, selanjutnya, sekitar tahun 1964 menjelang 1965 PKI konflik dalam tubuh PKI membuat partai politik tersebut terpecah dalam 3 faksi, Aidit berkonspirasi dengan Biro Khususnya, Nyoto yang lebih intelektual, serta Sudisman yang tetap setia kepada buruh.⁹⁰

Menurut teori, konflik dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu: *pertama*, tingkatan terendah adalah konflik yang tidak rasional dan bertujuan untuk menyingkirkan atau membinasakan lawan. *Kedua* yaitu konflik tingkat menengah yang merupakan permainan strategi yang pada umumnya bertujuan untuk

⁸⁸ *Ibid.*, hlm 101.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm 102.

⁹⁰ Peter Edman, *op.cit.*, hlm.77, lihat juga Majalah Detak 5 Oktober 1998, hlm.4.

mengalahkan pihak lawan dan bersifat negatif. *Ketiga* yaitu konflik tingkat tinggi yang lebih bersifat persuasif.⁹¹

Langkah-langkah untuk menangani konflik adalah *pertama*, mengidentifikasi tingkat konflik, *kedua* mencegah pengaruh yang ditimbulkan, *ketiga* penetapan sanksi, *keempat* mencari jalan keluar dengan menuntut toleransi maksimum serta mencegah timbulnya konflik yang berakibat negatif dimasa yang akan datang.⁹²

Jika dikaitkan dengan Gerakan 30 September 1965, dapat dikatakan bahwa suatu konflik khususnya konflik intern TNI khususnya TNI-AD, konflik antara PKI dan TNI khususnya TNI-AD, konflik anatara PKI dengan partai-partai lain seperti PNI, NU dan Masjumi, serta konflik dalam tubuh PKI sendiri. Namun tidak sepenuhnya konflik karena gerakan tersebut adalah sebuah revolusi yang dilakukan oleh PKI untuk menciptakan masyarakat sosialis di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya revolusi tersebut gagal.

Jika dihubungkan dengan teori konflik, Gerakan 30 september 1965 sesungguhnya juga berakar dari konflik, khususnya konflik intern AD dengan Sukarno, namun tidak terlepas pula konflik ideologi antara TNI-AD dengan PKI, selain itu juga karena adanya konflik intern dalam tubuh PKI sendiri. TNI-AD sangat menentang ideologi komunis karena tidak sejalan dengan Pancasila.

e. Teori Konspirasi

Menurut Saiful Haq, teori konspirasi adalah dugaan tentang konspirasi yang sebenarnya atas dasar indikasi, saat adanya kecurigaan atau adanya petunjuk. Jika teori konspirasi diperkuat oleh suatu bukti yang defenitif, maka terbongkarlah terbongkarlah konspirasi dan berakhir. Tetapi sering bukti nyata yang defenitif semacam itu tidak bisa diperoleh. Sifat khusus yang membuatnya menjadi menarik karena mengurangi kompleksitas. Berbagai penyebab kejadian yang

⁹¹ Ensiklopedi Nasional Indonesia, *op.cit.*, hlm.103.

⁹² *Ibid.*, hlm. 104.

rumit dan berlapis-lapis disederhanakan dalam bentuk kambing hitam. Fungsi teori konspirasi dalam mereduksi keterkaitan yang rumit menjadi sederhana membuatnya menjadi alat ideal bagi propaganda dan agitasi.⁹³

Teori konspirasi sejatinya lahir dari bangunan prakonsepsi, asumsi, praduga atau bahkan imajinasi yang sudah terbangun mendahului fakta. Sehingga hal ini sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Dr. Safii Anwar, dalam Saiful Haq⁹⁴, menjelaskan bahwa, teori konspirasi menjadi masalah besar ketika masuk pada tiga area. *Pertama*, ketika teori konspirasi mengarah kepada apa yang disebut sebagai *pharanoia within reason*. Jadi, selalu ada semacam *pharanoia* atau ketakutan yang berlebihan yang selalu mengikuti akal manusia. *Kedua*, teori konspirasi juga mengembangkan apa yang dalam ilmu komunikasi disebut sebagai *systematically distorsion of information*, informasi yang didistorsi sedemikian rupa secara sistematis sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan. Ketika, teori konspirasi juga selalu mengarah kepada *terrorizing of the truth*. Karena sulit dibuktikan, maka pernyataan yang berbau konspiratif justru menjadi teror bagi kebenaran.

Harry dan Bonaro Overstreet, mengatakan bahwa, berkonspirasi sudah menjadi pembawaan orang-orang jaman kekaisaran Rusia dalam kehidupan negara feodal yang tidak mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perubahan yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri. Oleh karena itu rakyat tidak tinggal diam. Dalam keadaan yang memprihatinkan serta ketidakadilan, mereka bergabung dalam komplotan atau berkonspirasi. Konspirasi kaum komunis merupakan suatu jalan yang direncanakan dengan teliti untuk melaksanakan lalu-lintas yang mempunyai satu jurusan dari gagasan-gagasan. Jalan itu berisi semua siasat dan tipu muslihat dengan mana orang-orang komunis menyebarkan tujuan mereka kedalam daerah-daerah yang bukan komunis. Berkonspirasi merupakan

⁹³Siful Haq, <http://mahaonly.blogspot.com/2006/09/teori-konspirasi.html>.

⁹⁴*Ibid.*

strategi resmi komunis di bawah pimpinan Lenin. Secara tegas Lenin juga mengatakan, Suatu negara dimana politik demokrasi berlangsung, lebih luas lebih baik, negara itu dapat digunakan untuk tujuan konspirasi atau komplotan. Tetapi seorang komunis jangan sekali-kali menganggapnya sebagai alat yang bisa membuat perubahan cukup, dan bukan berarti menghentikan konspirasi.⁹⁵

f. Teori yang digunakan

Adapun teori yang dianggap paling cocok untuk dijadikan landasan dalam skripsi ini adalah teori revolusi karena penyebab terjadinya revolusi hampir sesuai dengan Gerakan 30 September 1965, di antaranya kondisi masyarakat yang menderita, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, namun yang paling dominan adalah keresahan dalam bidang politik yaitu pertikaian antara dua kubu yang saling bertentangan yaitu antara PKI dan TNI-AD, PKI dengan Partai lain seperti PNI, NU dan Masjumi, sehingga PKI dengan berambisi untuk mengusai lawan politiknya tersebut. TNI, khususnya TNI-AD menganggap PKI sebagai ancaman serius karena PKI berideologikan komunis yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Ideologi komunis dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan Pancasila karena PKI pada saat itu telah berkembang menjadi partai besar yang memiliki jutaan massa pendukung.

Kemudian akibat terjadinya revolusi juga sesuai dengan akibat Gerakan 30 September 1965, bahwa terjadi perubahan secara kekerasan terhadap era pemerintahan yang sedang berkuasa, dalam hal ini pemerintahan orde lama mulai pudar, serta mulai runtuhnya kekuasaan PKI sebagai salah satu partai yang paling

⁹⁵ Harry dan Bonaro Overstreet, *Apa Yang Harus Kita Ketahui Mengenai Komunisme Permulaanya Perkembangannya Keadaanya Sekarang*, Endang, Jakarta, 1958, hlm.62-63.

berpengaruh, demikian pula dengan penggantian penguasa politik yang sedang berkuasa dengan yang lainnya. Dalam hal ini adalah menurunnya kekuasaan Presiden Soekarno pasca Gerakan 30 September 1965. Kemudian muncul penguasa baru yaitu, TNI-AD sebagai figur kekuatan yang baru sampai naiknya Soeharto sebagai pemegang kekuasaan menggantikan orde lama.

Adapun teori revolusi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini juga sesuai dengan definisi revolusi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens dan Charles Tilly bahwa revolusi adalah perebutan kekuasaan negara melalui cara-cara kekerasan oleh para pemimpin gerakan yang mempunyai basis dukungan dalam hal ini Partai Komunis Indonesia yang terlibat persaingan politik dalam negeri, selanjutnya kekuasaan tersebut direbut dengan paksa di mana setidaknya ada dua blok yang bersaing yang membuat klaim yang berbeda untuk menguasai negara, yaitu TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia.

Selain teori revolusi, penulis juga mengkaitkan terjadinya Gerakan 30 September 1965 dengan teori konflik dan teori konspirasi. Alasan digunakannya teori konflik karena, terjadinya gerakan tersebut, sebelumnya juga sudah dipicu oleh berbagai konflik khususnya konflik antara PKI dengan TNI khususnya TNI-AD, konflik PKI dengan partai lain seperti PNI, Masjumi, NU serta organisasi-organisasi lainnya, sehingga memicu PKI untuk menjadi partai yang berkuasa atas musuh-musuh politiknya. Dalam majalah Detak edisi Oktober 1998, menulis bahwa, PKI sendiri terpecah menjadi dua faksi, Aidit dengan Biro Khususnya, Nyoto yang lebih intelektual serta Sudisman yang setia kelas buruh. Khusus pertentangan PKI dengan TNI-AD, dianggap juga sebagai pertentangan sayap

kanan yang memihak A.Yani dan Nasution dan sayap kiri yang memihak Presiden Sukarno. Konflik tersebut membuat TNI-AD menjadi tidak solid ketika harus dihadapkan dengan pertentangan dengan PKI yang semakin meruncing.

Teori konspirasi, diperlihatkan oleh PKI yang menggunakan para perwira progresif revolusioner, atau disebut sebagai perwira yang berpikiran maju, untuk membersihkan komando puncak TNI-AD, hal itu dilakukan sebagai upaya menghilangkan kendala utama untuk menuju kekuasaan tunggal PKI, apabila Presiden Soekarno tiba-tiba meninggal. Setelah pembersihan itu, maka PKI membentuk kabinet Gotong-Royong, dengan Aidit sebagai perdana menteri agar cita-cita kearah demokrasi rakyat, dimana PKI memonopoli kekuasaan. Pada tahun 1964, PKI telah meninggalkan strategi transisi damai menuju komunisme, dimana Moskow sebagai penasehat ideologisnya. PKI kemudian beralih ke gaya Peking yang menganjurkan sebuah “strategi pengambil-alihan kekuasaan secara revolusioner” dan, sesuai dengan itu, PKI menggalang suatu gerakan “ofensif revolusioner” di tahun 1965 untuk mengubah konstelasi kekuasaan di Indonesia demi sebuah cita-cita ke arah demokrasi rakyat.⁹⁶

g. Pendapat para ahli yang digunakan

Mengenai pendapat para ahli, menurut penulis, pendapat para ahli yang cukup relevan untuk menggambarkan revolusi yang terjadi di Indonesia Antonie C.A. Dake dalam bukunya “*In the Spirit of the Red banteng*”, yang dikutip oleh Manai Sophiaan, mengungkapkan tragedi ini mengacu kepada keterlibatan Partai

⁹⁶ Victor M. Fic, *Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.5.

Komunis Indonesia sebagai perencana.⁹⁷ Center for Information Analysis juga memastikan bahwa banyak tokoh Partai Komunis Indonesia menjadi penggerak dan Pelaksana gerakan tersebut, fakta itu sudah terbukti.⁹⁸

Benedict R. Anderson dan Ruth McVey, menyimpulkan bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan puncak dari konflik intern di tubuh Angkatan Darat (*A Preliminary Analysis of The October 1, 1965 in Indonesia, Cornell Paper*) Menurut Anderson dan Mc. Vey bahwa Gerakan 30 September 1965 merupakan puncak konflik yang ada di dalam tubuh Angkatan Darat karena di dalam tubuh Angkatan Darat sendiri ada kekuatan yang bertentangan yaitu sayap kanan yang memihak A.Yani dan Nasution dan sayap kiri yang memihak Presiden Sukarno.⁹⁹

Dalam menulis skripsi ini digunakan istilah Gerakan 30 September 1965 tanpa kata “PKI” dibelakangnya karena berdasarkan sumber-sumber yang digunakan maupun pendapat para ahli sejarah, sebagian besar meragukan keterlibatan PKI sebagai dalang maupun sebagai pelaku tunggal dalam gerakan tersebut. Ini karena adanya indikasi keterlibatan berbagai pihak seperti TNI-AD dan Soeharto di dalam peristiwa tersebut. Untuk itulah penulis dalam skripsi ini menggunakan istilah Gerakan 30 September 1965 tanpa PKI di belakangnya.

Terlepas dari itu, penulisan skripsi ini bukan untuk memojokkan siapa, dan organisasi apa, meski fakta yang dikemukakan dalam tulisan ini mungkin terasa pahit bagi golongan tertentu. Tetapi konsistensi pada tulisan ini lebih pada penyajian fakta-fakta sejarah yang diinterpretasi melalui sebuah karya ilmiah dan

⁹⁷ Manai Sophiaan, *op.cit.*, hlm.25.

⁹⁸ Center for Information Analysis, *Gerakan 30 September antara Fakta dan rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*, Media Pressindo, Yogyakarta, 1999, hlm.7.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm.16.

untuk kepentingan ilmiah pula. Sehingga cukup beralasan apabila penulis menggunakan nama Gerakan 30 September 1965 atau G 30 S 1965 bukan G 30 S/PKI. Karena dewasa ini hal tersebut kembali dipertanyakan, khususnya Partai Komunis Indonesia sebagai dalang ataupun pelaku tunggal dalam gerakan tersebut. Banyak juga yang menduga bahwa ada keterlibatan berbagai pihak seperti Angkatan Darat dan Soeharto di dalam peristiwa berdarah tersebut. Untuk itulah dalam peristiwa ini penulis menggunakan istilah G 30 S 1965 atau Gerakan 30 September 1965 tanpa tulisan PKI di belakangnya.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.¹⁰⁰ Dalam skripsi yang berjudul “Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia Dalam Gerakan 30 September 1965” perlu dikemukakan hipotesis yang berkaitan dengan judul dan tujuan skripsi. Hipotesis ini akan dibuktikan dalam penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Kalau Partai Komunis Indonesia terlibat dalam persaingan politik dalam negeri, maka partai Komunis Indonesia membentuk Biro Khusus Partai Komunis Indonesia.
2. Kalau “Biro Khusus” Partai Komunis Indonesia berperan sebagai perencana Gerakan 30 September 1965, maka Partai Komunis Indonesia terlibat Gerakan 30 September 1965.

¹⁰⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press, 1983, hal. 69.

3. Jika hubungan Soeharto dengan Untung, Latief, Supardjo dan Sjam Kamaruzzaman yang sudah mendapat pengaruh PKI, baik dan Soeharto sudah diberitahu oleh Latief mengenai akan terjadinya penjemputan para jenderal, namun Soeharto tidak melakukan upaya pencegahan, maka terjadi Gerakan 30 September 1965.

G. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

1. Metodologi

Penulis menyadari, bahwa dalam rangka merekonstruksi Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dalam Gerakan 30 September 1965, sangat diperlukan adanya metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara studi pustaka serta tetap berpedoman pada metode penelitian historis.

Penulis menggunakan metode ini karena data-data yang mendukung proses rekonstruksi sebagian besar dalam bentuk pernyataan. Maka studi pustaka sebagai penunjang pokok penelitian menjadi sebuah pilihan yang cukup rasional, mengingat batasan waktu yang diambil adalah tahun 1965.¹⁰¹

Penelitian historis sendiri, mempunyai ciri tersendiri dibandingkan dengan penelitian ilmu sosial, karena lebih menekankan dua hal pokok yaitu ruang dan waktu. Untuk itu setiap topik penelitian historis yang akan menjadi historiografi harus mencakup kedua unsur tersebut. Dalam penelitian ini telah tercakup dua unsur ruang dan waktu secara eksplisit yaitu tahun 1965.

¹⁰¹ Agung, I Gusti Ngurah, *Metode Penelitian Sosial: Pengertian dan Pemakaian Praktis*, Jakarta: PT Gramedia, 1992, hlm.9.

Secara garis besar, metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam metode penelitian kuantitatif, data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian dikonversi dalam bentuk angka-angka statistik. Metode penelitian kualitatif, datanya lebih banyak berupa pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat. Untuk itu, metode penelitian skripsi ini lebih tepat disebut sebagai penelitian kualitatif, karena data-data yang didapat lebih banyak berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat.

Metode penelitian kualitatif bisa ditempuh dengan dua cara yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan, peneliti mencari sumber dengan wawancara langsung, penyebaran kuesioner, dan sebagainya. Sedangkan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) peneliti mencari data-data yang telah dibukukan, seperti halnya dalam skripsi ini.

Skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan penelitian kepustakaan, penulis ingin menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah dikemukakan para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder, dan menghindari duplikasi penelitian.¹⁰²

Dalam mencari sumber-sumber tulisan, penulis menggunakan data historis. Data historis yang dimaksud adalah pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan proses perkembangan historis dari fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial dalam perurutan temporal yang mengandung dimensi waktu, yang

¹⁰² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ed), , *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm.45.

memberikan sampel pembentuk sehingga terwujud keadaan sekarang.¹⁰³ Data historis dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Kolose Ignasius.

Sesuai metode penelitian yang digunakan, tentunya tidak hanya bersumber dari satu buku, tetapi ada banyak buku. Buku-buku tersebut dipergunakan dalam rangka mengumpulkan dan menafsirkan gejala-gejala untuk diinterpretasikan guna menemukan generalisasinya. Penganalisaan digunakan untuk meramu data-data yang telah didapat guna mencari kesimpulan yang muncul. Pada dasarnya penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari beberapa permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Metode sejarah merupakan langkah-langkah kerja yang digunakan dalam proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif terhadap masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses disebut penulisan sejarah atau (*historiografi*). Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi (yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah), penulis sejarah berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia sebanyak-banyaknya.¹⁰⁴

Menurut Louis Gottschalk, metode penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.¹⁰⁵

¹⁰³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, ALUMNI, Bandung, 1980, hlm. 225-226.

¹⁰⁴ Louis Gotchalk, *op.cit.*, hlm. 32.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 35-38.

a. Pengumpulan Sumber (heuristik)

Heuristik adalah kegiatan peneliti memilih subyek untuk diteliti dan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di Perpustakaan Universitas Sanata Dharma dan Perpustakaan Kolose Santo Ignasius. Sumber yang diperoleh dapat berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer adalah keterangan langsung dari pelaku sejarah (narasumber), selain itu dapat juga berupa arsip-arsip sejarah, tulisan-tulisan asli pelaku sejarah maupun dokumen-dokumen resmi. Sedangkan sumber sekunder yaitu yang bukan keterangan langsung dari pelaku sejarah, yang dapat juga buku-buku.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang ada di perpustakaan Universitas Sanata Dharma, diantaranya adalah buku karangan Surya Lesmana *Saksi dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965*; buku yang ditulis Aidit *Pilihan Tulisan Djilid I dan II*; buku yang dikarang oleh Victor Miroslav *Fic Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi*; Buku yang dikeluarkan oleh Proyek Historiografi Center For Information Analysis *Gerakan 30 September Antara Fakta Dan Rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*; buku yang ditulis oleh P.J.Suwarno *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR sampai Supersemar)*; buku yang ditulis oleh Baskara T.Wardaya *Bung Karno Menggugat Dari Marhaen, CIA Pembantaian Massal 1966 Hingga G30S*; dan buku yang ditulis oleh Asvi Warman *Adam Revolusi Belum Selesai (Kumpulan Pidato*

Presiden Sukarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara)Jilid II, Pelurusan Sejarah Indonesia; buku yang ditulis oleh Harsono Sutedjo G 30 S Sejarah yang Digelapkan Tangan Berdarah CIA dan Rejim Suharto; serta buku yang ditulis Peter Edman Komunisme Ala Aidit Kisah Partai Komunis Indonesia di bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1955.

Selain itu, penulis juga menggunakan sumber-sumber dari internet yang berhubungan dengan penelitian tentang Gerakan 30 September 1965.

b. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber yang diperlukan terkumpul maka dilakukan kritik terhadap sumber yang sudah diambil. Kritik ini penting dilakukan untuk mengetahui tingkat otentisitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan atau ketidakaslian.¹⁰⁶ Adapun kritik sumber juga terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern digunakan untuk mengetahui tingkat kredibilitas sumber, apakah sumber yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak. Kritik ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang ada, sehingga dapat diperoleh fakta yang konkrit. Dalam penelitian ini untuk mengetahui kredibilitas sumber digunakan metode perbandingan, yaitu membandingkan satu sumber dengan sumber yang lain. Kesamaan informasi oleh beberapa sumber dipandang benar, apabila terdapat perbedaan informasi tentang suatu masalah maupun informasi maka pemecahan yang ditempuh adalah mengikuti informasi yang disampaikan kebanyakan sumber yang relevan.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

Contoh penggunaan kritik intern dalam penulisan skripsi ini adalah: terdapat perbedaan informasi mengenai proses penyerahan Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Soeharto. Dalam buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya* menyatakan bahwa penandatanganan Supersemar dilakukan oleh Presiden Sukarno dengan sukarela, serta jendral yang datang ke istana Bogor berjumlah tiga orang yaitu M.Yusuf, Basuki Rahmat serta Amir Mahmud.

Sedangkan dalam buku yang ditulis oleh Asvi Warman Adam *Pelurusan Sejarah Indonesia dan Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, buku yang ditulis oleh P.J.Suwarno *Gerakan Politik Tentara Nasional Indonesia 1945-1966 (Dari TKR Hingga Supersemar)*, buku yang ditulis oleh Surya Lesmana *Saksi Dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965*, dan buku yang dirangkum oleh Lembaga Analisis Informasi (LAI) *Kontroversi Supersemar Dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, yang diterbitkan oleh Media Pressindo, keempatnya menyatakan bahwa ada indikasi pemaksaan dalam penyerahan Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Soeharto, khususnya dalam penandatanganan Supersemar tersebut Presiden Sukarno berada di bawah tekanan, sedangkan jendral yang datang ke istana Bogor juga bukan hanya tiga orang melainkan ditambah satu orang lagi yaitu Jend.Panggabean yang datang dengan menggunakan mobil jiff.

Solusi yang dipakai yaitu, mengikuti informasi yang disampaikan khususnya yang menyangkut penelitian ini, sehingga informasi yang didapat dari banyak sumber menyatakan misalnya, memang ada unsur paksaan dalam penyerahan

Supersemar di mana penyerahan tersebut dilakukan Presiden Sukarno di bawah tekanan empat jendral utusan Soeharto.

Selain itu, bila ada beberapa sumber primer yang sebenarnya penting tapi tidak dapat dijangkau peneliti dengan berbagai alasan, maka diusahakan sebuah subsistensi. Subsistensi tersebut diadakan dengan cara mengumpulkan dan membandingkan sejumlah data sekunder. Metode ini dikenal dengan nama metode komprehensif analisis komparatif historis.¹⁰⁷ Misalnya proses pembentukan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, yang ditulis oleh Sekretariat Negara, dibandingkan dengan tulisan mengenai Biro Khusus Partai Komunis Indonesia Tulisan Harsono Sutedjo, sehingga yang didapat bahwa Sjam Kamaruzzaman sebagai pimpinan Biro Khusus, memang memiliki banyak nama alias atau samaran.

Sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian (otentisitas) sumber yang digunakan dalam penelitian, misalnya ditemukan dokumen sejarah, maka harus diamati ciri dan kualitas kertas dokumen tersebut, tinta, gaya bahasa serta tulisannya untuk mencocokkan dengan tahun terjadinya peristiwa sejarah itu.

Selain itu juga, dilakukan kritik Ekstern. Ini dilakukan dengan cara meneliti jenis bahan, gaya penulisan, bahasanya, ungkapannya, tintanya, kalimat yang digunakan, dan jenis huruf yang digunakan serta semua penampilan luar untuk mengetahui otentisitasnya. Kritik ekstern dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui otentisitas sumber yang digunakan. Caranya yaitu dengan menggunakan buku pustaka asli yang merupakan hasil karya asli dari para pelaku

¹⁰⁷Adisusilo, Sutardjo, *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX; Revolusi, Nasionalisme, Demokrasi, Komunisme*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 1994, hlm.119.

sejarah atau saksi sejarah maupun bukan saksi atau pelaku sejarah tetapi bukunya relevan dengan topik dari penelitian ini. Penulis menggunakan semua sumber yang berupa buku asli bukan foto kopi sehingga otensitas sumber tidak diragukan. Dari seluruh sumber yang digunakan, menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Setelah data terkumpul dan telah dilakukan kritik maka selanjutnya dilakukan analisis dan sintesis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bias subjektivitas. Sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar karena, tanpa penafsiran sejarawan data tidak bisa berbicara, sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh sehingga orang lain dapat melihat dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subjektivitas penulis sejarah diakui, tetapi perlu dihindari. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.

Analisis berarti menguraikan informasi atau data dari berbagai sumber dan mengkaitkannya antara satu dengan yang lain. Contoh cara menganalisis, pada waktu terjadi Gerakan 30 September 1965, Soeharto sudah mengetahui bahwa akan terjadi penculikan terhadap para jendral AD dari kol. Latief, ketika Kol. Latief mendatangi Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto. Namun, Soeharto tidak berbuat apa-apa. Melihat kenyataan tersebut dapat dianalisis bahwa Soeharto merupakan salah satu bagian yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965

terlebih dengan melihat kedekatan hubungan antara Soeharto dengan tokoh-tokoh kunci pelaku gerakan tersebut, karena walaupun sudah mengetahui bahwa akan terjadi peristiwa tersebut tetapi Soeharto tidak berusaha untuk mencegahnya.

Sintesis berarti menyatukan atau mengelompokkan informasi atau temuan dari berbagai sumber. Contoh, penulis melakukan sintesis dengan cara menyatukan informasi dari berbagai sumber yaitu buku yang ditulis oleh Victor Miroslav Fic *Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Studi Tentang Konspirasi*; buku yang dihimpun oleh Proyek Historiografi Center For Information Analysis *Gerakan 30 September Antara Fakta Dan Rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*; buku yang ditulis oleh Baskara T.Wardaya *Bung Karno Menggugat Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal 1965 Hingga G30S*, bahwa terdapat banyak pihak yang terkait dalam Gerakan 30 September 1965, seperti PKI, Angkatan Darat, Soeharto dengan dilatarbelakangi oleh kepentingan yang berbeda.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, Gerakan 30 September 1965 merupakan suatu peristiwa yang kompleks di mana terdapat banyak pihak yang terlibat dengan berbagai macam kepentingan di dalamnya.

d. Historiografi (penulisan sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Setelah melalui proses verifikasi dan interpretasi, maka data yang telah valid dituangkan dalam suatu tulisan sejarah. Tulisan sejarah ini sudah menggambarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lampau yang terjadi secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya dengan demikian memberi kemudahan bagi pembaca dalam

memahami peristiwa tersebut. Penulisan sejarah hendaknya dilakukan secara kronologis, sistematis, dan menggunakan gaya bahasa yang baku dan ilmiah. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memenuhi kriteria suatu penulisan sejarah seperti berpedoman pada cara penulisan yang ilmiah dan untuk kepentingan ilmiah pula.

Penelitian mengenai Gerakan 30 September 1965 ini telah melalui tahap-tahap metode penelitian sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penulisan skripsi ini mencakup hal-hal penting yang diperhatikan oleh penulis seperti topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan politik. Pendekatan sosiologis, digunakan untuk mengetahui tindakan-tindakan Partai Komunis Indonesia dari tahun 1950-1965 dalam konstelasi politik dalam negeri, tahun-tahun tersebut merupakan masa Partai Komunis Indonesia melakukan gerakan politik yang baru, sampai terbentuknya Biro Khusus sebagai organ gerakan bawah tanah Partai Komunis Indonesia dalam melakukan pengembangan partainya selain secara terbuka dan mengatasi berbagai persoalan berkaitan dengan adanya pertentangan ideologi, konflik kepentingan

usaha-usaha untuk saling mempengaruhi,¹⁰⁸ setelah nama Partai Komunis Indonesia mendapat rehabilitasi dari Presiden Soekarno karena melakukan pemberontakan di Madiun 1948.

Pendekatan politik menurut Delier Noer adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.¹⁰⁹ Dalam buku Ramlan Surbaki, Robson merumuskan bahwa ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa ilmu politik mempelajari hal ihwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil kekuasaan.¹¹⁰ Pendekatan politik dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gerak langkah Partai Komunis Indonesia sebagai sebuah partai revolusioner dalam dunia perpolitikan di Indonesia mulai tahun 1951 sejak pimpinan Partai Komunis Indonesia dipegang oleh Dipa Nusantara Aidit, dalam percaturan politiknya, Partai Komunis Indonesia strategi perjuangan baru: Front Persatuan Nasional. Selain itu Partai Komunis Indonesia juga membentuk berbagai organisasi massa.¹¹¹ Hal itu dilakukan untuk semakin memuluskan gerak langkah politik mereka agar lebih muncul ke permukaan sampai menjelang terjadinya Gerakan 30 September 1965.

¹⁰⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, Gramedia, Jakarta, 1992, hlm.24.

¹⁰⁹ Delier Noer, *Pengantar Kepemimpinan Politik*, Dwipa, Medan, 1965, hlm.6.

¹¹⁰ Ramlan Surbakti, *op.cit.*, hlm.5-6.

¹¹¹ Moedjanto II, *op.cit.*, hlm. 133-134.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia Dalam Gerakan 30 September 1965” akan dibuat sistematika penulisan agar mempermudah penulisan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metode dan pendekatan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :Menguraikan mengenai perkembangan Partai Komunis Indonesia setelah tahun 1950 dalam konstelasi politik dalam negeri, PKI dalam Pemilu 1955 dan Menguraikan latar belakang dan bagaimana terbentuknya “Biro Khusus” Partai Komunis Indonesia.

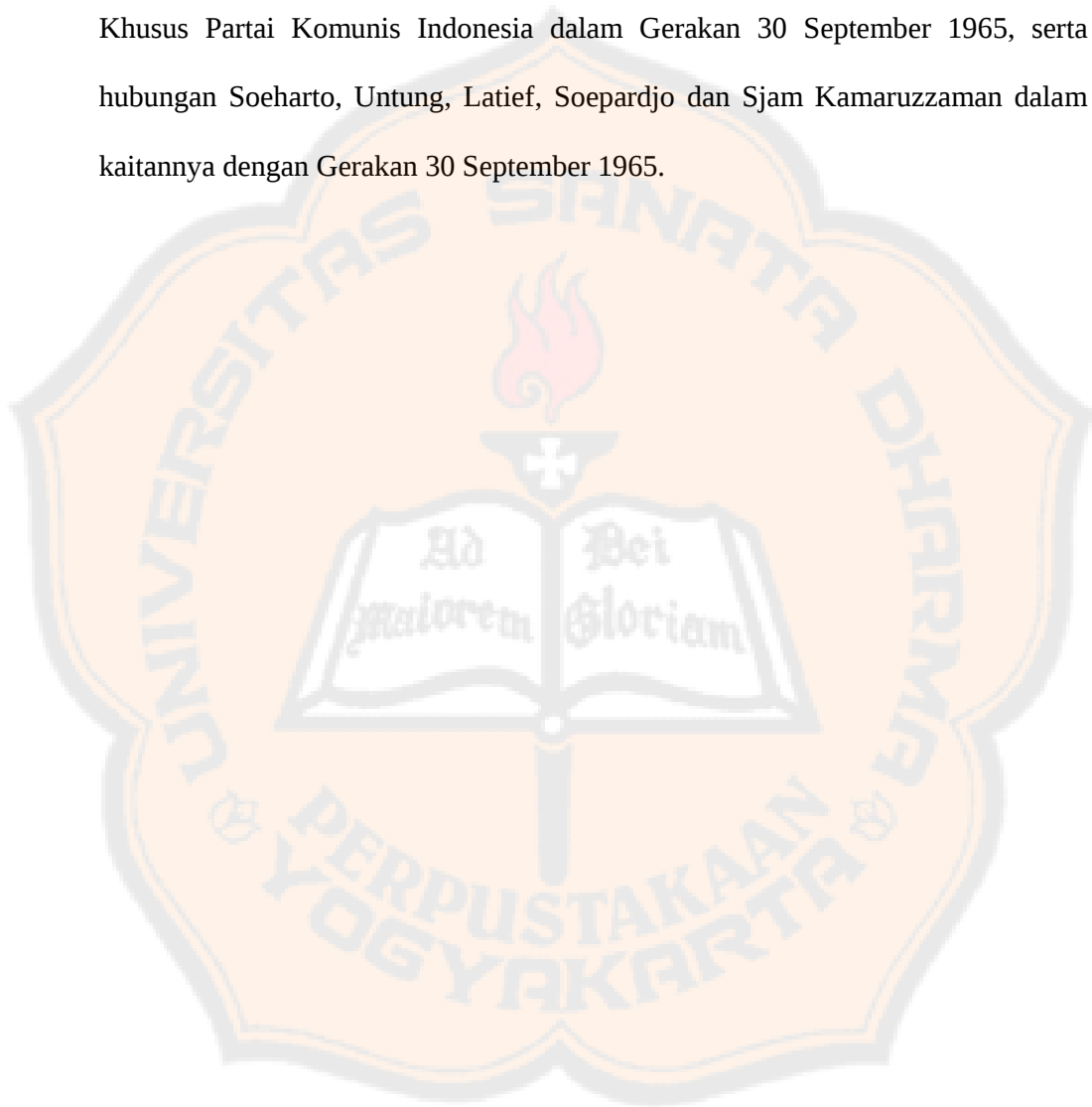
BAB III : Menguraikan posisi “Biro Khusus” dalam struktur organisasi Partai Komunis Indonesia. Peranan “Biro Khusus” Partai Komunis Indonesia dalam gerakan 30 September 1965.

BAB IV : Menguraikan dan menganalisa hubungan Soeharto, Untung, Latief, Soeparjo, dan Sjam Kamaruzzaman dalam kaitannya dengan Gerakan 30 September 1965, serta membahas mengenai Soeharto dalam gerakan tersebut.

BAB V : Kesimpulan yang isinya tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III dan IV.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini. Dari uraian diatas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang perkembangan Partai Komunis

Indonesia tahun 1950-1965 dalam konstelasi politik dalam negeri, latar belakang dan proses terbentuknya Biro Khusus serta posisi biro khusus dalam struktur organisasi Partai Komunis Indonesia, dan yang terakhir mengenai peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dalam Gerakan 30 September 1965, serta hubungan Soeharto, Untung, Latief, Soepardjo dan Sjam Kamaruzzaman dalam kaitannya dengan Gerakan 30 September 1965.



BAB II

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA “BIRO KHUSUS” PARTAI KOMUNIS INDONESIA

A. Perkembangan Partai Komunis Indonesia Setelah Tahun 1950 Dalam Konstelasi Politik Dalam Negeri.

Pasca *Madiun Affair* dan diadakannya sidang Central Committee tahun 1951 Partai Komunis Indonesia kembali menyusun kekuatan. Mereka sadar bahwa masa sebelum 1951 merupakan masa sulit bagi partai, karena mereka belum menemukan bentuk kerja yang lebih teroganisir. Setelah terjadi diskusi yang panjang antara grup yang menamakan dirinya “Sayap Leninis yang setia kepada jalan baru” dengan grup yang disebut “Sayap oportunis di dalam partai”, terbentuklah Politbiro *Central Comite* Partai Komunis Indonesia yang baru, terdiri dari Aidit, Lukman, Njoto, Sudisman dan Alimin. Namun Alimin mengundurkan diri karena alasan kesehatan dalam sidang pleno *Central Comite* Partai Komunis Indonesia bulan Oktober 1953 dan diganti oleh Sakirman.¹¹² Kembalinya Aidit dan Lukman ini menandai telah dimulainya sebuah era baru dalam sejarah partai. Sejak Januari 1951 itulah, di atas panggung pimpinan Partai Komunis Indonesia muncul pimpinan baru partai, yang disebut sebagai pimpinan Partai Komunis Indonesia periode 1951-1965, tidak lain adalah Dipa Nusantara Aidit. Alam demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada kurun waktu 1950-1959 memberikan kesempatan kepada Partai Komunis Indonesia untuk mengadakan

¹¹² Imam Soedjono, *Yang Berlawan Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Resist Book, Yogyakarta, 2006, hlm.268.

rehabilitasi walaupun sebelumnya partai komunis ini melakukan pemberontakan-pemberontakan di sejumlah daerah di Indonesia.

Pengambilalihan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia yang dilakukan oleh kelompok Aidit dari Tan Ling Dji, memunculkan perubahan besar dalam sejarah perjalanan partai. Hal ini juga menandai adanya perubahan sikap dalam partai, dari sikap para pendukung yang lebih tua yang telah berusaha melindungi diri dengan cara mempertahankan partai dengan keadaan yang mirip dengan gerakan bawah tanah, pasca meletusnya peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, serta mempertahankan sifat-sifat elitisnya sebagai cara berlandung yang lain.¹¹³ Tujuan mereka adalah bekerja baik di dalam maupun melalui bekerja sama dengan partai-partai lain, dan menganggap bahwa taktik yang dikemukakan Musso dalam resolusi “jalan baru” adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan saat itu, ketika partai masih harus menuai berbagai kritikan, karena telah menikam republik dari belakang dengan terjadinya peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun.¹¹⁴ Untuk itu, kelompok Aidit mengambil langkah yang berbeda dari langkah yang diambil golongan tua. Kelompok Aidit menganggap bahwa, partai harus mengambil sikap yang aktif di tengah massa dalam rangka membangun sebuah front bersatu yang lebih luas dan bukan membatasi diri dengan memenangkan kekuasaan melalui berbagai keberhasilan dalam parlemen, namun bukan berarti perjuangan parlemen diabaikan. Kemunculan kepemimpinan Dipa Nusantara Aidit membawa angin segar dalam Partai Komunis Indonesia, karena bersamaan dengan itu solidaritas

¹¹³ Peter Edman, *op.cit.*, hlm.67.

¹¹⁴ *Ibid.*

dan elan revolusi akan bersemi kembali. Hal ini memperkuat tujuan Partai Komunis Indonesia dalam upaya-upayanya membangun sebuah partai massa yang akan memperjuangkan tujuan-tujuan Marxisme di dalam masyarakat politik Indonesia.¹¹⁵

Tugas pertama yang harus dijalankan oleh Aidit bagi partai adalah memantapkan tujuan-tujuan partai yang mengandung dua hal: pertama, membangun sebuah bentuk persatuan yang berbasiskan pada aliansi antara para petani dan para buruh, yang diaplikasikan oleh Aidit dengan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTB). MKTB diadopsi dari pengalaman perjuangan bersenjata di Tiongkok. Negeri ini dalam melakukan perjuangan menggunakan tiga bentuk perjuangan tersebut, tetapi dengan masing-masing tujuan. Di Tiongkok menggunakan titik berat perjuangan kaum tani bersenjata dibawah PKC (Partai Komunis Cina) yaitu perjuangan di pedesaan; desa mengepung kota, dengan titik berat perjuangan bersenjata di pedesaan. Dimunculkannya teori MKTB untuk menolak arti pokok dari perjuangan gerilya untuk mencapai kemenangan revolusi dan membuka jalan lebar bagi perjuangan damai parlementer; di samping itu untuk “menenangkan hati” para bekas perjuangan bersenjata para anggota partai yang merasa tidak simpatik dengan jalan damai parlementer yang ditempuh oleh pimpinan partai.¹¹⁶

Tugas kedua, yaitu persoalan pembangunan sebuah Partai Komunis Indonesia yang ter-*bolshevik*-kan yang memiliki skala nasional dan memiliki ciri massa yang lebih luas lagi yang terkonsolidasi sepenuhnya secara ideologis, politis

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm.68.

¹¹⁶ Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm. 270-271.

maupun secara organisatoris.¹¹⁷ Tugas-tugas utama tersebut haruslah dipandang sebagai tugas untuk membangun sebuah front nasional yang bersatu. Hal ini bukan cita-cita Aidit dan Partai Komunis Indonesia pasca revolusinya semata-mata, melainkan sebuah proses yang telah dimulai sejak sebelum didirikannya Partai Komunis Indonesia.

Perkembangan Partai Komunis Indonesia tahun 1950-an sangat mengesankan sekaligus merisaukan lawan-lawannya golongan kanan sipil dan militer termasuk pemerintah Amerika Serikat dan Inggris.¹¹⁸ Pada tahun 1952 atau setahun setelah kepemimpinan Aidit, anggota Partai Komunis Indonesia kurang lebih 8000 orang. Demikian halnya dengan organisasi massa yang juga dibentuk Aidit.¹¹⁹ Perkembangan Partai Komunis Indonesia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:¹²⁰

NO	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA
1	1950 (September)	100.000 anggota
2	1951	Pembersihan kabinet Sukiman
3	1952 (Maret)	7.910 anggota
4	1952 (Mei)	100.000 anggota
5	1954 (Maret)	165.000 anggota
6	1957	1.000.000 anggota
7	1969	1.500.000 anggota
8	1963	2.500.000 anggota
9	1965	3.000.000 anggota

Sedangkan organisasi massanya juga meningkat:

- 1957 tercatat 7.000.000 anggota
- 1963 tercatat 7.800.000 anggota

¹¹⁷ Peter Edman, *op.cit.*, hlm.79.

¹¹⁸ Harsutejo, *op.cit.*, hlm.180.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm 181.

¹²⁰ Moedjanto, *op.cit.*, hlm.134.

- 1965 tercatat 20.000.000 anggota termasuk simpatisan.¹²¹

Setelah Partai Komunis Indonesia kembali ke panggung politik dalam negeri, pasca *Madiun Affair* 1948, maka melalui Aidit dan kawan-kawannya, Partai Komunis Indonesia berupaya untuk mengumpulkan kembali massa partai setelah terkumpul selanjutnya berusaha duduk dalam pemerintahan, seperti pada masa sebelum pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Untuk itu Partai Komunis Indonesia perlu mengadakan aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik yang mereka anggap penting. Awal tahun 1950-an terdapat dua partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia dan Majelis Sjura Muslimin Indonesia (Masjumi).¹²² Namun Partai Komunis Indonesia lebih memilih PNI yang paling potensial untuk didekati, karena PNI memiliki kebijakan anti kolonialisme dan demokrasi.¹²³

Jatuhnya Kabinet Sukiman tanggal 23 Februari 1952 akibat persetujuan *Mutual Security Act* (MSA)¹²⁴ dengan Amerika Serikat yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Mr. Achmad Soebardjo (Masjumi), Central Komite Partai Komunis Indonesia mengeluarkan pernyataan politik yang pada hakikatnya menawarkan kepada PNI untuk membentuk kabinet tanpa Masjumi. Meskipun kemudian dalam kabinet yang baru di bawah kepemimpinan Mr. Wilopo (PNI) terdapat pula menteri-menteri dari Masjumi.

¹²¹ *Ibid.*, hlm.135.

¹²² Setneg, *op.cit.*, hlm.26, lihat juga Moedjanto, *op.cit.*, hlm.133.

¹²³ Peter Edman, *op.cit.*, hlm. 108.

¹²⁴ Pada bulan Oktober 1951 ditengah gencarnya perang Korea, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan perundangan yang dinamakan Mutual Security Act of 1951. Tujuan dikeluarkan peraturan ini seperti diberitakan secara resmi di Washington D.C. adalah untuk memelihara keamanan dan promosi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan memberikan bantuan militer, ekonomi dan teknis kepada negara-negara sahabat untuk memperkuat keamanan dunia bebas. Kata “dunia bebas” kemudian menjadi hal yang sensitif terutama di kawasan Asia dan Afrika, ketika itu menghindarkan agar tidak berpihak pada perang dingin. “Dunia bebas” selalu diasosiasikan dengan kelompok Amerika. Dalam Admadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hlm.50.

Pernyataan dukungan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap PNI memiliki tujuan politik, yaitu agar partai-partai politik menghapus kecurigaan dan sikap anti terhadap Partai Komunis Indonesia dengan organisasi massa-organisasi massanya. Upaya Partai Komunis Indonesia tersebut berhasil dibuktikan dengan sejumlah pimpinan PNI mulai bekerjasama dengan Partai Komunis Indonesia. Kerjasama itu berpuncak pada upaya penjatuhan kabinet Wilopo oleh PNI sendiri, yang disebabkan oleh peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara, yakni insiden antara polisi dan penyerobot tanah perkebunan milik negara yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa itu merupakan kesempatan bagi PNI untuk merongrong Gubernur Sumatera Utara, Abdul Hakim dan Menteri Dalam Negeri Moh. Roem, yang keduanya dari Masjumi. Akhirnya kabinet Mr. Wilopo jatuh.¹²⁵

Setelah kabinet Mr. Wilopo jatuh, Partai Komunis Indonesia mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembentukan kabinet baru sesuai dengan Front Persatuan yang di dalamnya termasuk Partai Komunis Indonesia, tetapi tanpa Masjumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Krisis kabinet berlangsung lama dan beberapa formatur menemui kegagalan. Sebulan setelah itu terbentuklah kabinet baru di bawah pimpinan Mr. Ali Sastroamidjoyo (PNI) dengan menteri-menteri dari berbagai partai kecil, tetapi tanpa Masjumi dan PSI. Kabinet ini disebut kabinet Ali Sastroamidjoyo I.

...Saya dapat membayangkan betapa gembiranya rakyat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke mendengar terbentuknya kabinet baru, dimana di dalamnya tidak ikut serta pemimpin-pemimpin Masjumi dan PSI. Kegembiraan ini lebih bisa dimengerti lagi karena ini adalah tuntutan-tuntutan

¹²⁵ Set.neg, *op.cit.*, hlm.26., lihat juga Majalah Tempo, edisi 1-7 Oktober 2007. hlm. 73.

rakyat. Dengan terbentuknya kabinet ini, semua dongengan tentang keharusan “PNI-Masjumi” sudah dikubur sama sekali. Demikian juga perkosaan hukum oleh mereka yang mau memaksakan kabinet presidensiil mengalami kegagalan total. Terbukti sekali lagi, bahwa nasib Indonesia tidak tergantung dari pemimpin-pemimpin partai reaksioner dan juga tidak dari kolaborator-kolaborator NICA, tidak dari tuan-tuan modal besar asing dan tidak dari tuan-tuan tanah, tetapi sepenuhnya tergantung dari partai-partai dan orang-orang yang demokratis...”¹²⁶

Dalam pernyataan dukungannya terhadap kabinet tersebut, jelas menurut Partai Komunis Indonesia bahwa kabinet itu sebagai suatu kemenangan gemilang demokrasi terhadap fasisme.¹²⁷

B. Partai Komunis Indonesia dalam Pemilu 1955

Pemilu tahun 1955 merupakan awal dari masa depan yang cerah bagi Partai Komunis Indonesia. Walaupun sejak dibentuknya Panitia Pemilihan Indonesia, lambang berupa gambar palu dan arit dilarang untuk dijadikan tanda gambar selama pihak Partai Komunis Indonesia masih menulis kata-kata “Partai Komunis Indonesia dan mereka yang tidak berpartai” Protes dari NU tersebut hampir menghentikan proses pemilu, tetapi disadari betul bila itu dibiarkan maka Partai Komunis Indonesia bisa memanfaatkan secara cerdas, anggota masyarakat yang tidak berpartai dan yang bingung karena begitu banyak partai dan pribadi yang ikut dalam pemilu tersebut.¹²⁸

Pemilu pertama Indonesia di alam merdeka tidak tercemar oleh insiden yang serius. Daerah pemilihan dibagi menjadi 16 wilayah yang berdasarkan pada

¹²⁶ Aidit, Pilihan Tulisan Jilid I, *op.cit.*, hlm.155.

¹²⁷ Set.neg. *op.cit.*, hlm. 27., lihat juga Aidit, *ibid.*

¹²⁸ Admadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hlm.72.

propinsi-propinsi besar yang ada. Kursi yang diperebutkan berjumlah 257, pemilih yang terdaftar ialah 43.104.464 orang dari sekitar 77 juta penduduk Indonesia waktu itu, dan orang yang telah memilih berjumlah 37.875.299 orang. Hasil pemilu pertama tersebut membuat Indonesia terperangah, karena diluar dugaan muncul empat partai besar yaitu PNI, Masjumi, MU dan Partai Komunis Indonesia, dengan perolehan suara sebagai berikut:¹²⁹

Nama Partai	Jumlah Pemilih	%	Kursi
PNI	8.434.653	22,3	57
Masjumi	7.903.886	20,9	57
NU	6.955.141	18,4	45
PKI	6.176.914	16,4	39

Sumber :<http://www.kpu.go.id/Sejarah/pemilu1955.shtml>.

Bagi Partai Komunis Indonesia, hasil pemilu tersebut mewakili sebuah kemenangan dari kekuatan-kekuatan demokratis melawan blok reaksioner. Blok reaksioner dalam hal ini menurut Partai Komunis Indonesia adalah Masjumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI)¹³⁰. Sedangkan partai-partai besar lainnya seperti PNI, NU dan PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) diklasifikasikan oleh Partai Komunis Indonesia sebagai pihak yang berlawanan dengan kelompok partai reaksioner (Masjumi dan PSI).

Keberhasilan Partai Komunis Indonesia masuk empat besar pemenang pemilu 1955 tidak lepas dari peran strategi komunis yang selalu membangun sistem sel dalam setiap daerah kemudian sel tersebut dikembangkan oleh pengurus-pengurus

¹²⁹ *Ibid.*, lihat juga, Peter Edman, *op.cit.*, hlm.106.

¹³⁰ Peter Edman, *Ibid.*, hlm 107.

atau simpatisan-simpatisan Partai Komunis Indonesia di daerah tersebut, hal ini dibuktikan dalam tabel dibawah ini, hampir seluruh Indonesia dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia.¹³¹

Propinsi	Pemilih PKI	%
Jawa Timur	2.299.602	23,2
Jawa Tengah	2.362.108	25,8
Jawa Barat	755.634	10,8
DKI Jakarta	9.363	12
Sumatera Selatan	176.900	12,1
Sumatera Tengah	90.513	5,8
Sumatera Utara/Timur	258.875	10,8
Kalimantan Barat	8.526	1,8
Kalimantan Selatan	17.210	2,2
Kalimantan Timur	8.209	4,8
Sulawesi Utara/Tengah	33.204	4,4
Sulawesi Selatan/Tenggara	17.831	1,6
Maluku	4.792	1,4
NTT	5.008	0,5
NTB	66.067	5,5

Sumber : <http://www.kpu.go.id/Sejarah/pemilu1955.shtml>

Prestasi Partai Komunis Indonesia yang diraih dalam pemilu 1955, disebut Aidit sebagai kesembuhan partainya yang spektakuler. Peta politik Partai Komunis Indonesia dengan jeli melihat peluang untuk berkoalisi setelah tidak lagi dipandang sebelah mata oleh partai lain. Keberadaan Partai Komunis Indonesia benar-benar diperhitungkan, terutama karena peta politik yang mereka gariskan untuk suatu tujuan jarang meleset. Koalisi tersebut sudah diperhitungkan oleh Aidit agar Partai Komunis Indonesia tetap leluasa dalam membangun gerakan massa tanpa ada resiko pertanggungjawaban. Ketika mengusulkan pemerintah koalisi nasional D.N. Aidit dengan hati-hati menegaskan keinginannya tentang

¹³¹ Admadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hlm.74.

“koalisi pimpinan PNI-NU, dengan partisipasi Masjumi dan Partai Komunis Indonesia. Aidit sudah menyadari bahwa Masjumi pasti menolak duduk dalam kabinet bersama Partai Komunis Indonesia. D.N. Aidit selanjutnya mengusulkan bahwa “borjuasi komparador” bekerjasama dengan Partai Komunis Indonesia dalam perjuangan melawan musuh utama, yakni: “kekuatan sisa-sisa kolonialisme Belanda di bidang ekonomi, politik, pendidikan dan kebudayaan.”

Pertumbuhan Partai Komunis Indonesia sejak tahun 1952 yang begitu cepat, mereka membangun partai dengan sistem sel, sehingga membuat PNI dan NU gelisah karena peta politik mereka terbaca oleh PKI. Keterlambatan PNI dan NU dalam mengambil kebijakan membuat kedua partai tersebut kecolongan untuk kesekian kalinya oleh Partai Komunis Indonesia. PNI terlambat juga mengenali hubungan khusus antara Moskow dan Partai Komunis Indonesia yang nantinya dapat membahayakan eksistensi PNI sendiri.¹³²

Sebelum pemilihan Dewan Konstituante, presiden Soekarno memperdengarkan nada baru yang tegas, penuh nasionalisme dalam kampanyenya. Hal ini ditujukan untuk menggulingkan musuh-musuh politiknya seperti Masjumi, setelah tersingkirnya Sjahrir.

Presiden Soekarno membuka kampanyenya di Surabaya tanggal 14 November dengan mengaku telah memergoki dua “komplotan” untuk menghancurkan republik, keduanya konon berasal dari barat, yang bertujuan membuat sabotase birokrasi dan mendorong tindakan korupsi, yang kedua yakni membujuk republik

¹³² *Ibid.*, hlm.75.

dengan menandatangani perjanjian *Mutual Security Act* (MSA) masa kabinet Sukiman, yang sifatnya merugikan dan tidak diketahui sampai kemudian hari.

Pemerintah menyatakan tidak tahu-menahu mengenai komplotan itu dan pers yang pro pemerintah waktu itu menantang Presiden Soekarno supaya menunjukkan bukti konkrit, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan, malahan Presiden Soekarno memperberat tuduhan dengan serangan terhadap demokrasi barat yang menciptakan jurang antara kaum kaya dan miskin. Kemudian Presiden Soekarno mengusulkan Demokrasi terpimpin yang susunannya kurang jelas, hal itu dibuat sebagai upaya untuk menjembatani jurang antara kaya dan miskin, dan sekali lagi hal tersebut merupakan intrik politik Presiden Soekarno untuk menjatuhkan Masjumi.

Tanggal 15 Desember, Indonesia kembali mengadakan pemilihan untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Dampak tuduhan Presiden Soekarno di atas ternyata berpengaruh besar dalam pemilihan seperti dalam tabel dibawah ini:¹³³

Partai	Pemilih	Kursi
PNI	9.070.218	119
Masjumi	7.789.619	112
NU	6.989.333	91
PKI	6.232.512	80

Sumber :<http://www.kpu.go.id/Sejarah/pemilu1955.shtml>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil pemilu sebelumnya yang didapat oleh Partai Komunis Indonesia hanya 39 kursi dan pemilu kedua menjadi

¹³³ *Ibid.*, hlm 76.

80 kursi. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan rakyat terhadap Partai Komunis Indonesia meningkat tajam dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya.

Menurut sejarawan Sudhan Sd¹³⁴, ada empat alasan yang menyebabkan Partai Komunis Indonesia memperoleh kemenangan yang begitu gemilang dalam Pemilu 1955. Yang pertama, adanya krisis politik yang berkepanjangan pasca Proklamasi dan pasca 1950 yang dimanfaatkan secara tepat oleh Partai Komunis Indonesia untuk muncul sebagai partai yang sah. Sesuai dengan taktik klasik mereka, Partai Komunis Indonesia ikut melakukan manuver politik memperkeruh suasana tersebut. Kedua, para tokoh muda Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit ternyata menyadari kondisi objektif di Indonesia sehingga beberapa teori komunis seperti teori pertentangan kelas tidak dijalankan secara kaku. Sekali lagi pembuktian yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia dalam usaha kemenangan pemilu 1955, dari teori front persatuan yang mendasar yang dibuat Lenin, seperti dibawah ini.

“...Bahwa eksponen-eksponen kapitalisme, simusuh, hanya dapat dikalahkan dengan menarik keuntungan dari setiap pertentangan kepentingan. Dan dengan menarik keuntungan dari setiap kesempatan, dari yang terkecilpun, untuk mendapatkan sekutu organisasi massa. Walaupun sekutu ini bersifat sementara, plintat-plintut labil, tak dapat dipercayai dan disertai syarat...”¹³⁵

Dari kutipan pernyataan di atas jelas bahwa Partai Komunis Indonesia memanfaatkan konflik nasional yang sedang berlangsung, dan ditunjukkan dengan krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di

¹³⁴ Sudhan SD, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Bentang, Jakarta, 1995, hlm.18.

¹³⁵ Taktik-Taktik Front Persatuan Komunis di alam Demokrasi Terpimpin, Kursus Kader Katolik, Gunung Sahari 88, Djakarta V/3 (tanpa tahun terbit), hlm.9.

situlah Partai Komunis Indonesia tampil untuk melakukan penarikan massa sebanyak-banyaknya dalam keanggotaan partai.

Ketiga, para tokoh Partai Komunis Indonesia dengan pandai mengidentikan dirinya sebagai pejuang demokrasi dan seorang nasionalis baru sehingga mampu meraih simpati massa. Keempat, tindakan Aidit untuk mengkonsolidasikan organisasi onderbow terutama seperti organisasi Barisan Tani Indonesia dan SOBSI ternyata sangat tepat karena dalam pemilu 1955 mereka menjadi penyumbang terbesar suara bagi Partai Komunis Indonesia.

Selama periode pembangunan kembali Partai Komunis Indonesia 1950-1955 juga diuntungkan oleh: Pertama, kurang terlibatnya TNI dalam soal politik. Walaupun didirikannya IPKI (Ikatan Pendukung kemerdekaan Indonesia) oleh A.H. Nasution tetapi tidak sepenuhnya melibatkan institusi TNI. Kedua, TNI dengan peristiwa 17 Oktober 1952 harus bersikap *low profile*, karena gerakan yang mereka lakukan itu mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Ketiga, situasi politik waktu itu memungkinkan semua aliran politik untuk bergerak bebas. Selain tindakan pemogokan oleh buruh yang dilakukan oleh SOBSI yang harus berhadapan dengan tindakan keras Perdana Menteri Sukiman, Partai Komunis Indonesia sama sekali tidak melakukan usaha yang membahayakan eksistensi negara secara langsung.¹³⁶

¹³⁶ Admadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hlm.79.

C. Partai Komunis Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945. Hampir bersamaan dengan hal tersebut, tanggal 13 Juli diumumkan pula kabinet baru. Diantara 36 menteri terdapat 11 tentara dan sisanya non-partai atau anggota partai yang tidak penting kedudukannya. Dalam kabinet ini terdapat anggota yang beraliran kiri. Prijono (Menteri Muda PP&K); Chaerul Saleh (Pembangunan); Sadjarwo (Menteri Muda Agraria); Sudibjo dan Soedjono (Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat).

Pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno mencetuskan Manifesto Politik (Manipol) yang sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep Marxisme.¹³⁷ Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan agar dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, dan perlengkapan kembali lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Pada awal tahun 1960, Manipol ditambahkan kata USDEK, yang berarti Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia.¹³⁸

Dalam periode demokrasi terpimpin, semua kegiatan kemasyarakatan khususnya di bidang politik, terpaksa menyesuaikan diri dengan Manipol yang dinyatakan sebagai Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung pada tanggal 15 September 1959 dengan nomor penetapan: No. 13/Kpts/sd/II/59.

¹³⁷ *Dari Madiun ke Lubang Buaya dari Lubang Buaya ke...?*, Kursus Kader Katolik, Sekretariat Nasional K.M. Gunung Sahari 88, Djakarta V/6, 1967, hlm. 62., lihat juga Set.neg. *op.cit.* hlm.29.

¹³⁸ Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta, 2005., hlm.527., lihat juga, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*. LSIK. Jakarta, 1988. hlm.62.

Setiap warganegara harus menjadi “manipolis Sejati” Partai-Partai yang tidak menerima manipol Presiden Soekarno dibubarkan. Para pelajar yang hendak masuk universitas, kandidat-kandidat sarjana, calon pegawai mereka semua harus membuktikan bahwa mereka sudah menelan manipol.¹³⁹

Manifestasi politik yang diterapkan Presiden Soekarno, tersebut diperkuat dengan undang-undang kepartaian yang memberikan wewenang kepada presiden untuk menyederhanakan jumlah partai. PSI dan Masjumi-pun turut menjadi korban undang-undang kepartaian tersebut, sehingga pada bulan Agustus 1960 PSI dan Masjumi dilarang dan sejak saat itu pemerintah dan tentara mulai mengadakan pengontrolan keras terhadap pers. Surat-surat kabar Partai Komunis Indonesia-pun tidak luput dari pembrendelan.¹⁴⁰

Pada tanggal 5 Maret 1960 Presiden Soekarno membekukan DPR hasil pemilihan umum, karena tidak mau menerima anggaran belanjanya begitu saja. Kemudian pada tanggal 29 Maret 1960 dibentuklah parlemen baru:” Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPRGR)”, dengan beranggotakan 130 orang anggota partai politik dan 131 orang dari golongan fungsional, Partai Komunis Indonesia mendapat 30 kursi, yang berarti 9 kursi kurang dari hasil pemilu parlemen 1955. Sebelum ini, bulan September 1959, telah didekritkan, bahwa gubernur, walikota dan bupati akan ditunjuk langsung dari pusat. Dengan demikian pejabat-pejabat utama daerah hasil pemilu daerah 1957, di mana Partai Komunis Indonesia mendapat 27,4% suara, yang berarti banyak wakil Partai Komunis Indonesia yang menjabat sebagai walikota dan bupati hasil pemilu

¹³⁹ *Dari Madiun ke Lubang Buaya...*, *op.cit.*, hlm. 86.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 62., lihat juga, Atmadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hal.106., lihat juga, Peter Edman, *op.cit.*, hlm.121.

daerah. Terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, banyak yang digeser dan diganti oleh pejabat yang ditunjuk. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan pukulan keras bagi Partai Komunis Indonesia yang menempuh jalan damai parlemen menuju ke sosialisme, apalagi TNI-AD mendukung sepenuhnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah, padahal TNI-AD merupakan musuh besar bagi Partai yang berhaluan komunis tersebut. Kebijakan TNI-AD mendukung kebijakan pemerintah karena dengan jalan tersebut perkembangan Partai Komunis Indonesia terhambat.

Partai Komunis Indonesia harus menerima apa yang sudah menjadi keputusan Presiden, walaupun sudah mendapat jaminan perlindungan dari Presiden Soekarno sendiri. Pencekalan yang dilakukan oleh TNI-AD terhadap upaya perkembangan Partai Komunis Indonesia diberbagai bidang, membuat Partai Komunis Indonesia mencari medan lain untuk melakukan perjuangan, yang diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan badan eksekutif tertinggi¹⁴¹.

Salah satu langkah politik yang dijalani Partai Komunis Indonesia, yaitu aksi-aksi kaum tani di pedesaan, aksi sepihak, lengkap dengan tuntutan dan semboyannya. Pelaksanaan aksi sepihak ini menggunakan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan UU Pokok Bagi Hasil (UUPBH) sebagai landasan aksi mereka, dengan demikian aksi ini bisa terlihat memiliki legalitas. Aksi sepihak ini berkembang begitu cepat, sehingga di beberapa tempat antara lain Jengkol (kediri:1962), terjadi *clash* kekerasan antara kaum tani dan tentara.¹⁴²

¹⁴¹ Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm.290.

¹⁴² *Ibid.*

Setelah memulai pekerjaannya di kalangan kaum petani, Partai Komunis Indonesia bekerja lebih jauh lagi guna memantapkan kedudukan mereka di kawasan pedesaan sebelum membuat suatu gerakan yang nyata kearah implementasi pembaharuan-pembaharuan di berbagai bidang. Kecenderungan semakin menguatnya dukungan terhadap partai di pedesaan membuat Partai Komunis Indonesia semakin giat menanamkan pengaruhnya dengan disertai pembangunan kawasan pedesaan sebagai upaya pemeliharaan dukungan terhadap partai. Implementasi dari komitmen perjuangan Partai Komunis Indonesia dalam menggalakan penanaman selnya di kawasan pedesaan, dengan memperjuangkan UUPA dan UUPBH yang akhirnya dikabulkan parlemen. Undang-undang tersebut adalah sebuah permulaan dan sebuah pendorong untuk meneruskan perjuangan, meski perjuangan di kalangan kaum tani mengalami stagnasi.

Perjuangan di kalangan kaum tani yang mengalami stagnasi tidak membuat partai Komunis Indonesia kehabisan strategi. Dalam rangka menjaga eksistensi yang semakin ditekan oleh lawan-lawan politiknya, Partai Komunis Indonesia melakukan pendekatan politik dengan Presiden Soekarno, dengan jalan melakukan dukungan politik terhadap apa yang menjadi keputusan Soekarno dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sikap ini dilakukan Partai Komunis Indonesia agar mendapat celah untuk melakukan manuver politik yang sudah mereka gariskan yaitu menuju masyarakat sosialis. Pernyataan politik sebagai bentuk dukungan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintahan Presiden Soekarno tampak dalam pidato ketua Central Komite Partai Komunis Indonesia D.N. Aidit:

“...PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa yang diterimanya adalah demokrasi, dan demokrasi yang tidak liberal. Segi positif dari Demokrasi Terpimpin ialah, disatu pihak anti-diktatur-militer dan diktatur perseorangan, dan dipihak lain anti liberalisme. Anti-liberalisme di lapangan politik, tidak bisa diartikan lain kecuali pelaksanaan konsepsi Presiden Soekarno 100%, yaitu pembentukan kabinet Gotong-Royong berdasarkan perwakilan berimbang dan tanpa “dagang sapi”. Anti-liberalisme di lapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain kecuali anti “free fight liberalism” di lapangan ekonomi, dan ini berarti pengutamaan sektor negara untuk memimpin sektor partikelir. Segi-segi positif dari Demokrasi Terpimpin harus dikembangkan dan ditunjukan untuk pelaksanaan konsepsi presiden 100%. Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden Sukarno adalah satu kesatuan, yang pertama adalah jalan untuk mencapai yang kedua...”¹⁴³

Dari pernyataan diatas, secara tidak langsung mengungkapkan bahwa, Partai Komunis Indonesia sudah mengetahui, apabila Soekarno tidak lagi menjadi Presiden, maka keberadaan mereka juga terancam oleh TNI terutama Angkatan Darat yang semakin menjepit eksistensi mereka. Untuk itu apapun yang menjadi keputusan Soekarno dalam menjalani roda pemerintahan mereka ikuti, namun langkah tersebut merupakan strategi politik yang harus mereka tempuh sebagai jalan satu-satunya untuk menjaga eksistensi partai, karena gerak politik mereka sudah banyak terbaca oleh lawan-lawannya.

Konsep nasakom (nasionalis-agama-komunis) yang merupakan implementasi dari nasionalisme, islamisme dan marxisme yang menjadi cita-cita Soekarno, dengan penuh didukung oleh Partai Komunis Indonesia. Berbicara di Stadion Olahraga Jakarta pada tanggal 24 Mei 1965 ketika merayakan hari jadi Partai Komunis Indonesia yang ke-45, Presiden Soekarno secara gamblang menyatakan”

¹⁴³ Aidit, *Pilihan Tulisan Djilid II*, Jajasan Pembaruan, Djakarta 1960, hlm.520.

“...Ya, saya merangkul PKI karena ia adalah sebuah kekuatan revolusioner... . Kebijakan kita sekarang ini adalah mempersatukan seluruh kekuatan revolusioner progresif, karena itu tidaklah mengherankan apabila saya merangkul PKI...”

Lebih lanjut Presiden menambahkan bahwa, ia bermaksud bermaksud untuk me-NASAKOM-kan The New Emerging Force, dan untuk itu markas besarnya yang baru sedang dibangun di Jakarta dengan bantuan Cina.¹⁴⁴

Pada kesempatan ini, Partai Komunis Indonesia mengambil peluang dengan turut pula melakukan nasakomisasi di segala bidang. Banyak orang yang sebenarnya menentang apa yang menjadi taktik Partai Komunis Indonesia, namun partai ini memiliki perbendaharaan kata-kata kasar yang setiap saat digunakan untuk menakut-nakuti siapa saja yang meragukan atau bahkan melawan Nasakom. Setiap warga Indonesia diharuskan berjiwa Nasakom. Dengan Nasakom, Partai Komunis Indonesia merasa berhak atas sepertiga kursi-kursi pemerintahan.¹⁴⁵

Dalam menjalani langkah politik tersebut Partai Komunis Indonesia juga melakukan tuduhan dan fitnahan terhadap lawan politiknya, sehingga menimbulkan perselisihan sengit, *show of force* antar simpatisan partai, dan dalam hal ini Partai Komunis Indonesia selalu muncul dengan massa raksasanya sebagai bentuk *counter* strategi yang dilakukan oleh lawan politiknya.

Akhir bulan september 1964 Aidit mengusulkan “Totokromo Nasakom” yakni tidak membolehkan saling menyerang atau menilai ideologi lain secara merugikan. Ketiga unsur Nasakom harus erat bekerjasama. Berdasarkan prinsip

¹⁴⁴ Victor M. Fic. *op.cit.*, hlm.83-84.

¹⁴⁵ Dari Madiun ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya ke..., *op.cit.*, hlm.68.

inilah kesepuluh partai mengumumkan Deklarasi tanggal 12 Desember 1964, yang terkenal dengan sebutan “Deklarasi Bogor”.¹⁴⁶ Setiap pertentangan atau perselisihan pendapat harus diselesaikan melalui konsultasi dan bukan konfrontasi. Sebetulnya deklarasi tersebut dipakai oleh Partai Komunis Indonesia untuk memukul lawan politiknya khususnya islam dan murba, sedangkan Partai Komunis Indonesia sendiri tidak mengindahkan deklarasi tersebut.

Selain nasakomisasi, strategi politik Partai Komunis Indonesia untuk mendapat simpati rakyat, bergerak dalam bidang kebudayaan. Melalui Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA), Partai Komunis Indonesia memperoleh simpati dari sebagian besar seniman kreatif Indonesia.¹⁴⁷ Alasan dibentuknya LEKRA oleh Partai Komunis Indonesia, karena mereka tidak mendapat simpati besar dari kaum intelektual dan birokrasi pemerintahan. Kurangnya daya penarik kaum Komunis bagi kaum terpelajar atau intelektual karena kaum elit intelektual condong untuk bersimpati dengan rakyat jelata, dengan cara kebabakan, setelah nilai-nilai aristokratis priyayi dibawa ke dalam birokrasi modern.

Kegiatan-kegiatan komunis dalam bidang kebudayaan yang tergabung dalam LEKRA semakin besar, karena konsep perjuangan di bidang kultural ini memang harus selaras dengan cita-cita partai. Aktivitas-aktivitas kultural LEKRA selalu identik dengan ideologi politik komunis. Semboyannya adalah “seni untuk rakyat”, juga “seni untuk revolusi”.¹⁴⁸ Untuk membendung arus ini, SOKSI dengan dukungan Angkatan Bersenjata mengadakan hubungan dengan para seniman, dan sastrawan serta pengarang yang anti komunis guna mendirikan suatu

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm.70.

¹⁴⁷ *Taktik-Taktik Front Persatuan Komunis Di alam Demokrasi Terpimpin*, *op.cit.*, hlm.49.

¹⁴⁸ LSIK, *op.cit.*, hlm. 44.

lembaga kebudayaan yang berafiliasi pada SOKSI, karena tidak mencapai kesepakatan yang disebabkan oleh perbedaan yang prinsipil maka pada tanggal 17 Agustus 1963, 22 sastrawan dan cendekiawan non-komunis mencetuskan Manifesto Kebudayaan (Manikebu).¹⁴⁹ Tujuan didirikannya Manikebu untuk membela kebebasan intelektual yang kreatif, karena politik tidak boleh dijadikan panglima tertinggi yang menguasai segala bidang. Manikebu membela nilai-nilai kemanusiaan universal yang telah diinjak oleh kaum totaliter, mereka menghendaki sikap netral terhadap berbagai blok kekuasaan politik termasuk komunis. Mereka berdiri pada prinsip dan sikap kebudayaan yang betul, yang non-komitmen dari blok-blok militer dan politik.¹⁵⁰

Konsekuensi dari keputusan Manikebu mendapat kecaman dan bahkan penyerangan dari dua lembaga kebudayaan politik, yaitu LEKRA milik Partai Komunis Indonesia diantaranya Pramudya Ananta Toer dan LKN dari Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Sitor Situmorang. Manikebu dicap oleh pers Partai Komunis Indonesia sebagai Kontra-Revolusioner dan Drs.H.B. Jassin, Lektor Universitas Indonesia sebagai tokoh Manikebu supaya direcall. Karena H.B. Jassin yang pertama menandatangani manifest itu.¹⁵¹

Sasaran serangan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia tidak hanya sebatas pada sastrawan non-komunis, sasaran serangan tersebut justru pada jendral Angkatan Darat yang melindungi Manikebu dan yang belum dapat

¹⁴⁹ Dari Madiun ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya ke..., *op.cit.*, hlm.72.

¹⁵⁰ *Ibid*, Lihat juga Set.neg. *op.cit.*, hlm. 56

¹⁵¹ *Ibid.*, lihat juga Moedjanto, *op.cit.*, hlm 137., lihat juga, Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. hlm. 273., lihat juga, Set.neg. *op.cit.*, hlm.56.

diserang secara langsung. Selain Manikebu, musuh kedua Partai Komunis Indonesia ialah semua pembela Pancasila yang konsekuen.

Pada tanggal 8 Mei 1964, Presiden melarang Manikebu, salah seorang tokoh Manikebu, H.B. Jassin, sastrawan yang berjasa dalam bidang dokumentasi sastra, tidak diakui oleh Soekarno sebagai penafsir yang paling tepat dan revolusioner dalam menafsir ajaran Soekarno sendiri. Partai Komunis Indonesia-lah yang justru penafsir ajaran-ajaran Marhaenisme khususnya atau revolusi Indonesia pada umumnya, dan memonopoli penafsiran ajaran Soekarno untuk disesuaikan dengan arah yang dikehendaki dan tentunya untuk kepentingan politik Partai Komunis Indonesia sendiri.¹⁵²

Setelah Manikebu dilarang, Partai Komunis Indonesia terus-menerus mengejar pengikut-pengikut Manikebu dalam bidang kebudayaan, pers dan penerangan. Banyak tokoh-tokoh anti komunis jatuh dan dicap Manikebuis, dan kedudukan mereka diambilalih orang komunis atau simpatisannya. Situasi ini berkembang terus, sehingga akhirnya baik dalam Antara, PWI, RRI maupun dalam Departemen PDK hampir semua posisi penting jatuh ketangan komunis. Sebagian besar pesanan untuk kebutuhan resepsi-resepsi, konferensi-konferensi kenegaraan diserahkan kepada Lekra, atau organisasi merah lainnya. Dengan demikian kas Partai Komunis Indonesia semakin bertambah.

Setelah gagalnya Manikebu dalam konstelasi kebudayaan dalam negeri untuk menyaingi Partai Komunis Indonesia, maka muncul BPS (Badan Pendukung/Penyebarkan Soekarnoisme) yang didirikan oleh B.M. Diah (pemimpin

¹⁵² Moedjanto, *Ibid.*, lihat juga, Ricklefs, *op.cit.*, hlm.542.

redaksi harian Merdeka dan Menteri Penerangan). Kelahiran BPS disambut hangat oleh hampir seluruh rakyat Indonesia, hanya Partai Komunis Indonesia yang semakin siaga dan harus mencari strategi baru lagi untuk menggagalkan saingan baru mereka itu.

Badan Pendukung Soekarnoisme merupakan sebuah badan yang ingin memurnikan ajaran Presiden Soekarno yang didukung oleh kelompok anti Partai Komunis Indonesia dan kelompok yang sangat gigih menentang aksi-aksi Partai Komunis Indonesia.¹⁵³ Oleh karena itulah Partai Komunis Indonesia menganggap BPS sebagai musuhnya dan berusaha untuk menghancurkan BPS dengan cara memfitnah BPS sebagai sengaja dibentuk untuk menyelewengkan ajaran Presiden Soekarno, dan bahkan berusaha memusnahkan ajaran Presiden Soekarno. Terhadap munculnya BPS tersebut, Presiden Soekarno menyatakan bahwa:

“...Sungguh menggelikan ada orang yang mengaku menyebarkan ajaran Soekarno, tetapi hanya menganjurkan ‘Samenbundeling van alle krachten’ saja. Bukan van alle revolutionaire...justru kata yang menunjukan jiwa daripada ajaran revolusi.”¹⁵⁴

Dengan pertimbangan seperti itu, Presiden Soekarno membubarkan BPS. Sasaran Partai Komunis Indonesia berikutnya adalah Partai Murba. Hal ini erat kaitannya dengan tindakan Dr. Chaerul Saleh, salah seorang tokoh Partai Murba, yang telah menyiarkan sebuah dokumen yang menggambarkan program rahasia Partai Komunis Indonesia. Dokumen tersebut mengandung instruksi lengkap

¹⁵³ Setneg, *op.cit.*, hlm.35.

¹⁵⁴ *Ibid.*

pimpinan Partai Komunis Indonesia untuk mempersiapkan perebutan kekuasaan pada tahun 1970.¹⁵⁵

Terhadap tindakan Partai Murba tersebut, Aidit menjadi emosi dan melakukan gerakan politik untuk menjatuhkan Murba seperti strategi menjatuhkan BPS. Sehingga tanggal 17 Desember 1964, lima hari sesudah Deklarasi Bogor, BPS dibubarkan. Kemudian menyusul pada tanggal 6 Januari 1965 semua kegiatan politik Murba dibekukan (21 September 1965 Murba dibubarkan). Tidak cukup sampai disitu, Pada tanggal 23 Pebruari Presiden memerintahkan Menteri Achmadi melarang semua surat kabar yang berbau BPS. Hasilnya, 21 surat kabar dibrendel dan tinggal dua surat kabar yang sungguh-sungguh anti komunis yaitu Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata. Kedua surat kabar ini dilindungi Angkatan Bersenjata. Namun Komunis tetap menang dalam jumlah surat kabar karena mereka memiliki 78 surat kabar.¹⁵⁶ Sebagai alat propaganda politik mereka.

Selain itu, sejak dibangunnya kembali Partai Komunis Indonesia pada tahun 1950, agen-agen khusus memelihara hubungan baik dengan tentara. Komisaris Kesatuan (CK), khusus ditetapkan untuk setiap kesatuan berusaha mengadakan hubungan dengan perwira-perwira yang berhaluan kiri. Group yang terdiri dari lima sampai tujuh orang anggota mempengaruhi bawahan. Seorang Koordinator, yang langsung dibawah Central Comite Partai Komunis Indonesia, memimpin beberapa komisaris dan group yang tidak saling mengenal. Perwira-perwira yang dihubungi terbatas pergaulannya pada pembina dan koordinatornya. Untuk

¹⁵⁵ *Dari Madiun ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya ke...*, op.cit, hlm.76.

¹⁵⁶ *Ibid.*

menjaga kebocoran dan menghindari kecurigaan, mereka tidak mengadakan hubungan langsung dengan Partai Komunis Indonesia. Dengan jalan seperti itu, semua perwira yang tersangkut dalam Gerakan 30 September itu sebelumnya dibujuk, agar dapat diperalat demi kepentingan politik partai, misalnya Letkol Untung, Kolonel Latif, Brigjen Soepardjo.

D. Terbentuknya Biro Khusus Partai Komunis Indonesia

Pembubaran BPS, Manikebu dan Partai Murba merupakan sukses besar bagi gerak langkah politik Partai Komunis Indonesia untuk semakin mendekati kemenangan sesungguhnya, yaitu penguasa tunggal partai. Dalam sambutan tertulis pada sidang pleno ke-IV Dewan Pusat Serikat Buruh Keamanan dan Pertahanan (SKBP), Aidit menjelaskan antara lain:

“Sidang Pleno ke-IV DPSKBP dilaksanakan tepat pada keadaan tanah air kita sedang dalam situasi revolusioner yang terus menanjak dan matang. Massa rakyat sudah tidak suka pada keadaan sekarang, haus akan adanya perubahan dan sedang berjuang keras untuk adanya perubahan yang memperbaiki penghidupan mereka”.¹⁵⁷

Lebih lanjut Aidit mengatakan bahwa:

”Adalah pada tempatnya apabila saya di sini menyerukan kepada saudara-saudara dan kawan-kawan untuk memperhebat offensif revolusioner dalam situasi revolusioner sekarang ini”.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm.77.

Dalam laporan politik yang disodorkan Aidit di depan sidang Pleno Partai Komunis Indonesia yang ke-IV diakhiri dengan pernyataan:

“...Kita semua sudah bertekad bulat untuk melancarkan lebih hebat offensif revolusioner di segala bidang dengan semangat yang tinggi, semangat banteng merah, semangat maju terus, semangat pantang mundur, semangat bait sajak Banda Harahap: “Tak seorang berniat pulang, walau mati menanti!”...”

Partai Komunis Indonesia semakin menyadari bahwa posisinya dalam konstelasi politik dalam negeri semakin terjepit. Sehingga perlu suatu strategi yang lebih mantap untuk tetap menjaga eksistensi mereka dalam kancah perpolitikan nasional dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan tunggal. Untuk itu dalam setiap kongres nasional Partai Komunis Indonesia, Aidit selalu berpidato sebagai upaya menyemangati dan memberitahu kepada massa partai, kemana partai akan dibawa.

Sebagai pimpinan partai yang progresif, Aidit menyadari bahwa kedudukan mereka menjadi perhatian serius TNI terutama Angkatan Darat yang menjadi musuh besar mereka. Untuk itu Aidit mengaplikasikan setiap pidatonya yang mendorong partai untuk bersikap offensif terhadap segala kemungkinan yang akan menyerang keberadaan mereka. Dikuatirkan nantinya Partai Komunis Indonesia tidak mendapat tempat lagi untuk yang kesekian kalinya di kancah perpolitikan nasional dan cita-cita mereka untuk menuju masyarakat sosialis bisa menjadi buyar. Maka tindakan offensif-lah sebagai pilihan tepat Partai Komunis Indonesia untuk semakin mendekati partai berhaluan komunis ini ke puncak kekuasaan tunggal.

Setelah melakukan taktik front persatuan, bekerja-sama atau yang lebih populer menggunakan istilah gotong-royong dengan partai lain dan pemerintah. Selanjutnya Partai Komunis Indonesia mulai menunjukkan taringnya karena sayap-sayap kekuasaan sudah mereka kembangkan. Jadi tinggal selangkah lagi partai ini bisa menguasai penuh dunia perpolitikan dan pemerintahan Indonesia. Hanya saja ada batu besar yang masih menghalangi mereka yaitu TNI khususnya Angkatan Darat, yang setiap saat siap untuk menghancurkan eksistensi mereka untuk kesekian kalinya. Tinggal bagaimana Partai Komunis Indonesia menyusun strategi politik agar TNI bisa mereka kuasai dengan cara lebih elegan.

Target politik Partai Komunis Indonesia adalah menguasai Indonesia dalam berbagai bidang dalam upaya menuju masyarakat sosialis sebagai tujuan utama faham komunis dunia. Langkah pertama dengan jalan merebut kekuasaan dari pemerintah berikut TNI karena partai politik seperti PNI dan lainnya sudah kalah bersaing. Strategi berikutnya Partai Komunis Indonesia merencanakan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP).¹⁵⁸

Teori MKTBP ini belajar dari pengalaman perjuangan bersenjata di Tiongkok. Negeri ini dalam melakukan perjuangan menggunakan tiga bentuk perjuangan tersebut, tetapi dengan masing-masing tujuan. Di Tiongkok menggunakan titik berat perjuangan kaum tani bersenjata dibawah PKC (Partai Komunis Cina) yaitu perjuangan di pedesaan; desa mengepung kota, dengan titik berat perjuangan bersenjata di pedesaan. Dimunculkannya teori MKTBP untuk menolak arti pokok dari perjuangan gerilya, mencapai kemenangan revolusi dan

¹⁵⁸*Ibid.*, hal.93., lihat juga Set.neg, *op.cit.*, hlm.37., Admadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hlm.131.

membuka jalan lebar bagi perjuangan damai parlementer. Disamping itu untuk “menenangkan hati” para bekas perjuangan bersenjata para anggota partai yang merasa tidak simpatik dengan jalan damai parlementer yang ditempuh oleh pimpinan partai.¹⁵⁹

Di Indonesia aplikasi dari MKTBP isinya antara lain:

1. Di desa mempersiapkan basis untuk perang gerilya.
2. Di kota menggerakkan buruh dan khususnya mengontrol bidang pengangkutan,
3. Dalam Angkatan Bersenjata mencari simpatisan.

Sebagai partai yang berideologi komunis, maka langkah perjuangan yang mereka gunakan-pun menyesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh Lenin yang juga seorang komunis:

“...Kegiatan komunis, harus dilakukan dengan dua jalan. Pertama, kaum pekerja harus membentuk organisasi-organisasi buruh dengan tujuan-tujuan ekonomi sebagai pokok. Organisasi yang bekerja secara terbuka, sah, dan sedapat mungkin secara umum. Berdampingan dengan organisasi-organisasi semacam itu, harus ada perkumpulan-perkumpulan kecil kaum revolusioner profesional yang diatur menurut organisasi tentara dan polisi, yang paling terpilih dan seluruhnya dirahasiakan...”¹⁶⁰

Untuk merealisasi organisasi tanpa bentuk tersebut maka, pada bulan November 1964, Aidit mendirikan Biro Khusus yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Biro Khusus adalah organ Partai Komunis Indonesia yang dirahasiakan. Dasar pembentukannya adalah sidang pleno Central Komite Partai

¹⁵⁹ Imam Soedjono, *op.cit.*, hlm. 270-271.

¹⁶⁰ William Ebenstein, dkk., *op.cit.*, hal.24.

Komunis Indonesia pada akhir juli 1956.¹⁶¹ Ketua biro itu semula adalah Suhadi alias karto,¹⁶² namun setelah dia meninggal maka digantikan oleh Kamarusaman bin Achmad Mubaidah alias Djimin alias Karman, alias Sjamsudin alias Ali Muchtar alias Ali Sastra atau lebih dikenal dengan nama Sjam Kamaruzzaman.¹⁶³ Jaringan intelijen Partai Komunis Indonesia ini mempunyai hubungan langsung dengan Aidit selaku ketua Politbiro Partai Komunis Indonesia. Tugas Sjam, pertama mengumpulkan info untuk diolah dan diserahkan kepada Aidit. Kedua, membangun sel-sel Partai Komunis Indonesia di tubuh ABRI (sekarang TNI) dan membinanya. Tugas Sjam yang lain mengadakan evaluasi dan melaksanakan tugas-tugas yang tidak mungkin dilakukan alat-alat formal Partai Komunis Indonesia. Biro Khusus sebagai badan intelijen pusat partai mempunyai aparatnya sendiri yang tidak diketahui oleh pimpinan formal partai. Ia memberikan laporan, mengolah informasi dan menyampaikan kepada Aidit secara langsung. Oleh Aidit kemudian bahan-bahan dan keputusan disodorkan pada Politbiro untuk disetujui dan dilaksanakan.¹⁶⁴ Pembentukan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia tidak terlepas dari kebijakan D.N. Aidit sebagai ketua partai yang begitu ambisius untuk berkuasa. Walaupun Partai Komunis Indonesia bisa maju dengan menempuh jalan damai, hal itu tidak membuat D.N. Aidit cukup puas, sehingga kecenderungan otoriter dalam memimpin partai, menjadikan Partai Komunis Indonesia yang

¹⁶¹ LSIK, *op.cit.*, hlm.40.

¹⁶² *Ibid*, hlm.42.

¹⁶³ *Dari Madiun ke Lubang Buaya Dari Lubang Buaya Ke...*, *op.cit.*, hlm.94., lihat juga, *Gerakan 30 September antara Fakta dan Rekayasa. op.cit.*, hlm 31., lihat juga, LSIK, *ibid.*, lihat juga, *Majalah Tempo, op.cit.*, hlm.74.

¹⁶⁴ Harsutejo, *op.cit.*, hlm.171-172.

dikenal sebagai partai proletar terseret dalam feodalisme yang selama mereka berjaya menjadi musuh yang harus dihapus selain kapitalisme birokrat.

Pembentukan organisasi rahasia oleh Aidit ini, persis seperti apa yang pernah dilakukan Sneevliet dan Semaun dulu, dimana kemudian Tan Malaka juga ikut menjadi guru komunis di Semarang. Hanya pada tahun 1960-an, yang dilakukan oleh D.N. Aidit lebih terperinci. Refrensinya adalah R.R. Cina dan Uni Soviet. Dalam tahun 1919, Uni Soviet telah menjelaskan teknik yang harus digunakan oleh partai komunis setempat untuk menggulingkan pemerintah yang sedang berkuasa, sebagai berikut.

“...Perjuangan yang berhasil...memerlukan berdirinya di setiap negeri suatu partai komunis yang kompak, terlatih dalam perjuangan, mempunyai disiplin, dipusatkan, mempunyai hubungan yang rapat dengan massa...Penaklukan suatu pemerintah oleh kaum proletar adalah digulingkannya pemerintah borjuis dengan kekerasan, dihancurkannya...alat-alat negara (tentara, polisi, hierarki birokrasi, kehakiman, parlemen, dan lain-lain) dan digantikan oleh organ-organ baru negara proletar, yang terutama sekali dipergunakan sebagai alat...penindas. Perlu sekali bagi setiap partai komunis untuk secara sistematis menggabungkan pekerjaan yang legal dengan pekerjaan yang tidak legal (ilegal), organisasi yang legal dengan organisasi yang tidak legal (ilegal)... untuk menggerakannya, untuk mempergunakan bentrokan kepentingan (walaupun bersifat sementara) di kalangan musuh, untuk menolak berunding dengan musuh, dan untuk mengadakan kompromi dengan pihak-pihak yang mungkin menjadi sekutu (meskipun sifatnya sementara, tidak tetap, maju mundur, dan tergantung keadaan)...”¹⁶⁵

Walau dalam konstelasi percaturan politik komunis internasional Partai Komunis Indonesia lebih condong ke RRT dan menganggap Uni Soviet sebagai revisionist untuk itu materi yang dipakai Partai Komunis Indonesia dalam

¹⁶⁵ Abdoerraoef, *Komunis Dalam Teori dan Praktek*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 61

mempersiapkan garis serang-pun lebih banyak belajar dari RRT seperti MKTBP. Namun pedoman dasar strategi mereka tetap berkiblat pada Uni Soviet.

Ada beberapa cara yang dipakai partai komunis untuk melakukan ekspansi kekuasaan seperti penyerangan terang-terangan, yang terjadi pada waktu Korea Utara dan Cina Komunis menyerang Korea Selatan. Perebutan kekuasaan di negeri-negeri Eropa Timur, hal ini menunjukkan bagaimana Tentara Merah dipergunakan sebagai ancaman, yang sengaja disiapkan untuk melakukan tindakan apabila situasi politik mengancam. Cara yang ketiga adalah membentuk dan menyokong perang gerilya, yang di dalamnya dilatih pasukan-pasukan setempat dan dipersenjatai oleh negara-negara komunis yang berdekatan, untuk melakukan tindakan terhadap rakyat mereka sendiri bila diperlukan seperti yang dilakukan di Vietnam. Kemudian yang terakhir dengan cara melakukan sabotasi, kekerasan, dan terror yang dilakukan oleh partai komunis setempat.¹⁶⁶

Kenyataan sejarah, D.N. Aidit lebih memilih cara-cara kombinasi dari beberapa alternatif yang disebutkan di atas, dan Sjam setuju melaksanakannya. Mereka tidak mau terlibat dalam pemberontakan secara langsung (*open rebellion*) seperti yang dilakukan oleh Moeso tahun 1948, karena dari segi persenjataan tidak memadai. Karena itu mereka melakukan penyusupan dan membina sejumlah perwira ABRI untuk nantinya dijadikan pion bagi pemberontakan, sehingga timbul kesan bahwa nantinya pelaksanaannya adalah 'orang dalam' ABRI khususnya AD, dan terakhir menciptakan suatu kondisi ekonomi ekonomi-sosial yang memungkinkan Partai Komunis Indonesia memperoleh simpati rakyat.

¹⁶⁶ *Ibid.*

BAB III

PERANAN “BIRO KHUSUS” PARTAI KOMUNIS INDONESIA DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965

A. Biro Khusus Partai Komunis Indonesia

Diskusi-diskusi di dalam Biro Politik Partai Komunis Indonesia pada bulan Mei 1965 menunjukkan bahwa tidak ada persiapan untuk mempercepat ofensif revolusioner, untuk melaksanakan strategi baik Peking maupun Moskow, yang secara realistis dapat dilakukan selama kekuatan TNI khususnya Angkatan Darat tidak dihancurkan. Bukan saja Angkatan Darat merupakan penghalang utama bagi upaya-upaya Partai Komunis Indonesia untuk melancarkan ofensif revolusionernya, namun kewaspadaan dan aktivitasnya sejak bulan Januari tahun 1965 tidak memberi langkah baik untuk masa depan partai.

Walau sudah jelas bahwa Angkatan Darat semakin mengukuhkan diri untuk mengimbangi pengaruh Partai Komunis Indonesia terhadap Presiden, namun sangat meyakinkan pula bahwa Angkatan Darat adalah kubu pertahanan terhadap kekuatan-kekuatan anti rakyat di Indonesia. Angkatan Darat berusaha membendung Partai Komunis Indonesia, bahkan mengurangi atau menghilangkan secara keseluruhan pengaruh unsur komunis dari kehidupan publik.

Namun sebelumnya, telah dipikirkan strategi yang harus diterapkan oleh petinggi Partai Komunis Indonesia, bahwa mereka harus memukul Angkatan Darat untuk melumpuhkan komando puncaknya agar dapat membuka jalan

menuju kekuasaan, baik dengan menggunakan konsep Moskow maupun konsep Peking, yaitu jalan damai atau jalan revolusioner menuju kekuasaan.¹⁶⁷

Meskipun Angkatan Darat, dan angkatan bersenjata pada umumnya, telah menjadi target penetrasi mata-mata Partai Komunis Indonesia sejak lama, namun baru pada permulaan tahun 1964 partai melakukan upaya serentak untuk mengintensifkannya. Ketika itu D.N. Aidit, sebagai ketua Partai Komunis Indonesia, mendirikan sebuah badan yang dikenal sebagai Biro Khusus atau sering disebut Biro Khusus.

Biro Khusus Partai Komunis Indonesia adalah sebuah organ yang mempunyai samaran yang hebat, serba rahasia (*clandestine*) yang merupakan perwujudan yang kasat-mata sikap militansi baru yang mulai dominan di kalangan pemimpin Partai Komunis Indonesia akhir tahun 1963.¹⁶⁸ Biro Khusus dikepalai oleh anggota rahasia Partai Komunis Indonesia, yakni Sjam beranggotakan Pono dan Waluyo.

Sjam ditugaskan Aidit untuk memimpin biro rahasia tersebut. Biro Khusus merupakan aparat khusus partai yang menangani pekerjaan-pekerjaan khusus, yaitu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan melalui aparat-aparat terbuka yang lain, terutama dibidang militer dan bidang-bidang lainnya yang harus dikerjakan secara *clandestine*(bawah tanah).¹⁶⁹ Biro khusus pusat adalah aparat khusus ketua Central Komite Partai Komunis Indonesia dalam hal ini D.N. Aidit. Sedangkan

¹⁶⁷ Victor, M. Fic., *op.cit.*, hlm. 61.

¹⁶⁸ Admadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hlm.109.

¹⁶⁹ Center for Information Analysis, *Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa*, *op.cit.*, hlm. 31.

Biro Khusus Daerah adalah cabang-cabang Biro Khusus Pusat. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan di daerah-daerah dan bertanggung jawab kepada Biro Khusus Pusat. Hubungan-hubungan horisontal diantara Biro-Biro Khusus Daerah tidak diperbolehkan, termasuk larangan menggunakan semua fasilitas milik Partai Komunis Indonesia.¹⁷⁰ Artinya hubungan yang dilakukan dengan sesama anggota Biro Khusus dilakukan dengan menggunakan sandi atau bersifat tertutup tujuannya agar tidak diketahui atau dicurigai oleh musuh. Berbeda halnya dengan pengorganisasian Partai Komunis Indonesia secara terbuka, sehingga pengendaliannya sampai ke pelosok-pelosok daerah pun berjalan dengan efektif.

Dalam struktur organisasi Partai Komunis Indonesia di bawah ini, semakin diperjelas bahwa hubungan antara Biro Khusus dengan Politbiro Central Komite partai hanya bersifat koordinasi, itu pun dilakukan dengan sangat rahasia, sehingga sangat wajar bila secara organisatoris formal dan terbuka, Biro Khusus tidak dimasukkan dalam struktur organisasi Partai Komunis Indonesia.

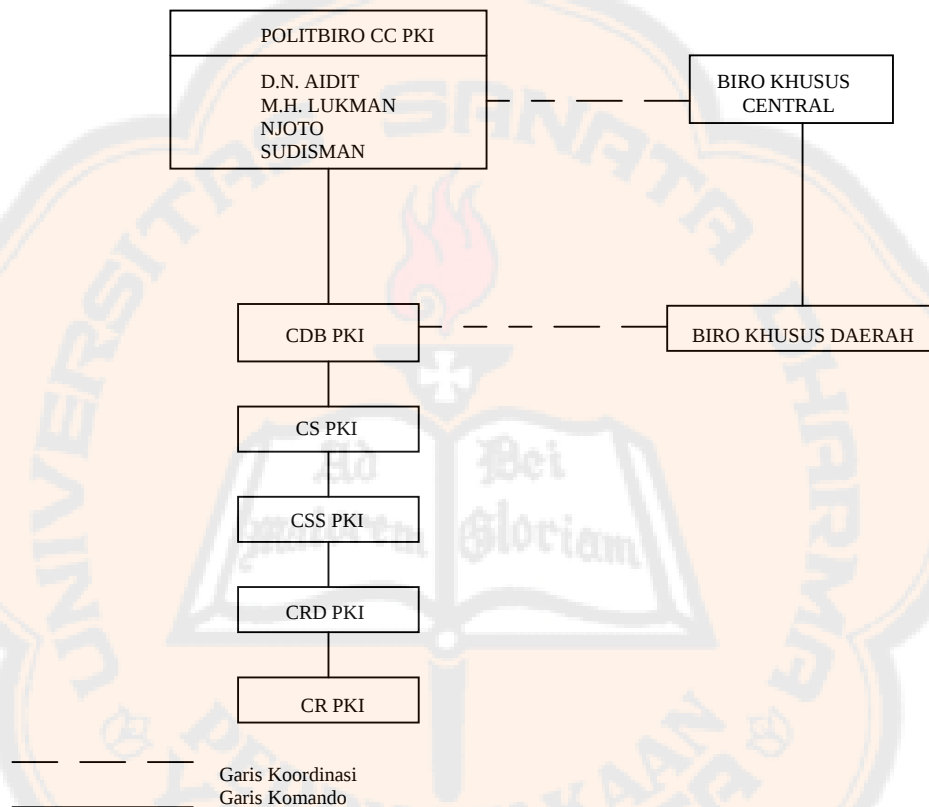
Menurut buku yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan buku putih, dijelaskan bahwa gambaran hubungan antara struktur organisasi formal partai dengan Biro Khusus seperti tampak pada bagan struktur organisasi dibawah ini.¹⁷¹ Garis lurus vertikal ke bawah yang menghubungkan antara Central Komite partai dan Central Daerah Besar partai merupakan garis komando, artinya sistem organisasi partai bersifat sentralistik. Garis putus-putus yang menghubungkan antara Central Komite partai dengan Biro

¹⁷⁰ *Ibid.*, Lihat juga Victor M. Fic., hlm.64.

¹⁷¹ Set.neg., *op.cit.*, hlm.124, lihat juga, LSIK, *op.cit.*, hlm.40.

Khusus merupakan garis koordinasi, baik pada Biro Khusus pusat maupun Biro Khusus Daerah, karena fungsi mereka diluar organisasi resmi partai.

STRUKTUR ORGANISASI PARTAI KOMUNIS INDONESIA



Dalam struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan pula bahwa Central Komite Partai Komunis Indonesia mempunyai akses langsung dengan organ bawah partai yaitu Central Daerah Besar disebut juga tingkat II yang berkedudukan di propinsi, Komite Seksi disebut juga tingkat III yang berkedudukan di kabupaten, Komite Sub Seksi atau tingkat IV berkedudukan di kecamatan, Komite Resort Daerah atau tingkat lima yang berkedudukan di Desa

atau kelurahan serta Komite Resort berkedudukan di tingkat pedukuhan atau dusun yang merupakan tingkat enam.¹⁷²

Berdasarkan struktur organisasi di atas, tugas yang dilakukan oleh setiap komite harus sesuai dengan gerakan partai, diantaranya, mengerahkan massa, merencanakan dan melakukan kongres-kongres, konferensi-konferensi, melakukan peringatan-peringatan hari nasional, serta kampanye dan propaganda untuk kemenangan partai dalam pemilu yang akan datang.

Strategi yang dilakukan Partai Komunis Indonesia bertujuan untuk mengarahkan rakyat di seluruh pelosok tanah air agar memiliki persepsi bahwa Partai Komunis Indonesia adalah partai yang nasionalis dan anti kolonial, bersimpati kepada agama, bertanggung jawab, menentang kekerasan serta membela demokrasi.¹⁷³

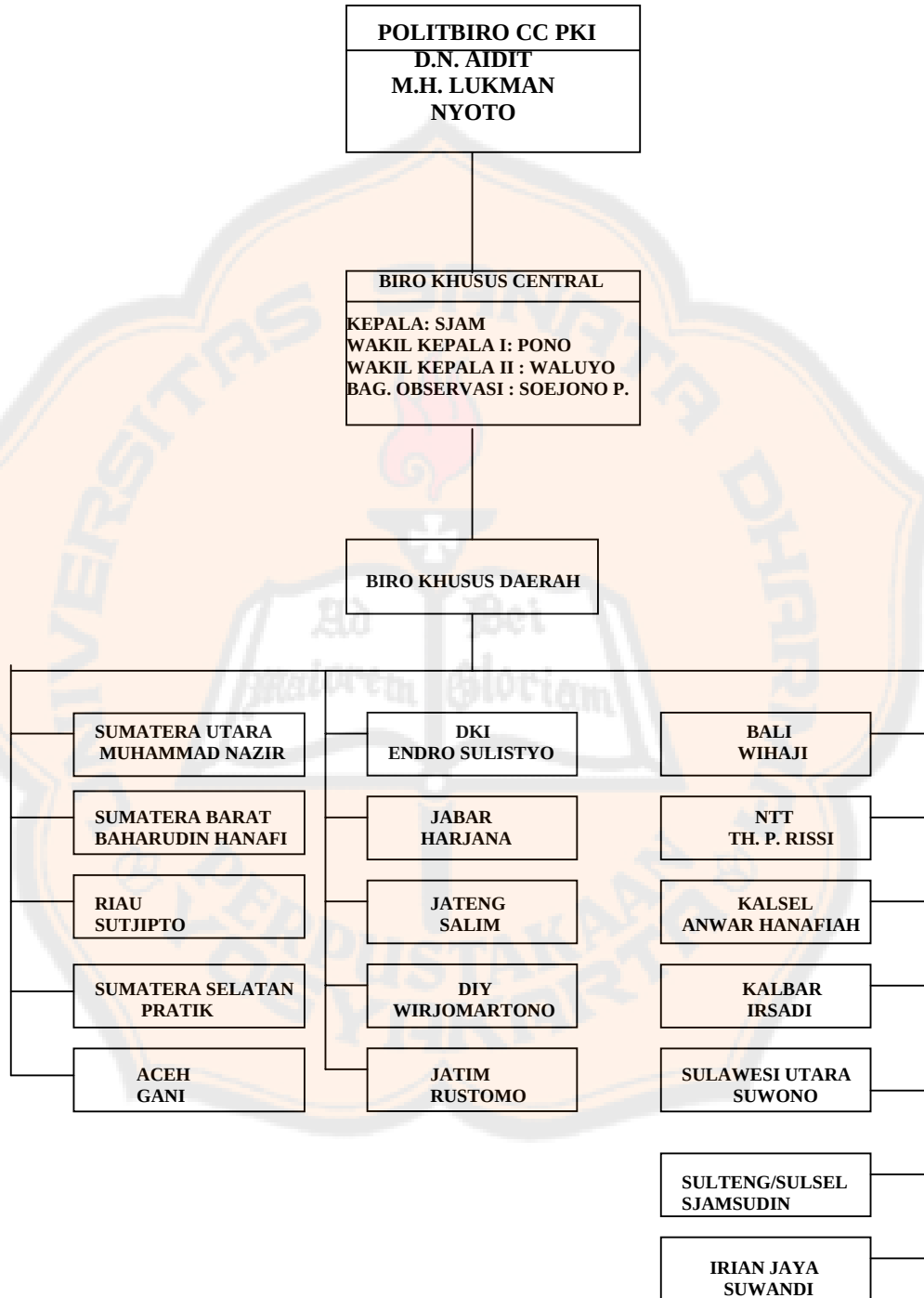
Menurut pengakuan Sjam dalam sidang di Mahkamah Agung, keberadaan organisasi rahasia Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Biro Khusus terbagi atas biro daerah yang terdapat di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Biro Khusus daerah bertanggung jawab langsung kepada Biro Khusus Pusat seperti pada struktur organisasi dibawah ini.¹⁷⁴

¹⁷² *Penghianatan Subversi dari G. 30 S. Matoa*. Jakarta. Tapa tahun terbit. hlm.51., lihat juga, LSIK, *op.cit.*, hlm.40.

¹⁷³ LSIK, *Ibid.*

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 41., lihat juga, Victor M. Fic., *op.cit.*, hlm.63., lihat juga, MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA. Putusan Nomor: PTS-027/MLB-I/K/1968. Perkara KAMARUSAMAN bin AHMAD MUBAIDAM, alias SJAM, DJIMIN, ALI MUCHTAR, ALI SASTRA, SJAMSUDIN dan KARMAN, Jakarta 1968, hlm. 42-43.

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO KHUSUS
PARTAI KOMUNIS INDONESIA**



_____ **Garis Komando**

Biro Khusus itu adalah sebuah organisasi yang besar. Ia memiliki 44 orang anggota tetap yang bekerja di hampir seluruh propinsi di Indonesia, karena telah merekrut kira-kira 700 perwira dari berbagai angkatan bersenjata, untuk memperkuat garis kebijakan partai.

Struktur organisasi Biro Khusus di atas menggambarkan, karena tingkat kerahasiaannya, keberadaan Biro Khusus aksesnya langsung pada ketua Komite Central Partai, Aidit sendirilah yang mengangkat orang-orang kepercayaannya ke dalam Biro Khusus, dan pengendaliannya-pun langsung oleh ketua Komite Central sendiri. Biro Khusus Central atau pusat yang berada pada tingkat Komite Central Partai Komunis Indonesia bertugas mengkoordinasikan Biro Khusus Daerah yang berada pada tingkat Komite Daerah Besar (CDB). Biro Khusus Daerah langsung bertanggung jawab dengan dan senantiasa hanya menerima instruksi dari Biro Khusus Pusat Partai Komunis Indonesia. Hubungan antara Biro Khusus Daerah dengan Central Daerah Besar hanya bersifat tukar- menukar informasi. Dengan demikian garis hubungan organisasi Biro Khusus adalah secara vertikal.¹⁷⁵ Namun tidak seluruh Central Daerah Besar ada Biro Khusus, melainkan hanya di tempat-tempat atau daerah yang terdapat pemusatan unsur-unsur ABRI (sekarang TNI) saja. Selain itu, anggota Biro Khusus ini disusupkan ke dalam partai-partai lain, setelah berhasil menjadi anggota partai lain, anggota Biro Khusus ini berusaha menarik anggota partai yang disusupi untuk masuk jalur Partai Komunis Indonesia, atau minimal bisa memecah-belahkan partai tersebut. Seperti contoh konkret yang terjadi pada PNI, yang menjadi dua kubu yaitu, PNI

¹⁷⁵ Setneg, *op.cit.*, hlm.39.

A-SU dan PNI Osa-Usep yang non komunis, seperti juga terjadi pada PGRI (Persatuan Guru republik Indonesia) terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu PGRI non vaksentral yang condong ke Partai Komunis Indonesia serta PGRI biasa. Hal tersebut juga terjadi pada GMNI, IPPI dan dunia pers serta kantor berita ANTARA yang direbut oleh Djawoto dari Partai Komunis Indonesia.¹⁷⁶

Meski Biro Khusus bukan sebuah badan Partai Komunis Indonesia yang sesuai dengan statuta yang tercantum dalam konstitusinya, menurut Nyono, Politbiro telah menyetujui laporan D.N. Aidit tahun 1964 bahwa ia telah mendirikan Biro Khusus ini untuk membantu melaksanakan tugasnya dalam “masalah-masalah militer”. Ketika memberi izin kepada D.N. Aidit untuk mendirikan Biro Khusus, maka para anggota Politbiro mengemukakan pasal 70 dari konstitusi partai yang menyatakan bahwa “ Jika karena perkembangan situasi, partai tidak mampu untuk berfungsi secara normal, maka bentuk-bentuk organisasi dan metode bekerjanya partai harus ditentukan oleh Komite Sentral, sebuah badan yang terdiri dari 46 orang anggota pada tahun 1965.¹⁷⁷

Menyangkut sumber utama keuangan organisasi tersebut adalah Aidit, yang secara berkala tetapi rahasia “memberikan” sejumlah besar uang di tempat-tempat yang telah ditentukan di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian semua dana ini diinvestasikan untuk memberikan uang masuk yang tetap dalam berbagai usaha dagang: bengkel, reparasi mobil, toko-toko bahan bangunan dan kontraktor, toko-toko yang memasok berbagai barang dari logam, taksi dan angkutan bus, apotek dan usaha lainnya.

¹⁷⁶ LSIK, *op.cit.*, hlm. 41-42.

¹⁷⁷ Victor M. Fic., *op.cit.*, hlm.62.

Biro ini dilarang menggunakan semua fasilitas yang menjadi milik partai, dan pengelolaannya diringkas sampai sekecil mungkin untuk menghindari catatan tertulis yang terlalu banyak. Anggota Biro Khusus itu menerima “iuran” sebagai gaji dan “kompensasi” untuk membayar perumahan, ongkos pengobatan, serta pengeluaran-pengeluaran pribadi yang lain, dan biasanya memiliki sebuah pekerjaan tetap untuk kamuflase saja; mereka juga dilarang berhubungan dalam bentuk apapun dengan anggota partai yang biasa.¹⁷⁸

Kebanyakan dari mereka bekerja dalam lembaga yang berbeda-beda dengan menggunakan nama-nama palsu, beberapa diantaranya dikenal memiliki empat atau lima nama alias, sebagaimana kemudian ditunjukkan oleh notulen pengadilan militer yang mengadili mereka. Untuk memberikan teknik-teknik yang pantas untuk Biro Khusus itu, yaitu teknik yang diperlukan untuk menyusup ke dalam tubuh angkatan bersenjata dan merekrut para perwiranya, dan bertugas sebagai tutor untuk mengindoktrinasi orang-orang yang ditugaskan bagi mereka, maka diadakanlah untuk mereka program pelatihan dan seminar khusus, dimana diajarkan kepada mereka ideologi Marxisme-Leninisme, psikologi, sosiologi, dan mata pelajaran yang lain. Pada saat-saat tertentu, beberapa anggota partai yang lebih tinggi tingkatnya diundang untuk memberikan kuliah, seperti Sujono Pradigdo, seorang kader terkemuka dari komisi verifikasi Partai Komunis Indonesia.¹⁷⁹

Berkaitan dengan penyusupan ke dalam tubuh angkatan bersenjata tugas Biro Khusus adalah:

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm.64.

¹⁷⁹ *Ibid.*

- a. Melakukan pembinaan terhadap sebanyak mungkin anggota ABRI dengan mempengaruhi sikap dan tindakannya agar sesuai dengan ideologi Partai Komunis Indonesia, atau setidaknya mendapatkan simpatinya sehingga sikapnya tidak memusuhi partai.
- b. Mengusahakan perluasan anggota/simpatian dengan mendorong mereka untuk mencari anggota ABRI baru yang bisa dibina atau direkrut sehingga dalam waktu tertentu jaringannya bertambah banyak.
- c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh D.N. Aidit.

Adapun tugas-tugas khusus yang diberikan oleh D.N. Aidit dilaksanakan dengan cara:

1. Penanaman sel-sel. Apabila didapatkan seorang anggota ABRI, maka orang tersebut dididik dan ditingkatkan kesadaran politiknya secara teori dan praktek. Jika sudah dianggap cukup, orang itu kemudian diberi pekerjaan menurut tugas, kemampuan dan kesanggupannya. Dengan demikian anggota ABRI itu telah dianggap sebagai sel partai di tempatnya bekerja.
2. Penanaman simpatian partai. Anggota ABRI yang telah dihubungi tetapi belum bisa ditarik menjadi anggota partai diberi tugas-tugas yang ringan. Anggota demikian biasanya disebut simpatian partai, dan diberi brosur-brosur partai dan diajak berdiskusi mengenai teori-teori elementer Marxisme-Leninisme.
3. Mempertajam perbedaan antara bawahan dan atasan. Antara bawahan dan atasan ada kalanya terdapat perbedaan dalam kondisi sosial ekonominya.

Perbedaan yang ada ini selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan jalan mempertajam dan memperluas rasa perbedaan tersebut.

4. Memanfaatkan hasil-hasil yang diperoleh untuk kepentingan partai. Anggota ABRI yang telah dibina partai bisa dimanfaatkan untuk kepentingan partai, umpamanya, sebagai sumber untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas ABRI atau dalam gerakan mengumpulkan uang untuk konggres.

Berbicara mengenai Biro Khusus Partai Komunis Indonesia tidak terlepas dari peranan Sjam Kamaruzzaman yang sangat fenomenal dan sampai sekarang disebut-sebut sebagai tokoh kunci Gerakan 30 September 1965. Menurut keterangan Suyono Pradigdo, Ketua Komisi Verifikasi Central Komite Partai Komunis Indonesia.¹⁸⁰ Sjam sebagai ketua Biro Khusus Partai Komunis Indonesia, memang belajar menyamar dengan sering mempertebal alis dan kumisnya, agar selalu tampak berbeda dengan jati dirinya yang asli. Sjam pernah belajar perang rakyat dan intelijen di Vietnam Utara, RRC dan Korea Utara. Dalam sepekan terangnya sebagai biro intelijen, Sjam dikenal sangat waspada, licin dan teliti mempelajari taktik lawan. Biro Sjam mempergiat hubungannya dengan para perwira dan bawahan melalui berbagai jalan, mengindoktrinir mereka dengan gagasan komunis serta membangkitkan rasa ketidakpuasan terhadap pimpinan, sehingga tidak heran banyak perwira yang disebut sebagai “perwira yang muda dan maju” terpengaruh oleh Sjam.

¹⁸⁰ Atmadji Sumarkidjo, *op.cit.*, hlm.128., lihat juga, Set.neg. *op.cit.*, hlm. 41.

Adanya doktrin yang berwujud taktik dan teknik tertentu dalam rangka penyusupan ke dalam kesatuan-kesatuan ABRI, mencakup teknik pendekatan dan pembinaan terhadap anggota secara perorangan yang bertempat tinggal atau berdiam di luar asrama. Berdasarkan dokumen mengenai hasil sidang Central Komite Partai Komunis Indonesia ke-IV pada tanggal 28 Agustus 1965, D.N. Aidit selaku pimpinan partai antara lain memberikan penjelasan sebagai berikut:

“...Pengaruh partai di kalangan Angkatan Bersenjata pada umumnya dicerminkan kekuatan partai daerah itu. Jadi pengaruh kita (PKI) di Jawa adalah baik, kecuali Jakarta Raya dan yang terbaik adalah Jawa Tengah. ALRI dan AKRI dapat dinetralisir karena mempunyai persoalan intern masing-masing. AURI memberi fasilitas. Beberapa kekuatan perwira menengah progresif revolusioner sudah sepertiga? Kalau sudah, oke. Sebab pengalaman Coup d’etat seluruh dunia menunjukkan, apabila kekuatan yang mau mengadakan kup itu sudah sepertiga dibandingkan dengan seluruh kekuatan bersenjata yang ada dan gerakan itu disokong oleh massa, kup itu pasti berhasil. Ya, serahkan soal ini kepada Dewan Politbiro.”¹⁸¹

Istilah ‘AURI memberi fasilitas’ sebetulnya menunjukkan bahwa pembinaan anggota AURI lebih berhasil dibandingkan yang dilakukan di matra/angkatan lain. Masuknya Partai Komunis Indonesia ke dalam tubuh organisasi AURI dimulai oleh keberhasilan Rachmat Kusumobroto, seorang anggota Partai Komunis Indonesia yang bekerja di bagian intelijen Kementerian Pertahanan, ia menghubungi dan kemudian berteman dengan Komondor Udara Siswadi, Kepala Bagian Intelijen MBAU. Setahun kemudian Rachmat juga berhasil berkenalan dengan Kolonel Udara Sudiono yang menggantikan Siswadi menjadi orang nomor

¹⁸¹ Pemeriksaan Mahmilub terhadap Nyono, Januari 1966, dalam Atmadji Sumarkidjo, *Ibid.*, hlm. 133.

satu di bagian intelijen AURI. Selanjutnya ketika Letkol Heru Atmodjo menjadi Asisten Direktur Produksi Intelijen AURI, orang ini berhasil dibinanya. Bono-lah yang kemudian meneruskan pembinaan orang-orang AURI.¹⁸² Begitu juga yang dilakukan oleh Anggota Biro Khusus dalam rangka infiltrasi ke dalam tubuh-tubuh organisasi militer dan sipil lainnya. Hal ini menegaskan bahwa sistem sel sebagai suatu strategi pengembangan Partai Komunis Indonesia menjadi jurus yang ampuh dalam menguasai pihak lawan dalam hal ini ABRI (TNI) dan organisasi sipil yang dilakukan oleh Biro Khusus partai.

Menurut pernyataan Sjam di Pengadilan, Biro Khusus telah merekrut orang-orang dari kalangan tentara misalnya: sekitar 40 sampai 50 orang di Jakarta, 80 sampai 100 orang di Jawa Barat, sekitar 250 orang di Jawa Tengah, 200 di Jawa Timur, 30 sampai 40 di Sumatera Utara, dan 30 di Sumatera Barat. Semua anggota tentara yang terlibat dalam Gerakan 30 September direkrut melalui Biro Khusus dan mengikuti perintahnya.¹⁸³ Hal ini tidak mengherankan karena sampai beberapa tahun sesudah Partai Komunis Indonesia dibubarkan, masih saja terjadi proses penangkapan anggota-anggota ABRI yang dianggap menjadi simpatisan partai yang berlogo palu arit itu atau setidaknya pernah direkrut oleh salah seorang anggota Biro Khusus.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Guy J. Pauker dalam Atmadji Sumarkidjo, *Ibid.*, hlm.134.

B. Peranan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia dalam Gerakan 30

September 1965

Pada dasarnya, gerakan ini dirumuskan secara garis besar oleh Politbiro Partai Komunis Indonesia, tetapi *action-plan* langkah-langkahnya diserahkan D.N. Aidit untuk digarap oleh Sjam.¹⁸⁴ Sehingga dalam hal ini Biro Khusus bentukan Aidit yang dikepalai oleh Sjam tersebut diberi keleluasaan untuk menyusun strategi atau skenario rancangan gerakan. Menurut Kolonel Soegondo¹⁸⁵, Sjam dan D.N. Aidit sudah merancang suatu skenario masa depan Partai Komunis Indonesia.

Pertama, bila Presiden Soekarno meninggal dunia mendadak atau karena hal yang lain; apakah PKI masih bisa eksis?. Apakah Partai Komunis Indonesia akan mampu bertahan hidup menjadi semacam sosialis-demokrat. Menurut Sjam, hal itu tidak mungkin; tetapi ia dan D.N. Aidit sepakat bahwa sampai saat itu Partai Komunis Indonesia belum berhasil menjadi semacam *king maker*.¹⁸⁶ Bagaimanapun arsitek sistem politik Indonesia masih di tangan Presiden Soekarno, dan Presiden Soekarno-lah yang menyeimbangkan Partai Komunis Indonesia sehingga mampu setara dengan TNI. Kehebatan Partai Komunis Indonesia sebenarnya karena ada proteksi tidak langsung dari Presiden Soekarno.

Kedua, apakah Partai Komunis Indonesia akan mengulang pemberontakan bersenjata seperti di Madiun pada tahun 1948. Baik D.N. Aidit maupun Sjam sepakat bahwa pemberontakan terbuka seperti yang dilakukan Moeso di Madiun tidak akan dilakukan lagi oleh Partai Komunis Indonesia karena resikonya tinggi.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm.136.

¹⁸⁵ Anggota team Teperpu (Team Pemeriksa Pusat) dalam Atmadji Sumarkidjo, *Ibid.*, hlm. V.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm.136.

Ketiga, apakah Partai Komunis mampu menaikan peringkat dalam politik Indonesia melalui jalur pemilihan umum?. Menurut Sjam, jalur tersebut sebetulnya memungkinkan, dan sukses dalam Pemilu 1955 yang mengangkat Partai Komunis menjadi partai terkuat nomor empat setelah PNI, Masjumi dan NU, membuat partai itu semakin percaya diri. Tetapi jalur itu telah ditutup Soekarno dengan ditundanya pelaksanaan Pemilu sampai waktu yang tidak ditentukan.

Keempat, apakah mereka akan mengambil model Cekoslovakia tahun 1947?. Cara ini adalah dengan infiltrasi ke birokrasi yang ada, kemudian masuk ke departemen-departemen yang penting. Di Ceko, partai mula-mula menguasai departemen dalam negeri, penerangan, pertahanan dan kemudian menguasai seluruh pemerintahan. Menurut Sjam, cara ini juga mula-mula dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, tetapi berhadapan dengan TNI-nya Nasution, cara ini tidak berhasil baik. Penetrasi di kalangan TNI melalui CDB hanya berhasil sedikit sehingga cara Ceko jelas tidak bisa digunakan partai ini.¹⁸⁷

Kelima, Partai Komunis Indonesia harus sabar sehingga keadaan sosial-kemasyarakatan di Indonesia kacau, akibatnya rakyat tidak percaya dengan pemerintahan yang ada. Dalam kondisi demikian, apapun yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia akan diterima oleh masyarakat sebagai suatu yang wajar saja.

Bila melihat kenyataan sejarah, D.N. Aidit memilih cara-cara kombinasi dari beberapa alternatif yang disebutkan di atas, dan Sjam setuju melaksanakannya.

¹⁸⁷ Victor M. Fic. *op.cit.*, hlm. 56., lihat juga Admadji Sumarkidjo. *op.cit.*, hlm. 137.

Mereka tidak mau terlibat dalam pemberontakan secara langsung (*open rebellion*) seperti yang dilakukan oleh Moeso tahun 1948 dahulu; karenanya mereka membina sejumlah perwira TNI untuk nantinya dijadikan pion bagi pemberontakan, sehingga timbul kesan bahwa nantinya para pelaksananya adalah “orang dalam” TNI-AD, dan terakhir menciptakan suatu kondisi ekonomi-sosial yang memungkinkan Partai Komunis Indonesia memperoleh simpati rakyat.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan Politbiro Central Komite Partai Komunis Indonesia tanggal 28 Agustus 1965, yang dihasilkan dalam rapat di markas besar partai di Kramat Raya 81 Jakarta, yang dihadiri oleh D.N. Aidit, Mohamad Hakim Lukman, Sudisman, Sakirman, Anwar Sanusi, Njoto, dan Njono. Peris Pardede dan Suwandi alias Djojo alias Seger, sekretaris CDB untuk Jawa Timur sebagai tamu undangan, telah melakukan langkah-langkah pengorganisasian dan menyusun strategi untuk melakukan gerakan.

Menurut Sudisman, keputusan resmi dibuat “dengan suara bulat”¹⁸⁸:

1. Operasi PKI melawan para jenderal itu harus dilakukan tanpa ditunda lagi;
2. Itu adalah operasi pembersihan pucuk pimpinan AD, yang akan dilaksanakan oleh para perwira progresif-revolusioner sendiri;
3. Pembersihan itu akan menghasilkan sebuah Dewan Revolusi, sebuah otoritas baru tetapi bersifat sementara di negeri ini, yang secepatnya akan membubarkan kabinet Dwi Kora yang sudah ada;

¹⁸⁸ Victor M. Fic., *op.cit.*, hlm.131.

4. Untuk menggantikan struktur lama, Presiden akan menunjuk sebuah kabinet Gotong Royong dengan Aidit sebagai perdana menteri;
5. Sementara Komite Tetap Politbiro, yang terdiri dari D.N. Aidit, M.H. Lukman dan Njoto, akan mengarahkan seluruh operasi itu, pelaksanaan aspek politis dan militernya akan mengikuti garis komando tunggal yang ditempatkan di tangan Aidit;
6. Njono sebagai ketua komite Jakarta Raya PKI, akan mengerahkan kekuatan para-militer cadangan yang terdiri dari 2.000 anggota pemuda rakyat, yang pada waktu itu sedang menjalani latihan militer oleh AURI di Lubang Buaya, yang bisa diperbantukan pada perwira-perwira revolusioner saat menghabisi para jendral.¹⁸⁹

Selain menghasilkan keputusan tersebut, rapat kemudian mendiskusikan aspek-aspek militer, politis dan teknis dari operasi itu, juga persiapan-persiapan untuk operasi-operasi serupa yang akan dilaksanakan di masing-masing propinsi di seluruh negeri. Badan-badan lokal yang bertugas melakukan persiapan untuk menculik komando-komando AD lokal adalah Biro-biro Penghubung Regional. Di bawah pengarahan Sudisman, biro-biro tersebut beroperasi di semua wilayah utama Indonesia, menyampaikan instruksi-instruksi Politbiro dari Jakarta ke CDB Partai Komunis Indonesia. Sudisman pertama-tama mengarahkan pekerjaannya dari sekretariat partai di Kramat Raya dan kemudian dari markas besar darurat partai yang ia dirikan di Kayuawet pada tanggal 25 September, dengan

¹⁸⁹*Ibid.*

memerintahkan anggota-anggota Central Comite ke daerah-daerah khusus untuk mengarahkan operasi-operasi lokal.

Maka, Lukman pergi ke Semarang dan Ir. Sakirman ke Yogyakarta di Jawa Tengah; Rusain ke Palembang Sumatra Selatan, dan Peris Pardede ke Medan di Sumatra Utara. Njoto mengikuti rombongan Dr. Subandrio ke Sumatra pada 28 September, dengan sebuah pesawat terbang yang diparkir di Medan, mungkin dipersiapkan untuk membawa Presiden ke tempat istirahatnya di Cina, setelah menunjuk kabinet Gotong Royong, dengan Aidit sebagai Perdana Menteri. Peristirahatan yang tenang untuk Presiden di Danau Angsa, suatu tempat di Cina, di situ Presiden akan menerima perawatan medis terbaik untuk memulihkan kesehatannya, setelah menempatkan Partai Komunis Indonesia ke pucuk kekuasaan setelah sukses membersihkan pucuk pimpinan AD oleh Untung CS.¹⁹⁰

Sejak akhir Agustus 1965 sampai dengan 29 September 1965 pimpinan kolektif Biro Khusus Central Partai Komunis Indonesia secara maraton mengadakan pertemuan-pertemuan yang kesimpulannya dilaporkan kepada ketua CC PKI agar mendapatkan keputusan dan instruksinya. Sesuai dengan keputusan Politbiro CC PKI, gerakan yang akan dilakukan itu dipimpin oleh ketua CC PKI D.N. Aidit sebagai pimpinan tertinggi gerakan, dan ketua Biro Khusus Central PKI yaitu Sjam sebagai pimpinan pelaksana gerakan, sedangkan Pono sebagai

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm.132.

wakil pimpinan pelaksana gerakan, serta Walujo sebagai pimpinan bagian observasi.¹⁹¹

Instruksi-instruksi pertama dari Central Biro Khusus di Jakarta kepada Biro-Biro Penghubung Regional selesai dikirim tanggal 21 Agustus. Instruksi-instruksi itu antara lain:

1. Menyiagakan badan-badan lokal mengenai bahaya kudeta terhadap Presiden dalam waktu dekat oleh Dewan Jenderal,
2. Mengarahkan partai dan organisasi-organisasi massa untuk memobilisasi anggota-anggota mereka agar siap bertindak jika diperintahkan untuk menggagalkan kudeta tadi,
3. Menunggu sebuah pengumuman lewat Radio Republik Indonesia bahwa kudeta itu telah dihancurkan oleh sebuah dewan revolusi telah ditetapkan di Jakarta.
4. Setelah mendengar isyarat dari Jakarta tindakan-tindakan lokal mereka harus dimulai.

Selanjutnya tanggal 22 Agustus, Sjam, Pono dan Waluyo mengadakan rapat di rumah Sjam dan memutuskan bahwa para pemimpin dari semua Biro Propinsi harus dipanggil ke Jakarta, satu persatu, untuk dibriefing oleh Sjam, dan briefing itu akan dimulai pada pertengahan September. Sesuai dengan rencana, Sjam di rumahnya membriefing Endo Sulistio dari Jakarta Raya; Nazir alias Amin dari

¹⁹¹ Setneg, *op.cit.*, hlm.73.

Sumatra Utara; Burhanudin Hanafi, alias Rivai dari Sumatra Barat; Haryana dari Jawa Barat; Salim dari Jawa Tengah; dan Hasjim dari Jawa Timur.¹⁹²

C. Biro Khusus Sebagai Perencana Gerakan 30 September 1965

Sesudah keputusan resmi secara cepat diambil oleh Politbiro Partai Komunis Indonesia di Jakarta tanggal 28 Agustus untuk menculik para jenderal, instruksi-instruksi yang menyangkut persiapan di daerah-daerah menjadi lebih spesifik. Pada akhir Agustus, Sjam memberi tahu Mohammad Natsir, yang mengepalai Biro Penghubung regional Sumatra Utara, bahwa untuk melawan kudeta para jenderal dan konsekuensi-konsekuensinya yang luas secara nasional, semua Biro Penghubung Regional harus mengorganisir komando-komando kelompok lokal dan dewan-dewan revolusi provinsi.¹⁹³

Sementara semua persiapan harus dibuat di muka dan secara diam-diam, kedua lembaga itu baru boleh bertindak setelah mendengar lewat radio bahwa suatu Dewan Revolusi telah dibentuk di Jakarta. Komando-komando kelompok itu yang terdiri dari para perwira progresif, akan membersihkan komando-komando AD lokal dan menghilangkan dari mereka semua elemen anti-komunis. Dewan-dewan Revolusi propinsi kemudian akan membubarkan struktur-struktur pemerintahan yang ada yang berfungsi di semua tingkat, dan mengambil alih kendali atas pemerintahan propinsi, kota, dan kabupaten. Pemerintahan rakyat

¹⁹² Victor M. Fic., *op.cit.*, hlm.132.

¹⁹³ Sidang Mahmillub, Sidang kedua di Medan, 6 Oktober 1966, Radio Jakarta, Siaran Dalam Negeri, 7 Oktober 1966, 12.18 GMT dalam Victor M. Fic, *Ibid.*, hlm. 133.

yang terbentuk di seluruh Indonesia akan membuka jalan Demokrasi Rakyat dan sosialisme.¹⁹⁴

Persiapan-persiapan paling intensif, untuk menciptakan perkembangan itu, dilakukan di Jawa Tengah, Rewang sebagai anggota Central Komite PKI, memimpin persiapan-persiapan itu, sementara itu Dahlan Ravi, anggota Central Sekretariat bekerja di Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah dua kubu terkuat Partai Komunis Indonesia. Pekerjaan yang sangat intensif dilakukan di Sumatera Utara, Tengah dan Selatan, dimana kehadiran elemen-elemen anti-komunis dalam AD secara tradisional kuat, untuk mencegah tidak hanya kemungkinan mereka menggagalkan perebutan kekuasaan lokal, tetapi juga yang terpenting kemungkinan intervensi bersenjata oleh mereka dalam operasi-operasi yang dilakukan oleh PKI di Jakarta. Sedangkan di Jawa Barat, Mayjen Rukman menjanjikan pada Sjam di Bandung pada 25 Agustus untuk menetralkan Divisi Siliwangi, dan kekuatan-kekuatan lain yang ditempatkan di sana.

Partai Komunis Indonesia mulai meletakkan pondasi bagi pembentukan Dewan-dewan Revolusi propinsi, Sjam dan perwira-perwira progresif di Jakarta mengirim operator-operator mereka sendiri dalam angkatan bersenjata ke masing-masing propinsi untuk mendirikan Komando-komando Kelompok sehingga pembersihan para perwira AD lokal bisa dilakukan oleh personil AD lokal, tanpa keterlibatan langsung anggota-anggota Partai. Dengan demikian akhir September 1965 sebuah jaringan kelompok-kelompok persekongkolan militer dan politis tersebar di seluruh Indonesia. Semua dibentuk oleh Biro Khusus yang menunggu

¹⁹⁴ *Ibid.*

pengumuman lewat radio nasional, bahwa sebuah Dewan Revolusi telah dibentuk di Jakarta, untuk merampas kendali atas pemerintahan lokal semua tingkat.

Untuk mengantisipasi perimbangan kekuatan di beberapa daerah, dengan melanggar prosedur kerahasiaan sendiri, Biro Khusus mengeluarkan memorandum tertulis kepada semua organisasi regionalnya pada 28 September 1965, yang menginstruksikan pada mereka apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi pada saat yang sama menginstruksikan mereka agar membakar teks itu secepatnya setelah dibaca. Memorandum itu juga menginstruksikan para pemimpin partai untuk berpura-pura secara sukarela membubarkan organisasi, menyerah di hadapan orang-orang reaksioner, dan menandatangani (bila perlu dengan darah) pernyataan apapun yang mereka tuntutan, tetapi menyembunyikan senjata-senjata dan menunggu kedatangan pasukan-pasukan bersahabat yang akan membebaskan mereka. Pasukan-pasukan pembebas itu harus diberi akomodasi dengan benar, ditunjukkan tempat-tempat penyimpanan senjata, dan diberi daftar nama musuh-musuh yang harus dienyahkan.¹⁹⁵

Meskipun begitu Partai Komunis Indonesia tidak memiliki rencana ofensif alternatif, seperti yang disampaikan Aidit bahwa itu tidak perlu, mereka hanya mengeluarkan PLAN K* pada tanggal 25 September 1965, seperangkat instruksi lisan untuk operasi-operasi defensif dan penyelamatan jika terjadi kegagalan, yang kemungkinan kecil dari tahap-tahap awal dari upaya merampas kekuasaan itu secara lokal. Rencana itu menuntut kampanye secara kilat humas intensif untuk

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

* Istilah yang dipakai Aidit dalam Dokumen No.2:Program K” dalam Victor M. Fic, *ibid.*

mencap GESTAPU sebagai masalah “intern Angkatan Darat”, usaha dengan cepat melepaskan partai dari masalah ini di semua tingkatan, berdiri dengan teguh di samping Presiden dengan segala pengorbanan dan bekerja dengannya untuk mencapai penyelesaian politik bagi masalah-masalah berikutnya, dan menjauhkan partai dari anggota-anggota yang tertangkap basah dalam masalah itu, dengan menuduh mereka melakukan aktivitas-aktivitas tanpa otorisasi untuk melindungi legalitas dan ketidak-bersalahan partai.

D. Langkah-langkah yang dilakukan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia menjelang Gerakan 30 September 1965

Berdasarkan instruksi Ketua Central Komite Partai Komunis Indonesia D.N. Aidit kepada Sjam sebagai pimpinan pelaksana gerakan, maka berturut-turut sejak tanggal 6 September 1965 diadakan rapat-rapat yang dihadiri oleh pimpinan Biro Khusus dan anggota ABRI yang telah dibina.¹⁹⁶ Sjam menemui masing-masing anggota militer dari “Komando Pembersihan” itu secara terpisah untuk menjelaskan hal mengenai bagaimana operasi itu akan dilaksanakan. Kemudian Sjam juga mengevaluasi masing-masing secara pribadi apakah cocok untuk tugas itu dan kemudian mengundang mereka untuk merencanakan aspek-aspek teknis militernya, dengan membuka rapat gabungan pertama di rumah Wahudi tanggal 6 September 1965. Antara tanggal itu dengan D-Day 1 Oktober 1965, para konspirator itu bertemu sepuluh kali untuk menyempurnakan secara rinci teknis militer dari rencana besar yang telah disetujui Politbiro pada tanggal 26 Agustus

¹⁹⁶ Setneg, *op.cit.*, hlm.73.

itu, dan disampaikan kepada Sjam oleh Aidit pada malam hari itu.¹⁹⁷ Adapun rapat-rapat tersebut sebagai berikut:

1. Rapat Pertama 6 September 1965

Rapat gabungan pertama diselenggarakan di rumah Wahjudi, jalan Sindanglaja, Jakarta, pukul 8 malam. Dihadiri oleh Sjam, Pono, Letkol Infanteri Untung, Kolonel Infanteri A. Latief, Mayor Udara Sujono, Mayor Infanteri Agus Sigit dan Kapten Artileri Wahjudi. Dalam rapat tersebut Sjam menjelaskan situasi yang ada dengan jalan mengulangi argumen yang telah ia terima dari Aidit: Sakitnya Presiden, rencana Dewan Jenderal untuk melakukan kudeta tanggal 5 Oktober 1965 untuk menggulingkan Presiden Soekarno, perlunya tindakan pre-emptive untuk menggagalkannya, yang akan diorganisir dan dipimpin oleh orang-orang yang dikumpulkan itu. Sjam kemudian meminta kepada masing-masing yang hadir untuk memikirkan analisisnya mengenai situasi tersebut, dan minta agar mereka siap tampil ke depan pada rapat berikutnya sambil membawa komentar-komentar dan saran-saran mengenai alur tindakan yang telah direncanakan itu. Peserta rapat mengiyakan saja apa yang disampaikan oleh Sjam, tanpa menanyakan bukti yang menyangkut keberadaan Dewan Jenderal dan rencana mereka.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Victor. M.Fic. *op.cit.*, hlm.136

¹⁹⁸ Berdasarkan kesaksian Sjam dalam Pengadilan Perkara Sjam Bulan Februari 1968, dalam Victor M. Fic.*op.cit.*, hlm. 137., lihat juga Setneg, *opcit.*, hlm 73., lihat juga www.sejarahtni.mil.id.

2. Rapat Kedua 9 September 1965

Dilaksanakan di rumah Wahjudi dan dihadiri oleh Sjam, Pono, Untung, Latief, Sujono, Sigit dan Wahjudi. Sjam membuka rapat dengan menanyakan pandangan mereka yang hadir mengenai keputusan-keputusan dari rapat pertama, dan ketika semua menyepakati keputusan-keputusan itu, ia mengarahkan diskusi untuk mengevaluasi kekuatan-kekuatan yang bisa digunakan dalam operasi. Sehubungan dengan hal ini, Latief dan Sujono menyarankan agar operasi itu dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan yang bersahabat di Jakarta, misalnya 4 kompi Brimob, 2 kompi Brigade Infanteri, dan 3 kompi Tjakrabirawa.

Rapat memutuskan bahwa suatu evaluasi akan dilakukan mengenai sesuainya pasukan-pasukan yang diusulkan untuk melaksanakan tugas itu, dan calon-calon lain akan dipertimbangkan. Akan dibuat juga suatu penilaian mengenai pasukan-pasukan yang diperkirakan akan menentang serangan mereka. Diskusi ditutup dengan sebuah catatan bahwa pada rapat berikutnya dari kelompok itu akan dibuat suatu evaluasi mengenai perimbangan kekuatan pasukan-pasukan itu, yang akan saling berhadapan satu sama lain dalam konfrontasi yang mungkin tak terelakan.¹⁹⁹

3. Rapat Ketiga 13 September 1965

Dihadiri oleh orang-orang yang sama, dilaksanakan di rumah Kolonel Latief di jalan Tjawang, Jatinegara, Jakarta. Setelah mengulas keputusan dari dua rapat

¹⁹⁹ Setneg, *Ibid.*, hlm. 74., lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*, hlm.138.

terdahulu, mereka yang hadir tersebut membuat penilaian positif pada pasukan Tjakrabirawa, yang akan digerakan di bawah komando Untung, batalyon yang ada di bawah komando Sigit, dan unit Artileri. Organisasi pasukan pemukul ini, dan rincian-rincian pengerahannya, akan diputuskan dalam rapat berikutnya.²⁰⁰

4. Rapat Keempat 15 September 1965

Diselenggarakan di rumah Kolonel inf. A. Latief, dihadiri oleh orang-orang yang sama kecuali Sigit. Mengingat ketidakhadirannya menimbulkan keraguan mengenai partisipasi pasukannya dalam operasi itu, Sjam mengamankan janji-janji dari Untung, Sujono dan Latief bahwa pasukan mereka harus betul-betul bisa diandalkan untuk ikut ambil bagian dalam operasi. Sehubungan dengan itu Latief mengajukan diri untuk menemui Sigit guna memastikan bahwa ia dan pasukannya akan siap sedia. Sementara Wahjudi memperingatkan hadirin bahwa sampai sejauh itu ia belum bisa mengkonfirmasi partisipasi pasukannya sendiri, ia memastikan pada Sjam bahwa ia sendiri mempunyai komitmen pada aksi itu dan akan bekerjasama dalam realisasinya dengan segala cara yang mungkin.

Sjam memberitahu yang hadir bahwa dua batalyon dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tak lama lagi akan tiba di Jakarta untuk ambil bagian dalam perayaan hari Angkatan Bersenjata yang akan diselenggarakan pada 5 Oktober 1965. Laporan-laporan awal mengisyaratkan bahwa pasukan mereka bisa diandalkan untuk memberikan dukungan bersenjata pada serangan pre-emptive untuk menculik para

²⁰⁰ Setneg, *Ibid.*, lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*

jenderal, kata Sjam, sambil berjanji akan memberikan informasi lebih lanjut pada waktunya nanti.²⁰¹

5. Rapat Kelima 17 September 1965

Semua anggota “Komando Pembersihan”, berkumpul lagi di rumah Latief. Diskusi kembali terfokus pada ketersediaan pasukan-pasukan yang bisa diandalkan untuk serangan itu, karena hal ini tergantung pada orientasi ideologis perwira-perwira komandan mereka dan pengaruh mereka terhadap anak buah. Menurut evaluasi terakhir, sebagaimana dilaporkan oleh Untung, kesatuan-kesatuan berikut ini akan berpartisipasi dalam operasi itu:

- a) Satu kompi di bawah Untung;
- b) Satu batalyon di bawah Latief;
- c) Satu kompi di bawah Wahjudi;
- d) Sekitar 800 sampai 1.000 sukarelawan yang dilatih di Pondok Gede di bawah Mayor Udara Sujono, yang mengatakan bahwa walaupun ia telah melatih sekitar 3.000 sukarelawan sejak September lalu, ia membutuhkan waktu 10 hari lagi untuk membuat pasukan yang terdiri dari 1.000 orang itu betul-betul siap tempur;
- e) Batalyon 454 dari Divisi Diponegoro Jawa Tengah;
- f) Batalyon 530 dari Divisi Brawijaya Jawa Timur.

Penempatan pasukan-pasukan tersebut dibahas pada rapat berikutnya. Untung bersikeras bahwa harus diupayakan untuk mendapatkan sebuah kesatuan kavaleri yang terdiri dari sekitar 30 tank dan kendaraan lapis baja lain dari Divisi

²⁰¹ Setneg, *Ibid.*, lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*

Siliwangi, yang disiapkan di Bandung, untuk mendukung serangan itu. Ini akan secara substansial memperkuat daya gempur pasukan pemukul itu, khususnya jika terjadi komplikasi-komplikasi yang bisa menggagalkan operasi, dan untuk menekan perlawanan, karena alasan ini, tank-tank ini akan menjadi cadangan strategis untuk seluruh operasi.²⁰²

6. Rapat Keenam 19 September 1965

Dilaksanakan di rumah Sjam, di jalan Salemba Tengah, Jakarta, rapat tersebut dihadiri oleh semua kecuali Sigit karena sakit. Pertemuan tersebut membahas mengenai logistik yang mendukung Batalyon pengamanan yaitu 454 dan 530 dalam aksi itu. Dalam hal ini Sjam menjelaskan bahwa segera sesudah diketahui perayaan hari angkatan bersenjata yang ditunjuk lebih awal oleh Presiden untuk merencanakan dan kemudian mengorganisir perayaan pada 5 Oktober, telah mengundang kedua batalyon ke Jakarta mewakili divisi-divisi mereka, Sjam mengontak Salim dan Hasim, kepala Biro Khusus di Jawa Tengah dan Jawa Timur, untuk mendapatkan penilaian mereka mengenai kesetiaan para perwira berikut anak buahnya itu. Kontak-kontak itu ganti melaporkan bahwa kedua batalyon itu punya sejumlah perwira progresif yang berpengaruh besar terhadap anak buah, sesudah merekrut mereka untuk melaksanakan aksi itu, dan merekomendasikan agar mereka dikontak secepatnya setelah tiba di Jakarta. Untuk membedakan kawan dan lawan, demikian lapor Sjam, dan memfasilitasi kontak yang aman dengan Sjam di Jakarta, Salim dan Hasim menggunakan

²⁰² Setneg, *Ibid.*, hlm.75., lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*, hlm.139.

metode identifikasi gaya lama namun bisa diandalkan. Mereka menyobek beberapa potong kertas dalam bentuk tertentu, menyerahkan sebagian kepada para komandan progresif, dan sobekan yang lain diberi kepada Sjam melalui saluran biro. Setelah itu Sjam memberikan sobekan itu kepada Untung, yang menyatukan potongan-potongan itu untuk identifikasi diri para perwira-perwira yang akan datang sebagai kontak yang benar ketika mendekati mereka di barak-barak di Jakarta untuk memberikan instruksi-instruksi mengenai peranan mereka dalam operasi itu.

Rapat kemudian menyepakati pembagian tanggung jawab yang terkait operasi pre-emptive untuk menculik para jenderal : 1) aksi-aksi politik akan diarahkan oleh Sjam dan Pono; 2) Untung dan Latief akan memimpin aksi militer, pasukan mereka akan dipecah menjadi unit pemukul, teritorial, dan cadangan, dan yang disebutkan terakhir yang menyediakan pelayanan komunikasi, transportasi dan dukungan lain. Bono akan mengarahkan operasi intelijen dan pengamatan.²⁰³

7. Rapat Ketujuh 22 September 1965

Dilaksanakan di rumah Sjam pukul 20.00 Sigit dan Wahjudi tidak hadir. Waktu rapat tersebut sandi-sandi dari Mahabharata pada masing-masing gugus tugas. Pasukan pemukul (Pasopati) akan dipimpin oleh Letnan Infanteri Dul Arief, tetapi dibawah komando Latief. Pasukan teritorial (Bhimasakti), akan dipimpin Kapten Infanteri Suradi, tetapi dibawah komando umum Latief. Pasukan cadangan (Gatotkaca), akan dipimpin Mayor Udara Gathut Sukrisno, meliputi para

²⁰³ Setneg, *Ibid.*, hlm.75., lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*, hlm.141.

sukarelawan yang dilatih di Pondok Gede oleh Sujono. Jakarta akan dibagi oleh enam sektor militer: utara, tengah, selatan, timur, barat, dan Tanjung Priok.

Rapat kemudian mendiskusikan tugas-tugas operasional dari ketiga kelompok bersenjata tersebut dan memutuskan bahwa Pasopati akan menculik para jenderal dari rumah kediaman mereka, dengan mengantisipasi bahwa kekerasan yang digunakan bisa menimbulkan pertumpahan darah. Bhimasakti (pasukan teritorial) akan mengamankan Istana Presiden, stasiun radio, pusat komunikasi, kantor pos, dan objek-objek vital lainnya di Jakarta. Pasukan Gatotkaca akan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas di Pondok Gede, menyediakan sarana komunikasi dan secara umum bertindak sebagai pasukan cadangan. Pada akhir rapat, Sjam memberikan kuasa kepada Untung untuk mengontak para Komandan Batalyon 454 dan 530 setiba mereka di Jakarta tanggal 25 September, dengan menyerahkan padanya sobekan-sobekan kertas untuk tujuan identifikasi. Sebagaimana direncanakan, Untung mengontak komandan-komandan tersebut pada waktunya, dengan memberikan tugas menyediakan personil untuk pasukan teritorial Bhimasakti dibawah komando Latief, untuk mengamankan istana Presiden dan objek vital lainnya, terutama disekitar lapangan Medan Merdeka.²⁰⁴

8. Rapat Kedelapan 24 September 1965

Rapat ini mengulas mengenai kekuatan sukarelawan yang dilatih Mayor Udara Sujonodi Pondok Gede, setelah mengetahui kekuatan tersebut, disepakati untuk digunakan dalam operasi itu. Sujono diberi tugas menemukan tempat yang sesuai

²⁰⁴ Setneg, *Ibid.*, hlm.76., lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*, hlm.141.

untuk Central Komando atau CENKO. Badan ini akan mengarahkan tahap-tahap awal serangan yang harus ditempatkan dekat dengan pangkalan Udara Halim, yang menjadi pusat dari seluruh operasi.

Sjam menyampaikan briefing mengenai konsekuensi dan perkembangan politik sesudah diamankannya para jenderal. Sjam mengatakan, sesudah para jenderal itu dienyahkan, sebuah lembaga yang disebut Dewan Revolusi akan dibentuk, yang terdiri dari wakil-wakil elemen progresif dalam masyarakat, membubarkan pemerintah Dwikora yang ada, merebut kekuasaan sebagai otoritas tertinggi di Indonesia, dan me-Nasakom-kan semua institusi publik. Harus diingat bahwa Dipa Nusantara Aidit telah meminta Sjam pada pertengahan September untuk mengusulkan kandidat-kandidat yang sesuai untuk keanggotaan dalam Dewan Revolusi. Sjam juga telah memberitahu Pono dan Walujo, untuk mengusulkan agar orang-orang berikut ini akan membentuk: “Dewan Militer”: Untung, Latief, Supardjo, Heru, Omar Dhani, dan Martadinata. Karena dianggap terlalu sempit cakupannya hanya sebatas militer maka diusulkan Aidit menjadi Dewan Revolusi, karena ini akan mencakup semua, bukan hanya militer.²⁰⁵

9. Rapat Kesembilan 26 September 1965

Pukul 21.00, diselenggarakan rapat kesembilan di rumah Sjam. Dihadiri oleh “Komando Pembersih”. Sjam mengusulkan agar Halim dijadikan pangkalan, dari situ seluruh komando operasi akan diarahkan. Dipilihnya Halim, karena tempat yang strategis, dekat dengan Pondok Gede sehingga akses untuk mengeluarkan

²⁰⁵ Setneg, *Ibid.*, hlm.76., lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*, hlm.142.

senjata di gudang AURI luput dari perhatian masyarakat. Rapat menyetujui bahwa CENKO ditempatkan di PENAS, yaitu pusat survei udara yang berlokasi sedikit diluar pintu masuk utama Halim, yang disebut CENKO I, darimana operasi penculikan para jenderal akan diarahkan. Setelah itu pusat akan dipindahkan ke wilayah hunian Pangkalan Udara Halim, yang disebut CENKO II, tepatnya di rumah Sersan AURI Anis Sujatno di komplek perumahan Bintara, yang digunakan sebagai markas besar bagi Sjam, Untung, Supardjo, Latief, dan anggota-anggota lain dari Komando Pembersihan.²⁰⁶

10. Rapat Kesepuluh 29 September 1965

Pukul 21.00 di rumah Sjam dilaksanakan lagi rapat yang kesepuluh. Dihadiri oleh orang-orang yang sama, ditambah Brigjen Supardjo, yang dipanggil Sjam dari Kalimantan sehari sebelumnya. Sjam memperkenalkan Supardjo sebagai jenderal bintang satu yang akan ikut dalam operasi itu dan memimpin sebuah delegasi dari keempat angkatan bersenjata ke Istana untuk menemui Presiden. Supardjo memberitahu Presiden bahwa nyawa Presiden dalam bahaya karena rencana kudeta Dewan Jenderal, bahwa pada saat itu juga dibuat kegiatan tandingan dari para perwira yang loyal, dan demi alasan keamanan, Presiden harus ke Pangkalan Udara Halim dibawah pengawasan Supardjo, jika Presiden menolak maka akan dibawa secara paksa. Sebelum itu juga Supardjo dan Omar Dhani telah menemui Presiden Soekarno di Istana Merdeka, mereka melaporkan bahwa sekelompok perwira yang loyal siap untuk menangkap anggota Dewan Jenderal,

²⁰⁶ Setneg, *Ibid.*, hlm.77., lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*, hlm.143.

dan serangan itu akan dilaksanakan sebentar lagi. Brigjen Supardjo juga akan melaporkan kembali hasil dari penangkapan Dewan Jenderal dan menyelamatkan Presiden ke Halim untuk melindunginya dari aksi-aksi balasan yang tidak dikehendaki dari pengikut Dewan Jenderal.

Dalam rapat ini juga dibahas mengenai rencana pengerahan pasukan Batalyon 454 dan 530, serta kesiapan pasukan cadangan di Pondok Gede. Sjam mengusulkan dan disetujui rapat, bahwa delapan jenderal yang menjadi target gugus tugas Pasopati: Jenderal A.H. Nasution, Menko Hankam/KASAB; Letjen Ahmad Yani, Menteri/Panglima Angkatan Darat; Mayjen S. Parman, Kepala Intelijen Angkatan Darat; Mayjen Suprpto, Mayjen M.T. Harjono, Brigjen D.I. Pandjaitan, Brigjen Sutojo Siswomihardjo, dan Brigjen Ahmad Sukendro.

Nama jenderal itu telah diberikan oleh Aidit kepada Sjam tanggal 20 September 1965, dengan instruksi lebih lanjut bahwa setelah diambil dari rumah masing-masing, mereka dibawa ke Halim. Dalam rapat itu Sjam mengusulkan kepada Aidit agar M. Hatta, Chairul Saleh dan Sukarni juga “diambil”, untuk membangun hubungan politis yang lebih luas diantara mereka dengan para jenderal itu. Tetapi Aidit menolak gagasan tersebut.

Inti dari perintah Aidit kepada Sjam bahwa penangkapan para jenderal itu dilakukan hidup-hidup, lalu semua dibawa ke Pondok Gede, untuk mengorek pengakuan mereka mengenai keberadaan Dewan Jenderal yang rencananya untuk menggulingkan Presiden dan merongrong republik, setelah itu berdasarkan pengakuan-pengakuan yang diperoleh, maka mereka dituduh melakukan penghianatan terhadap negeri sendiri dihadapan pengadilan rakyat. Setelah

diputuskan bersalah maka akan dijatuhi hukuman mati, Pemuda Rakyat akan mengeksekusi mereka, dengan demikian melaksanakan “pengadilan revolusioner” terhadap musuh-musuh rakyat.

Rapat juga mempertimbangkan aspek politis dari operasi itu, kemudian untuk lebih meyakinkan anggotanya maka Sjam menjelaskan akan dibentuk Dewan Revolusi, Aidit tengah menyiapkan daftar anama anggotanya. Dewan Revolusi akan membubarkan Kabinet Dwikora dan bertindak sebagai dewan tertinggi untuk mendesak Presiden untuk menunjuk sebuah pemerintahan koalisi baru yang didasarkan pada NASAKOM, yaitu Kabinet Gotong Royong. Jika Presiden menolak maka ia pun akan dilengserkan.

Menyangkut pasukan-pasukan yang tersedia untuk operasi itu, Sjam memberi perhitungan sebagai berikut: 2.000 personil dari Batalyon 454 dan 530; 1.000 sukarelawan yang dilatih Sujono di Pondok Gede; sekitar 3.000 pasukan dari Brigade Infanteri I dari Garnisun Jakarta; dan barangkali satu unit kendaraan lapis baja yang terdiri dari 30 tank dan kendaraan lain dari Divisi Siliwangi. Pada rapat itu Supardjo juga menawarkan untuk menerbangkan pasukannya dari Kalimantan, namun menurut Sjam itu tidak perlu karena pasukan yang ada sudah cukup. Dengan demikian pasukan yang ikut ambil bagian dalam operasi itu sekitar 7.000 personil dan mungkin akan dibantu pasukan tank.

Pasukan itu dibagi 3 satuan tugas:

1. Kelompok pertama, Batalyon 454 dan 530 (pasukan Bhimasakti) tugasnya mengamankan Istana Presiden, Stasiun Radio, dan Pusat Telekomunikasi yang semuanya terletak di tiga sisi Lapangan Merdeka.

Sisi keempat lapangan itu diduduki oleh Kostrad dengan Garnisun Jakarta didekatnya.

2. Kelompok kedua, Pengawal Istana dari Batalyon I Tjakrabirawa dan beberapa sukarelawan dari Pemuda Rakyat (pasukan Pasopati). Bertugas mengamankan para jenderal. Dipimpin oleh Letnan Dul Arief dan di bawah komando Latief.
3. Kelompok ketiga, (Gatotkaca), terdiri dari unit-unit AURI dan Pemuda Rakyat, pasukan cadangan yang ditempatkan di Pangkalan Udara Halim dan Pondok Gede.

Keseluruh operasi itu diberi sandi TAKARI, harus bertindak secepat kilat untuk mencapai sasaran-sasaran politik dan militer utama dengan kekuatan pasukan yang begitu kecil, Sebab sebagaimana Latief perhitungkan dalam rapat itu, ada sekitar 60.000 pasukan di Jakarta yang bisa dihubungi oleh oleh para jenderal dan dikerahkan untuk meredam gerakan itu. Pasukan tersebut terdiri dari unit Kostrad, Garnisun dan RPKAD yang ditempatkan sekitar 12 mil di luar Jakarta.

Pembahasan terakhir dalam agenda rapat tersebut adalah mengenai D-Day dan H-Hour untuk operasi itu. Atas saran Sjam, jadwal itu ditunda dari 30 September menjadi 1 Oktober. H-Hour ditetapkan pukul 04.00 pagi, sebab pasukan Pasopai yang akan mengamankan para jenderal, membutuhkan waktu tambahan mempersiapkan diri. Tetapi operasi itu tetap dinamakan Gerakan 30 September

(Gestapu), dan puncaknya adalah pembentukan Dewan Revolusi sebagai otoritas politik tertinggi di Indonesia.²⁰⁷

E. Partai Komunis Indonesia ingin Menjatuhkan Presiden dan Merebut Kekuasaannya

Sepuluh kali rapat yang dilaksanakan oleh Biro Khusus Partai Komunis Indonesia tidak pernah dihadiri oleh D.N. Aidit. Rapat yang dihadiri oleh Aidit, yaitu rapat yang dilaksanakan di rumah Sjam diluar sepuluh kali rapat tersebut diatas. Dalam rapat tersebut Aidit muncul untuk yang pertamakalinya sebagai Panglima Komando keseluruhan operasi yang dilaksanakan oleh Partai Komunis Indonesia untuk menghancurkan para jenderal, dalam rapat tersebut hadir juga Kusno sekretaris Aidit dan anggota Biro Khusus Waluyo, sekitar jam 22.00. Aidit datang langsung dari Stadion Senayan, setelah disana mendengar langsung Presiden memberi isyarat rahasia di depan publik kepada Untung cs untuk jalan terus dengan gerakannya dan mengutif Mahabharata tentang dharma, tugas mulia. Karena tahu betul bahwa dalam waktu beberapa jam saja Angkatan Darat akan kehilangan pucuk pimpinan akibat pendongkelan Menko Hankam/KASAB Jenderal Nasution, dan men/Pangad letjen A. Yani, Aidit telah mengundang Mayjen Pranoto Reksosamudro untuk menemuinya di rumah Sjam dan menawarkan posisi Yani padanya, sementara posisi Nasution diberikan pada Untung. Namun yang menjadi permasalahan adalah Untung hanya berpangkat Letnan Kolonel, untuk itu Aidit merancang Keputusan No.2 dari Dewan Revolusi,

²⁰⁷ Setneg, *Ibid.*, hlm.77., lihat juga Victor M.Fic, *Ibid.*, hlm.144.

yang menurunkan pangkat semua perwira yang lebih tinggi dari semua di seluruh jajaran Angkatan Bersenjata Indonesia ke pangkat itu, yang akan disiarkan pada 1 Oktober 1965 ke seluruh negeri.²⁰⁸

Dhani dan Untung telah lama dibina oleh Biro Khusus, untuk itu loyalitas mereka sudah tidak diragukan lagi, untuk diajak bekerjasama mengubah pemerintahan Indonesia menuju Demokrasi Rakyat. Mengenai Presiden, Aidit akan melengserkan dari kursinya, sebagaimana terlihat dari Dekrit No.1 Dewan Revolusi, yang dirancang oleh Aidit dan disetujui oleh Dewan Politbiro, sepenuhnya menghapus nama Soekarno dari skema pemerintahan baru yang akan mereka bentuk.

Berkaitan dengan partai mereka sendiri, partai berharap mengambil oper kekuasaan yang sangat besar dari Presiden, dan meredusir Presiden hanya menjadi tokoh simbolik yang mewakili negara ini. Hal ini dapat dicapai dengan jalan memisahkan Presiden dari jabatan kepala negara dan jabatan perdana menteri, karena kedua jabatan tersebut dirangkap oleh Presiden, dan Partai Komunis akan merampas jabatan perdana menteri dari Presiden, sehingga Presiden tinggal sebagai kepala negara, dan tidak lagi menjadi kepala pemerintahan. Dengan demikian segala urusan pemerintahan sepenuhnya ditangan perdana menteri. Partrai Komunis Indonesia juga memikirkan akan menunjuk Omar Dhani ke kedudukan Presiden yang sudah dilucuti, sementara Aidit akan menduduki jabatan kuat perdana menteri utnuk memimpin pemerintahan baru.

²⁰⁸ Victor M.Fic, *Ibid.*, hlm.148.

Sejauh menyangkut nasib Presiden, apakah mau jalan terus “dengan” atau “tanpa” Presiden, rencana besar Partai Komunis Indonesia menyangkut opsi-opsi dengan hierarki bertingkat.

1. Jalan terus bersama Presiden sampai tuntas: membersihkan para jenderal, memaksa Presiden mendukung pembentukan Dewan Revolusi dan menyepakati keanggotaannya, memaksa Presiden menunjuk Kabinet Gotong royong dan mengundurkan dia dari kehidupan publik karena alasan kesehatan ke Cina, dengan penuh kemuliaan sebagai Presiden Kehormatan seumur hidup, atau gelar lain yang hebat-hebat.
2. Mengantisipasi jalan terus “dengan” Presiden sampai pembersihan itu, dan jika ia menolak mendukung atau melegitimasi Dewan Revolusi, maka jalan terus “tanpa” Presiden, yaitu menggusur Presiden dengan cara baik-baik atau dengan paksa.
3. Memvisualisasikan kemungkinan jalan terus “tanpa” Presiden, diikuti dengan pembentukan Dewan Revolusi dan penunjukan Demokrasi Rakyat, dan Presiden akan dilenyapkan dalam pergolakan itu.

Diantara ketiga opsi ini akan dilaksanakan tergantung pada situasi revolusioner tanggal 1 Oktober 1965. Opsi pertama berjalan dengan baik meskipun satu jenderal lolos, sehingga berikutnya opsi kedua yang akan mereka jalankan dalam hal ini Presiden Soekarno sebagai pemain central. Namun Presiden tentunya mengetahui hal tersebut, karena ia menyadari bahwa kartu utama sebuah permainan politik berada ditangannya, maka Aidit pasti membutuhkannya untuk merubah tetasmen politik seperti yang diharapkan oleh Dewan Revolusi, setelah

kegagalan kedua ini maka perpecahan dikalangan Dewan Revolusi semakin jelas, mereka cenderung bertindak sendiri-sendiri. Aidit sibuk dengan ambisi politiknya untuk menggulingkan Soekarno, sementara para perwira yang terlibat cenderung menyelamatkan diri, seperti halnya Supardjo yang meninggalkan Aidit dan bergabung dengan Presiden, hal ini menjadi pukulan telak bagi Aidit, karena koalisinya mulai kacau karena ditinggal Supardjo, salah satu pemain inti dalam konspirasi itu.²⁰⁹ Suparjo kecewa dengan partai yang telah mengabaikan komponen militer dalam gerakan itu dan bertindak terburu-buru.²¹⁰

Opsi-opsi tersebut hanya mengantarkan para konspirator itu menuju ke lubang kematian mereka sendiri, karena gerakan tersebut berhasil digagalkan oleh Mayor Jenderal Soeharto dan RPKAD yang dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo, walaupun jenderal-jenderal yang mereka targetkan hanya Nasution yang lolos dan lolosnya nasution tersebut menimbulkan kegelisahan dikalangan para konspirator. Akibat perbuatan Aidit dan kawan-kawanya itu, ribuan rakyat Indonesia yang dicap PKI dibunuh secara massal seperti yang dilakukan di Jawa Tengah, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali yang dilakukan pada tanggal 20-21 Oktober 1965, dan bulan November 1965 di Jawa Timur, serta di Bali pada bulan Desember tahun itu juga.²¹¹

Partai Komunis Indonesia, melalui Biro Khususnya telah melakukan berbagai persiapan untuk jalanya sebuah gerakan, yang mereka sebut ofensif revolusioner, dengan memukul para petinggi TNI khususnya TNI_AD yang menjadi

²⁰⁹ Victor M. Fic. *Ibid.*, hlm.180.

²¹⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

²¹¹ Baskara T. Wardaya, *op.cit.*, hlm.172.

penghalang cita-cita mereka membentuk masyarakat sosialis nantinya. Gerakan 30 September 1965, direncanakan dengan sangat matang melalui Biro Khususnya yang bekerja sama dengan kelompok perwira progresif. Gerakan 30 September 1965, melibatkan Partai Komunis Indonesia dalam taraf yang intensif. Tokoh-tokoh partai dan Biro Khususnya memiliki andil yang sangat penting dalam tragedi tersebut yakni sebagai perencana gerakan. Ini adalah sisi-sisi objektif dari historiografi tentang Gerakan 30 September 1965. Namun demikian, sulit dipungkiri banyak unsur lain yang ikut terlibat dan sekaligus juga banyak yang jadi korban.²¹²

²¹² Center for Imformation Analysis, *Gerakan 30 September antara Fakta dan rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah op.cit.*, hlm.132.

BAB IV

**HUBUNGAN SOEHARTO, UNTUNG, LATIEF, SUPARDJO DAN SJAM
KAMARUZZAMAN DALAM GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965**

A. Hubungan Soeharto dan Untung Sebelum Gerakan 30 September 1965

Sampai saat ini yang menjadi topik menarik, yaitu hubungan erat antar Soeharto dan para pelaku Gerakan 30 September 1965 sehingga banyak yang menganggap bahwa Soeharto terlibat gerakan tersebut. Sebenarnya, hubungan baik tersebut belum cukup untuk mengaitkan Soeharto dengan gerakan tersebut. Hubungan antara Soeharto dengan pelaku gerakan sebut saja Untung, Latief dan Supardjo serta Sjam Kamaruzzaman merupakan hubungan individual.

Demikian juga halnya dengan banyaknya dugaan yang menyebutkan bahwa Soeharto diuntungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut, karena setelah terjadinya gerakan tersebut, Soeharto dikenal sebagai pahlawan yang mengendalikan dan membebaskan Indonesia dari cengkeraman komunis.

Anggapan yang menyatakan bahwa Soeharto bisa terkait dalam Gerakan 30 September 1965 perlu dikaji lebih dalam, walaupun fakta sejarah menunjukkan kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh sentral pelaku Gerakan 30 September 1965 bahkan hingga menjelang terjadinya peristiwa itu.

Alasan lain yang memperkuat dugaan bahwa adanya keterkaitan Soeharto dalam peristiwa itu, karena kedongkolan atau sakit hati Soeharto pada sebagian jenderal tersebut sehubungan dengan kasus penyelundupan mobil yang dilakukan Soeharto sewaktu di Jawa Tengah. Kasus itu diselidiki oleh Jend. Ahmad Yani, S.

Parman, M.T. Haryono dan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo yang diketuai oleh Mayjen Suprpto. Jendral-jendral itu semua kemudian menjadi korban dalam Peristiwa 1 Oktober 1965.²¹³

Soeharto bisa diibaratkan sebagai orang yang paling beruntung dengan adanya Gerakan 30 September 1965, karena dengan demikian popularitasnya kembali terangkat, apalagi pasca Gerakan 30 September 1965, Soeharto terlihat sangat berperan menjadi penyelamat bangsa Indonesia dari cemkeraman komunis. Namanya diagung-agungkan selama kurang lebih tiga puluh dua tahun, namun setelah runtuhnya pemerintahan orde baru, maka peristiwa sejarah yang dianggap tabu dikeluarkan masa orde baru mulai terbuka. Ketika masa orde baru para pelaku dan saksi sejarah seperti dibungkam oleh penguasa pada waktu itu. Karena ambisi kekuasaanlah yang mendorong seseorang untuk memalsukan sejarah, kisah-kisah sejarah direkayasa dengan logika demi kelestarian kekuasaannya. Sudah menjadi hal biasa dilakukan oleh setiap orang yang berkuasa untuk menutupi kejelekan rezim sekaligus menonjolkan kelebihanannya secara mencolok. Kekuasaan suatu rezim memang membutuhkan legitimasi historis, agar kekuasaan itu tidak tergoyahkan oleh siapapun.²¹⁴ Berangkat dari hal tersebut, kiranya perlu suatu penulisan ulang sejarah agar tidak selalu dicurigai penuh dengan rekayasa. Berbagai fakta dan kesaksian dari pelaku sejarah yang pernah terbungkam oleh

²¹³ P.J. Suwarno, *Gerakan Politik tentara Nasional Indonesia*, Sanata Dharma, Yogyakarta, 2004, hlm. 76.

²¹⁴ Center for Imformation Analysis, *Gerakan 30 September antara Fakta dan rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah op.cit.*, hlm.130.

alasan politik penguasa, sudah waktunya mendapat tempat dalam kajian analisis, dengan harapan mendapatkan sebuah sintesis yang lebih valid dan akurat.²¹⁵

Perihal yang sampai sekarang menjadi pro dan kontra para sejarawan baik dalam maupun luar negeri adalah menyangkut terlibat atau tidaknya Soeharto ketika itu menjabat sebagai Pangkostrad dengan pangkat Mayor Jenderal.²¹⁶ Banyak yang mengatakan bahwa Soeharto terlibat secara tidak langsung dalam gerakan yang digagas oleh Partai Komunis itu. Indikasi keterlibatan Soeharto tidak terlepas dari hubungannya dengan para pelaku gerakan itu. Sebut saja Letkol. Inf. Untung, yang pernah menjadi anak buah Soeharto di Jawa Tengah dalam Divisi Diponegoro, Untung pun pernah menjadi anggota kelompok Pathuk meski bukan sekelas dengan Soeharto dan Sjam.²¹⁷ Selain Untung ada juga Latief dan Sjam Kamaruzzaman dan Brigjen Soepardjo yang dikenal dekat dengan Soeharto. Sampai sekarang-pun keterlibatan penguasa orde baru itu masih mengambang, dan mungkin akan tetap menjadi praduga yang tidak terkonfirmasi. Untuk mengupas lebih jauh apakah Soeharto terlibat atau tidak dalam Gerakan 30 September 1965, dapat kita lihat melalui hubungannya dengan para pelaku Gerakan tersebut.

Letnan Kolonel Infanteri Untung Sutopo bin Syamsuri adalah salah satu pelaku Gerakan 30 September 1965. Sebelum peristiwa itu terjadi, Untung pernah menjadi anak buah Soeharto di Jawa Tengah dalam Divisi Diponegoro.²¹⁸ Untung pernah menjadi anggota “kelompok Pathuk”, meski bukan kelas yang sama

²¹⁵ *Ibid.*, hlm.132.

²¹⁶ Setneg, *op.cit.*, hlm.118.

²¹⁷ Majalah Detak 5 Oktober 1998, hlm.8.

²¹⁸ Harsutejo, *op.cit.* hlm.159., lihat juga, Endik Koeswoyo, *Siapa Memanfaatkan Letkol Untung Mengungkap Konspirasi Gerakan 30 September*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, hlm.18.

dengan Sjam dan Soeharto. Soeharto dan Untung berpisah tahun 1950, kemudian bertemu kembali pada tahun 1962, ketika bersama bertugas merebut Irian Barat, Untung berada di garis depan. Berkat keberanian tersebutlah maka Untung dianugerahi bintang penghargaan oleh Presiden Soekarno. Sebelum ditarik ke Resimen Cakrabirawa, Untung pernah menjadi Komandan Batalyon 454/Banteng Raider²¹⁹. Batalyon ini memiliki kualitas dan tingkat legenda yang setara dengan Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Kujang I dan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328/Kujang II.²²⁰ Namun Batalyon 454/Raider ini terlibat Gerakan 30 September 1965, dan bahkan sempat bertempur dengan pasukan elit RPKAD²²¹ yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo.

Untung Sutopo Bin Syamsuri lahir di desa Sruni, Kedungbadjal, Kebumen Jawa Tengah tanggal 3 Juli 1926 beragama Islam. Untung menikah tahun 1964, acara perkawinan dilaksanakan di desa Kebumen Jawa Tengah. Walaupun jauh, namun Mayjen Soeharto dan istrinya hadir dalam resepsi pernikahan, dan merupakan satu-satunya perwira tinggi yang datang, dan hal ini menunjukkan bahwa hubungan kedua prajurit yang berbeda pangkat tersebut cukup akrab.²²² Bahkan yang mempertemukan Untung dengan calon istrinya adalah ibu Tien Soeharto.

Untung sebagai lulusan terbaik Akademi Militer pada angkatannya yang memiliki NRP.11284, pernah dikirim belajar ke Amerika Serikat. CIA sebagai

²¹⁹ Sekarang Batalyon 400/Raider yang berkedudukan di Srandol Semarang Jawa Tengah.

²²⁰ Center for Information Analysis, *Gerakan 30 September antara Fakta dan rekayasa Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah op.cit.*, hlm. 14.

²²¹ Sekarang Komando Pasukan Khusus (Kopasus).

²²² Harsutejo, *op.cit.*, hlm.160.

badan intelijen Amerika Serikat memiliki cukup catatan mengenai Untung, sehingga dapat direkomendasikan untuk mengikuti pendidikan di sana. Seperti rekomendasi CIA kepada Presiden Johnson bahwa Untung memiliki “*military police background and was trained in the United States*”. Menurut David Johnson,²²³ Untung adalah militer profesional, senada dengan hal tersebut ketika berkumpul dengan Subandrio di Penjara Cimahi mengatakan bahwa, Untung bukan orang yang menyukai masalah politik, ia tipe tentara yang loyal kepada atasan, Untung memiliki kepribadian yang polos dan jujur, hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa sampai detik terakhir sebelum eksekusinya, ia masih percaya bahwa vonis mati terhadap dirinya tidak mungkin dilaksanakan. “Percayalah Pak Ban, vonis buat saya itu hanya sandiwara”, ujarnya kepada Subandrio. Untung percaya bahwa Soeharto mendukung tindakannya terhadap para jenderal dan akan memberikan bantuan seperti dijanjikannya.²²⁴ Namun fakta sejarah berbicara lain, Untung yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965, yang akhirnya harus menerima hukuman karena terbukti melakukan tindakan subversi yang mengarah pada kudeta.

B. Hubungan Soeharto dan Latief Sebelum Gerakan 30 September 1965

Fakta sejarah yang menceritakan hubungan antara Soeharto dan Latief sebelum Gerakan 30 September 1965, tidak ditandai oleh suatu konflik. Paling sedikit ada dua hal yang dikemukakan Latief tentang mantan komandannya semasa bergerilya di Yogyakarta. Pertama Soeharto tidak berada di garis depan dalam Serangan

²²³ *Ibid.*

²²⁴ Dr H. Subandrio, , *Kesaksianku Tentang G30S*, Naskah Foto kopi 2000.hlm. 41-42.

Umum 1 Maret 1949. Kedua, kecurigaannya bahwa Soeharto terlibat dalam kudeta berdarah tahun 1965 atau Gerakan 30 September 1965.²²⁵

Tanggal 28 September 1965 Latief dan keluarganya berkunjung ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim Jakarta. Soeharto mengatakan bahwa sehari sebelumnya, Soebagio, bekas anak buahnya dari Yogyakarta, telah memberitahukan adanya info Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Sukarno. Selain itu juga pertemuan Latief dengan Soeharto di RSPAD Gatot Subroto tanggal 30 September 1965 untuk menjenguk Tommy Soeharto yang ketumpahan sup panas. Pada kesempatan itu Latief sempat berbicara selama setengah jam dengan Soeharto.

Latief sendiri menyatakan bahwa karier kemiliterannya nyaris selalu mengikuti jejak Soeharto. Hubungan mereka berdua bukan lagi sekedar bawahan dengan atasan, melainkan sudah sebagai sahabat. Soeharto tahu bahwa Latief tidak akan melakukan tindakan yang merugikan dirinya. Sudah sejak agresi kedua, Latief selalu mendapat kepercayaan dari Soeharto sebagai komandannya yakni memimpin pasukan pada saat yang sulit.²²⁶ Ketika Trikora-pun ia masih dicari oleh mantan komandannya itu, tetapi Latief sedang mengikuti Seskoad. Pada bulan Juni 1965 Mayjen Soeharto meminta agar Latief dapat memimpin pasukan ke Kalimantan Timur, tetapi Umar wirahadikusumah menolak melepasnya karena tenaga Latief diperlukan untuk tugas keamanan di Kodam V Jaya.²²⁷

²²⁵ Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi gelap Sejarah Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2004. hlm.25.

²²⁶ Harsutejo, *op.cit.*, hlm. 163.

²²⁷ Kol. Abdul Latief., *Pledoi Kol. A. latief: Soeharto terlibat G30S*, ISAI, Jakarta, 1999, hlm. 281.

Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, Latief mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Soeharto. Latief sering berkunjung ke rumahnya. Ketika Sigit, anak Soeharto dikhitan, istri Latief datang. Sebaliknya ketika Latief mengkhitan anaknya maka Soeharto dan Ibu Tien juga datang ke rumahnya. Bahkan pada tanggal 28 September 1965 ketika Latief berkunjung ke rumah Soeharto, ia membicarakan soal tukar-menukar rumah dinas. Latief menawarkan rumah dinas baginya di Jalan Jambu bekas kedutaan Inggris yang lebih besar untuk ditukar dengan kediaman Soeharto yang lebih kecil yang sedang ditempatinya.²²⁸ Namun dalam kaitannya dengan Gerakan 30 September 1965, Kolonel Latief dalam pembelaanya tetap menuduh Jenderal Soeharto terlibat. Karena pada tanggal 30 September 1965, Brigjen Ssupardjo dan Letkol Untung datang ke rumah Kolonel Latief di Cawang. Mereka berdua meminta kepada Latief untuk menyampaikan kepada Soeharto bahwa, besok akan ada tujuh jenderal yang akan dihadapkan pada Presiden oleh Resimen Cakrabirawa. Latief lalu menuju R.S. Gatot Soebroto, tempat Soeharto sedang menunggu Tommy yang dirawat akibat tertumpah sop panas. Dalam pertemuan yang cukup singkat dengan Soeharto, Latief melaporkan rencana untuk menghadapkan ketujuh jenderal kepada Presiden untuk mengklarifikasikan keberadaan Dewan Jenderal. Mendengar hal itu, Soeharto diam, ia cuma bertanya siapa yang memimpin gerakan. Oleh Latief dijawab, "Letkol. Untung!" karena Soeharto diam saja, maka Latief lalu pamit pulang.²²⁹ Latief juga merupakan saksi kunci yang dapat menggoyahkan kedudukan Jenderal Soeharto sebagai orang yang selama ini

²²⁸ *Ibid.*, hlm.282.

²²⁹ Endik Koeswoyo, *op.cit.*, hlm. 63.

terbebas dari indikasi keterlibatan Gerakan 30 September 1965. Walaupun pada kenyataannya pernyataan-pernyataan Latief yang menyerang Soeharto tidak merubah keadaan. Malahan, Latief yang harus mendapat hukuman sama seperti tuduhan terhadap Untung.

C. Hubungan Soeharto dan Soepardjo Sebelum Gerakan 30 September 1965

Brigadir Jenderal M.S. Supardjo adalah seorang perwira yang berasal dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat. Ia memiliki sejumlah alasan sehubungan dengan pengabaian atas dirinya yang dilakukan oleh para elit Angkatan Darat karena sikapnya yang memberikan simpati terhadap golongan sayap kiri. Hal ini kemudian mengakibatkan dirinya hanya diberikan posisi kekuasaan yang sempit atau bahkan tanpa kekuasaan sama sekali. Misalnya saja diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Komando Daerah Militer (Wakasdam) Siliwangi dan diangkat menjadi Panglima Pertempuran Komando Tempur ke-4 di Mandau kalimantan Barat, tetapi tidak diberi pasukan yang dapat digerakan sendiri sampai hilang jabatan komandonya.

Supardjo adalah seorang perwira yang memiliki berbagai kelebihan yang harus diperhitungkan, namun supardjo adalah perwira yang pro Sukarno, Supardjo juga tidak terlalu menyukai kehidupan yang dijalani oleh perwira seniornya.²³⁰

Supardjo adalah salah satu anggota trio Soeharto-Sjam-Latief, dan Untung.²³¹

Ketika Mayjen Soeharto melakukan perjalanan ke Kalimantan sebagai Wakil Panglima Kolaga, ia menyempatkan diri menemui anak buahnya Brigjen

²³⁰ Peter Edman, *op.cit.*, hlm. 188.

²³¹ A.M. Hanafi., *A.M. Hanafi Menggugat: Kudeta jend. Soeharto, dari Gestapu ke Supersemar*, Montblanc, Lille, 1998, hlm.204-205)

Supardjo. Keberhasilan Suparjo menangkap pimpinan DI/TII Kartosuwiryo, mengantarnya menjadi Panglima Kopur II Kostrad dibawah Soeharto, sehingga cukup beralasan apabila ada hubungan personal yang dibangun ketika mereka masih dalam satu corps Kostrad, dan samapi sekarangpun, belum ada penelitian yang menunjukan bahwa adanya keretakan dalam hubungan Supardjo dan Soeharto.

D. Hubungan Soeharto dengan Sjam Sebelum Gerakan 30 September 1965

1. Sjam Kamaruzzaman

Riwayat hidup Sjam, menurut berbagai sumber tertulis, seperti buku karangan Manai Sophiaan (Kehormatan Bagi Yang Berhak), dan Endik Koeswoyo (Siapa Yang Memanfaatkan Letkol. Untung), Sjam memiliki nama asli Sjamsul Qamar Mubaidah. Dia adalah tokoh kunci Gerakan 30 September 1965, dan orang nomor satu di Biro Khusus²³² Partai Komunis Indonesia yang bertugas membina simpatisan partai dari kalangan ABRI dan PNS. Sjam kelahiran Tuban, Jawa Timur, 30 April 1924.²³³ Pendidikannya kelas tiga Land & Tunbow School dan Suikerschool, Surabaya. Karena Jepang masuk ke Indonesia, maka ia tidak menamatkan sekolahnya. Pada tahun 1943 ia masuk sekolah dagang di Yogyakarta sampai kelas dua. Setelah proklamasi kemerdekaan, Sjam juga ikut berjuang dalam pertempuran di Magelang tahun 1945-1946, Ambarawa dan Front

²³²Tingkat kerahasiaan jaringan yang dibangun Biro Khusus PKI sangat tinggi. Demikian rapuhnya kerahasiaan itu, sampai-sampai Mayjen S. Parman, selaku Asisten I/Intelijen Men/Pangad, turut jadi korban. Padahal selaku Asisten Intelijen, Mayjen S. Parman semestinya mengerti situasi yang tengah terjadi di lingkungan ABRI dan politik nasional pada umumnya. Lihat, <http://www.mail-archive.com/siarlist@minipostgresql.org/msg02188.html>

²³³ Lihat juga, http://id.wikipedia.org/wiki/Syam_Kamaruzzaman

Mranggen, Semarang. Sempat memimpin kompi laskar di Front Semarang Barat. Sekembalinya dari sana ia menjadi anggota pemuda tani dan memimpin laskar tani di Yogyakarta.²³⁴

Tahun 1947, menjelang aksi militer Belanda I, ia membentuk serikat buruh mobil, sebuah organisasi buruh yang beraliran kiri. Pada akhir 1947, ketika SBKP (Serikat Buruh Kapal dan Pelabuhan) didirikan, Sjam juga menjadi pimpinan, ia banyak mempelajari teori marxis pada periode tersebut ketika menjadi kader tokoh PSI Djohan Sjahroesjah di Yogyakarta melalui kelompok Pathuk. Sesudah pemberontakan PKI Madiun diredam oleh TNI, Sjam masuk ke Jakarta. Di Jakarta ia memimpin Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) di Tanjung Priok. Dalam pemberontakan PKI di Madiun 1948, D.N. Aidit dan Moh. Hakim Lukman tidak tertangkap, meski keduanya tokoh Front Demokrasi Rakyat yang berafiliasi dengan PKI. Mereka masuk ke Jakarta atas bantuan Sjam. Aidit dan Lukman dinaikan ke kapal dari salah satu pelabuhan dan diturunkan di Tanjung Priok. Berkat kecerdikan Sjam pula, Aidit dan Lukman yang dituduh sebagai penumpang ilegal bisa lolos dari pemeriksaan pegawai pelabuhan di awal tahun 1950.²³⁵

Tahun 1950, Sjam menjadi ketua SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Jakarta Raya tahun 1951-1957, jabatan itu didapat ketika Aidit sudah menduduki pimpinan PKI. Sjam juga menjadi asisten pribadi D.N. Aidit mulai tahun 1960, seiring dengan itu Sjam ditetapkan menjadi anggota departemen organisasi Partai Komunis Indonesia. Tahun 1964 Sjam memperkenalkan bentuk

²³⁴ www.google.com Profil: *Sjam Kamaruzzaman* 09 September 2005. Lihat juga Manai Sophiaan, *op.cit.*, hlm. 72.

²³⁵ Manai Sophiaan, *Ibid*, hlm. 73., lihat juga Endik Koeswoyo, *op.cit.*, hlm. 49.

pengorganisasian anggota-anggota Partai Komunis Indonesia yang berasal dari ABRI. Maka lahirlah apa yang disebut Biro Khusus Sentral tahun 1964, seperti yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa, posisi Sjam menggantikan Suhadi alias Karto sebagai pemimpin cikal bakal Biro Khusus sejak tahun 1953, Karto alias Suhadi meninggal tahun 1962.

Sjam pernah menjadi informan Moedigdo, seorang komisaris polisi. Sjam juga pernah menjadi intel Kolonel Soewarto, direktur Seskoad tahun 1958. Ketika mulai dekat dengan Aidit, Sjam ditugaskan Aidit untuk menjalin hubungan dengan anggota ABRI Melalui cabang-cabang di daerah, Sjam berhasil mengadakan kontak-kontak tetap dengan kira-kira 250 perwira di Jawa Tengah, 200 di Jawa Timur, 80 sampai 100 di Jawa Barat, 40 sampai 50 di Jakarta, 30-40 di Sumatera Utara, 30 di Sumatera Barat dan 30 di Bali.²³⁶

2. Hubungan Sjam Kamaruzzaman dengan Soeharto

Kedekatan Sjam dengan Soeharto, membuat banyak orang kuat menduga soal keterlibatan Soeharto dalam Gerakan 30 September 1965. Sjam sebagai otak dibalik gerakan ini, melalui Biro Khusus yang ia pimpin. Dalam perjalanan Hidupnya, Sjam dekat dengan Soeharto ketika sama-sama di Kelompok Pathuk²³⁷

²³⁶ www.google.com Profil: *Sjam Kamaruzzaman* 09 September 2005., lihat juga, Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986, hlm. 88.

²³⁷ Kelompok Pathook '43 (diambil dari nama kampung)-yang eksis pada kurun 1943-1946 dan beranggotakan para pelajar Sekolah Menengah Tinggi Taman Siswa. Kelompok ini didirikan setelah Jepang, pada 8 Maret 1943, menutup sekolah Taman Siswa, yang mereka anggap "sarang kaum nasionalis". Dibimbing oleh, antara lain, Wijono Soerjokoemo (Tokoh Taman Siswa), Soendjojo Koesoemo, dan Melanchton Tobing, Kelompok Pathook kelak berkembang menjadi salah satu simpul terkuat dari jaringan gerakan politik bawah tanah Sutan Sjahrir atau dikenal juga sebagai "Marx House" karena kelompok ini banyak mendiskusikan buku *Das Kapital* karangan Karl Marx, Sebagaimana Mahameru I, mereka juga sudah aktif mengkaji buku-buku Adam Smith,

dan Mahameru I Yogyakarta. Sjam-lah yang pertama kali mengajak Soeharto mengikuti diskusi-diskusi di Kelompok Pathook. Sjam dengan pemikiran-pemikiran politiknya, bermula dari keikutsertaannya dalam dalam organisasi tersebut. Dalam gerakan 30 September 1965, Sjam sangat aktif. Menurut Kolonel Latief, Sjam-lah yang memerintahkan untuk membunuh semua Jenderal yang dibawa masih dalam keadaan hidup di Lubang Buaya.²³⁸

E. Soeharto dan Gerakan 30 September 1965

Strategi yang dipakai Soeharto dengan menghilangkan orang-orang yang terlibat Gerakan 30 September 1965 sebelum dan sesudah diadili di Mahmillub membuat orang banyak berpikir bahwa dia tidak terlibat dalam gerakan tersebut, justru sebelum orde baru runtuh, mitos Soeharto sebagai penyelamat bangsa dari bahaya laten komunis sangat lestari. Sebenarnya sebuah dilema tersendiri buat Soeharto, karena apabila Soeharto menyelamatkan anak buahnya yang terlibat maka Suharto akan dianggap terlibat dalam peristiwa itu, sehingga ia membunuh orang-orang yang menjadi kunci gerakan itu, terutama anak buahnya yang lebih mengenalnya sehingga dosanya tidak terungkap, namun apabila Soeharto juga mengatakan kepada jenderal-jenderal yang akan diculik, bahwa mereka akan dijemput, mungkin Gerakan 30 september tidak akan terjadi, karena pasti sudah

dan melahap teori-teori kemiliteran Preager, perbandingan teori perjuangan dan pergerakan Machiaveli, Gandhi, hingga Lenin. Harus diakui, buku-buku macam itu memang amat menggairahkan pemuda-pemuda zaman itu, yang -dari hari ke hari-tak nyaman menghadapi represi fasisme Jepang. Mereka menganggap bahwa “kapitalisme” adalah musuh yang senantiasa berkembang menjadi imperialisme. Bersama Hatta dan Soebadio, Sjahrir memang beberapa kali memberikan bimbingan politik kepada mereka.

Lihat, <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/10/30/0052.html>, lihat juga, <http://klikkliping.blogspot.com/2007/09/sejarah-indonesia.html>.

²³⁸ Manai Sophiaan, *op.cit.*, hlm.108., lihat juga, Eros Djarot, dkk. *op.cit.*, hlm. 91-92.

ada tindakan preemtif, atau upaya cegah dini dari intelijen TNI sehingga jenderal-jenderal mereka tidak menjadi korban.

James Luhulima mengemukakan pendapat bahwa tidak tertutup kemungkinan keterlibatan Soeharto dalam Gerakan 30 September 1965, bahkan posisinya amat strategis. Seperti yang dikemukakan dalam tulisannya bahwa, adanya kunjungan Kolonel Latief ke RSPAD menemui Soeharto yang sedang menunggu Tommy yang dirawat di sana. Pada tanggal 29-30 September 1965. Kesempatan itu menurut Kolonel Latief, dia menyampaikan kepada Soeharto bahwa para jenderal akan dijemput paksa, beberapa jam sebelum aksi penjemputan itu dilaksanakan. Kenyataan bahwa Mayjen Soeharto sebelumnya sudah tahu bahwa para jenderal itu akan dijemput paksa, dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya.²³⁹

Banyaknya fakta-fakta yang terbungkam selama orde baru, seolah-olah membenarkan sejarah yang selama ini telah dibelokkan demi kepentingan penguasa. Sebelum malam 30 September 1965, Soeharto “bukan apa-apa”. Dia hanya diberi jabatan sebagai pimpinan Kostrad, kesatuan yang waktu itu tidak terlalu bergengsi. Menurut dugaan banyak orang, karir militernya akan berhenti di sana, mengingat di tubuh AD ada banyak tokoh yang lebih senior dan memiliki kredibilitas tinggi di mata Sukarno. Jadi, dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 merupakan *blessing in disguised* bagi karier Soeharto.

Soeharto mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus dari peristiwa berdarah tersebut, yaitu *pertama*, tersingkirnya pimpinan teras Angkatan Darat yang berarti

²³⁹ James Luhulima, *Menyingkap Dua Hari tergelap di tahun 1965 Melihat Peristiwa G30 S dari Perspektif Lain*, Kompas, Jakarta 2006. hlm.44.

semakin melejitkan namanya ke posisi puncak. Dengan kata lain, Soeharto tidak memiliki saingan lagi untuk menguasai AD; *kedua*, yaitu melemahnya kepemimpinan Sukarno karena kehadirannya di Halim Perdanakusuma sehingga menimbulkan dugaan bahwa beliau terlibat dalam peristiwa tersebut; *ketiga*, dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 sekaligus juga melemahkan posisi kelompok-kelompok loyalis yang ada di belakang Presiden Soekarno, termasuk Angkatan Udara. Tentu saja ini peluang bagi TNI-AD, khususnya Soeharto untuk mengendalikan situasi sembari perlahan-lahan mendesak Presiden Sukarno ke posisi yang sulit; *keempat*, dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 telah menempatkan Soeharto sebagai *public figure* yang baru.

Tindakan-tindakan Soeharto selalu dalam *timing* yang tepat. Pengangkatan jenazah para jenderal di bawah liputan luas media massa yang juga berhasil dalam kontrolnya, membantunya memperkuat *main stream* di mana dia sendiri berada di depan.²⁴⁰ Jika dilihat kembali bahwa penculikan perwira tinggi Angkatan Darat itu dilaksanakan kelompok militer yang berintikan kesatuan-kesatuan dari Batalyon I Resimen Cakrabirawa, Batalyon 454 Divisi Diponegoro, Batalyon 530 Divisi Brawijaya, Pasukan Gerak Cepat AURI, dan Brigade Infanteri I Jakarta Raya, yang kesemuanya bergabung dalam satu unit yang memakai nama Pasukan Pasopati dengan Komandan Lettu. Abdul Arif.²⁴¹ Anggota TNI-AD memainkan peran cukup besar. Adapun pihak yang paling diuntungkan dalam peristiwa tersebut, yaitu TNI-AD yang kemudian tampil paling menonjol sebagai penyelamat bangsa, dengan Soeharto sebagai *figure head*nya. Dengan meletusnya

²⁴⁰ Proyek Historiografi Center for Information Analysis. *op.cit.*, hlm. 127 – 128.

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 184 – 185.

Gerakan 30 September 1965 ini, secara tidak langsung menjadi jembatan bagi Soeharto untuk sampai pada kursi presiden dengan mendiskreditkan Sukarno.²⁴²

Sikap Soeharto terhadap kelompok komunis pasca terjadinya Gerakan 30 September 1965 mencerminkan bahwa Soeharto adalah sosok yang anti komunis dan merupakan Jenderal yang berhaluan kanan. Logika seperti ini bertentangan dengan fakta bahwa Soeharto tidak termasuk dalam daftar Jenderal yang akan diculik oleh pelaku para pelaku gerakan, yang notabene merupakan jenderal-jenderal yang anti komunis. Dengan tidak dicantumkannya Soeharto dalam daftar Jenderal AD yang akan diculik, maka minimal Soeharto tidak dianggap memusuhi PKI. Ini juga berkaitan dengan hubungan personalnya yang erat dengan militer yang berhaluan kiri yang kemudian menjadi pelaku utama operasional gerakan.²⁴³

Indikasi keterkaitan Soeharto dalam gerakan tersebut juga tampak pada kehadiran batalyon-batalyon Angkatan Darat ke Jakarta yang pada mulanya didatangkan ke Jakarta untuk menghadiri peringatan hari ABRI tanggal 5 Oktober 1965. Dalam kenyataannya batalyon-batalyon tersebut seperti batalion 545 Divisi Diponegoro, Batalion 530 Divisi Brawijaya tersebut kemudian bergabung dalam satu unit yang memakai nama pasukan Pasopati dengan komandan Lettu Abdul Arif.²⁴⁴

Hal tersebut tampak pada tanggal 21 September 1965 di mana Pangkostrad Mayjen Soeharto mengirim radiogram kepada Yon 530/Brawijaya, Yon 545/Diponegoro dan Yon 328/Siliwangi agar segera datang ke Jakarta untuk mengikuti HUT ABRI ke-20 tanggal 5 Oktober 1965, selain pasukan-pasukan

²⁴² *Ibid.*, hlm 67.

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 75.

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 127-128.

tersebut kemudian bergabung dalam pasukan yang menculik para jenderal AD, salah satu pasukan yang dipimpin oleh serka Bungkus dengan Wadayonnya Supardjo, malah dituding sebagai pasukan liar yang berkeliaran di sekitar monas pada malam kejadian.²⁴⁵

Ketangkasan Soeharto dalam meredam aksi komplotan pelaku gerakan tersebut memancing kecurigaan Ratna Sari Dewi (isteri ketiga Sukarno), yang mengatakan :

“Sepertinya dia (Suharto, red) sudah tahu semua, seakan-akan telah direncanakan...Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak begitu cepat. Kalau belum tahu rencana G 30 S, ia tak mungkin bisa melakukannya.”²⁴⁶

Peralihan kekuasaan dari Sukarno kepada Soeharto sebagaimana kita ketahui tidak berlangsung secara wajar. Pertama diawali dengan percobaan kudeta yang memuncak pada Gerakan 30 September 1965 dan diakhiri dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang secara de facto memberikan kekuasaan kepada Mayjen. Soeharto. Periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 disebut oleh Y. Pohan (*Who were the real Plotters of the Coup Against Presiden Soekarno*) sebagai kudeta merangkak. Saskia menamakan peristiwa tahun 1965 sebagai kup kedua, sedangkan Peter Dale-Scott melihatnya sebagai kudeta tiga tahap, yaitu *pertama*, gerakan tiga puluh September yang merupakan “kudeta gadungan”. *Kedua* tindakan balasan, yaitu pembunuhan terhadap anggota PKI secara massal dan *ketiga* pengikisan sisa-sisa kekuatan Sukarno.²⁴⁷

²⁴⁵ Eros Djarot, dkk, *op.cit.*, hlm.103.

²⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 76

²⁴⁷ Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. op.cit.*, hlm. 12.

Ada beberapa teori mengenai bagaimana posisi Soeharto dalam Gerakan 30 September 1965. Seperti yang dikemukakan oleh Berdasarkan pendapat Wertheim bahwa bukan PKI dan bukan para perwira muda TNI-AD, melainkan Soeharto-lah yang menjadi otak G 30 S 1965 tersebut. Teori Wertheim ini lebih menekankan pada keterlibatan Soeharto dalam G 30 S 1965, bahkan menduga bahwa Soeharto adalah dalang yang berdiri di belakang kejadian berdarah tersebut dengan mengacu kepada kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh inti pelaku Gerakan 30 September 1965.²⁴⁸

Pendapat yang dikemukakan oleh Wieringa yang mengajukan tesis dua kudeta yaitu, kudeta pertama dilakukan oleh perwira menengah Angkatan Darat dan kudeta kedua yang dikerjakan oleh Soeharto sendiri ketika dia menumpas para pelaku kudeta yang membunuh enam jenderal dan seorang perwira. Kudeta Soeharto tersebut mencapai puncaknya pada kudeta kedua ketika Sukarno menyerahkan kekuasaan dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966.²⁴⁹

Keterangan salah satu pelaku utama dalam Gerakan 30 September 1965 yaitu A. Latief yang mengatakan bahwa sekitar pukul 23.00 tanggal 30 September 1965, dia melapor kepada Soeharto yang sedang menunggu puteranya yang sedang sakit karena ketumpahan sup panas di RSPAD.²⁵⁰ Keterangan yang disampaikan A. Latief dibantah oleh Soeharto. Menurutnya, malam itu Latief berjalan mondar-mandir di depan *zaal* tempat Tommy di rawat dengan niat ingin membunuhnya, namun niat itu diurungkan karena banyak orang di rumah sakit.

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm.207.

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm.208.

²⁵⁰ P.J.Suwarno, *op.cit.*, hlm. 80., lihat juga Kolonel Abdul Latief, *Pledoi Kol. A. latief: Soeharto terlibat G30S*, *op.cit.*, hlm. 281.

Keterangan yang diberikan Latief sesuai dengan apa yang ditulis oleh Saskia bahwa :

"Besar kemungkinan Jenderal Soeharto...sudah mengetahui sebelumnya tentang akan terjadinya kup...Tetapi barangkali agak terlalu jauh ditarik kesimpulan bahwa ia telah mendalangi kup pertama, yang mengharuskan mengatur pembunuhan terhadap rekan-rekannya. Namun ketika akhirnya Soeharto bertindak, ia melakukannya dengan cepat dan tegas...sejak saat itu...ia telah memulai dengan siasatnya untuk menggulingkan Sukarno sambil memaksakan diri sendiri ke atas tampuk kekuasaan. Ia pasti menyadari bahwa yang diperlukannya bukan sekedar pameran kekuatan militer...Adanya para perempuan di Lubang Buaya itulah yang digunakan sebagai amunisi oleh Soeharto demi transisi mental yang diangankannya itu. Dengan itu bukan hanya perempuan yang berhimpun di sana akan dimusnahkannya dengan segala daya, tetapi juga kaum komunis dapat dijatuhkannya sama sekali. Sementara itu, Sukarno yang menunjukkan dukungannya pada PKI dapat dipertontonkan oleh sebagian pemimpin yang tak becus. Kegagalan Sukarno melindungi PKI dapat dilihat sebagai isyarat pudarnya wahyu kekuasaan dan ketiadadayaan, sehingga sudah pasti Sukarno akan bisa dilenyapkan dari percaturan politik."²⁵¹

Dalam percaturan politik, Soeharto termasuk pintar dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk merealisasikan tujuan pribadi dengan dalih demi keselamatan negara. Walaupun dalam kenyataannya bahwa apa yang dilakukan Soeharto adalah demi keselamatan negara, namun hal tersebut telah *ditunggangi* oleh kepentingan pribadi untuk merebut tampuk kekuasaan dengan cara-cara yang "terkesan" konstitusional.

Dalam usahanya menggulingkan Sukarno dan menumpas PKI hingga ke akar-akarnya, semuanya itu terkesan konstitusional dengan mengatas-namakan rakyat dan demi keselamatan negara. Ketidakmampuan Sukarno dalam mengatasi

²⁵¹ Asvi Warman Adam, *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia. op.cit.*, hlm. 13 – 14.

terjadinya Gerakan 30 September 1965 dan kecenderungannya melindungi PKI, dijadikan senjata ampuh oleh Soeharto untuk menyerang balik Sukarno, sehingga memaksa presiden Sukarno untuk lengser dari kursi Kepresidenan RI, setelah sebelumnya Soeharto mengambil-alih perlahan-lahan kekuasaan dari Soekarno melalui Supersemar. Di dalam ketidakberdayaan Sukarno itulah Soeharto semakin gencar menyerang Sukarno dengan fakta-fakta dan keburukan Sukarno yang dianggap terlibat G30S,²⁵² sehingga sedikit demi sedikit kewibawaan Sukarno hilang, bahkan beliau tidak sanggup lagi untuk melindungi dirinya sendiri.

Jika dilihat perjalanan karir Soeharto, tampak bahwa dalam setiap usahanya untuk naik ke jabatan tertentu pasti selalu ada yang dikorbankan. Soeharto berhasil menggantikan A. Yani sebagai Panglima dalam pembebasan Irian Barat, sehingga ia berhasil diangkat menjadi Pangkostrad tanggal 1 Mei 1963. Dengan jabatan dan kekuasaan yang cukup tinggi, dia mulai berani menyusun rencana untuk mengambil alih kekuasaan dengan memanfaatkan pertikaian antara PKI dan TNI AD.

Setelah Presiden Sukarno turun dari kekuasaannya, pelaku Gestapu yang masih hidup yang selama kekuasaan Soeharto, dipenjarakan puluhan tahun karena terlibat atau diduga terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Selama itu pula para saksi dan pelaku yang mengetahui dengan jelas peristiwa tersebut terbungkam. Dalam Gerakan 30 September 1965 berdasarkan keterangan para pelaku bahwa Soeharto terlibat bahkan Soeharto juga diduga sebagai kunci dalam tragedi berdarah tersebut. Berdasarkan kesaksian para pelaku Gestapu seperti Kolonel Latief,²⁵³ seakan-akan ingin menuntut keadilan, ingin menuntut

²⁵² *Ibid.*, hlm.170.

²⁵³ *Ibid.*, hlm. 27.

kebenaran, dan ingin menunjukkan bahwa dengan mengesampingkan Sukarno, sesungguhnya Soeharto lah yang harus bertanggung jawab atas tragedi berdarah tersebut.

Jika diperhatikan periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966, tampak perkembangan peristiwa yang demikian cepat dan luar biasa. Soeharto adalah seorang ahli strategi yang handal, dan lebih banyak beruntung karena bisa memanfaatkan kesempatan, sehingga bisa mencapai tampuk kekuasaan menggantikan Presiden Soekarno.²⁵⁴ Seperti kita ketahui semua, setelah peristiwa itu terjadi, Soeharto bisa mempertahankan kekuasaannya di Indonesia kurang lebih tiga dasa warsa.

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm.14-15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam konstelasi politik dalam negeri mulai tahun 1950, Partai Komunis Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Setelah mendapat rehabilitasi dari negara, Partai Komunis Indonesia mulai mengembangkan lagi sayap kekuasaannya secara terbuka maupun secara tertutup. Cara terbuka yang mereka gunakan dengan memperbanyak jumlah anggota di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Strategi yang dipakai dalam merekrut anggota, Partai Komunis Indonesia melakukannya dengan sistem sel, dengan cara tersebut Partai Komunis Indonesia melakukan pendekatan secara personal, seolah-olah berpihak pada rakyat khususnya kaum lemah atau rakyat kecil, sehingga dengan mudah mereka terbujuk dan masuk menjadi anggota partai. Peristiwa Tanjung Morawa adalah contoh kecil dari strategi Partai Komunis Indonesia untuk menarik simpati rakyat agar berpaling ke mereka. Hasil kerja keras mereka tersebut membuahkan hasil ketika pemilu pertama tahun 1955 Partai Komunis menduduki urutan keempat partai pemenang pemilu. Strategi gerilya yang diimplementasikan melalui MKTBP (Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan) semakin menambah power partai yang berlambang palu arit tersebut, sehingga dalam konstelasi politik dalam negeri maupun internasional sangat diperhitungkan, hal ini tidak terlepas dari strategi politik diantaranya Front Persatuan Nasional yang dipakai partai tersebut dalam menundukkan lawan politiknya. Contohnya PNI dan partai-partai lainnya

dirangkul untuk bekerjasama, kemudian dijatuhkan lewat dominasi keputusan politik dan personal dalam lembaga kerjasama yang lebih banyak anggota PKI, dan PKI-pun semakin menarik perhatian pemerintah Indonesia, karena keputusan-keputusan politik yang mereka buat cenderung menarik perhatian Presiden ketika itu.

Semakin kuatnya kekuasaan Partai Komunis Indonesia ditunjukkan diberbagai bidang dengan mendirikan Lembaga Kesenian Rakyat, dan membubarkan Manikebu yang nasionalis, kemudian juga menarik anggota Manikebu untuk menjadi anggota Lekra, PKI juga membubarkan BPS, serta organisasi lainnya yang dianggap bisa mengganggu jalannya strategi politik mereka untuk mencapai kekuasaan tunggal.

Setelah partai-partai politik di Indonesia ditundukan, ABRI (sekarang TNI) khususnya Angkatan Darat merupakan sebuah batu besar yang harus disingkirkan oleh PKI dalam perjalanan menuju puncak kekuasaan, karena TNI khususnya AD sangat anti dengan Partai Komunis Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh TNI dengan melakukan upaya pencekalan terhadap berbagai kegiatan politik PKI yang disinyalir oleh TNI mengarah pada tindakan subversif. Namun Partai Komunis Indonesia memiliki strategi untuk meghadapi TNI dengan tujuan akhir bahwa TNI khususnya TNI AD juga harus mau menerima konsep Nasakom dan tunduk dibawah kekuasaan mereka.

Melalui berbagai analisis dalam rapat Politbiro, bahwa Partai Komunis Indonesia tidak mungkin bisa menghadapi TNI secara frontal, karena diukur dengan kekuatan persenjataan PKI sangat jauh dibawah TNI. Kemudian Partai

Komunis Indonesia melakukan strategi penyusupan ke dalam tubuh TNI melalui Biro Khusus (Biro Khusus) ini sebagai implementasi dari perjuangan tertutup. Biro Khusus menyajikan rencana strategi untuk menggulingkan TNI khususnya AD dengan melakukan penyerangan lebih dulu terhadap petinggi-petinggi AD yang mereka sebut dewan jenderal.

Biro Khusus Partai Komunis Indonesia adalah sebuah organ yang mempunyai samaran yang hebat, serba rahasia (*clandestine*) yang merupakan perwujudan yang kasat-mata sikap militansi baru yang mulai dominan di kalangan pemimpin Partai Komunis Indonesia akhir tahun 1963. Biro Khusus dikepalai oleh anggota rahasia Partai Komunis Indonesia, yakni Sjam beranggotakan Pono dan Waluyo.

Sejak tahun 1950 Partai Komunis Indonesia sudah mulai menghubungi perwira-perwira yang berhaluan kiri. Perwira dan Bintara itu dibina dan didoktrinasi dengan komunisme. Biro Khusus yang langsung dibawah Aidit menyebarkan info-info tentang dewan jenderal yang mau mengadakan coup. Mereka melakukan penyusupan terhadap tubuh TNI melalui apa yang mereka sebut perwira muda dan maju. Penyusupan dilakukan dengan cara sistem sel juga seperti yang mereka lakukan untuk perekrutan anggota. Namun penyusupan kedalam tubuh TNI dilakukan hanya oleh Biro Khusus dengan jalan:

- a. Melakukan pembinaan terhadap sebanyak mungkin anggota ABRI dengan mempengaruhi sikap dan tindakannya agar sesuai dengan ideologi Partai Komunis Indonesia, atau setidaknya mendapatkan simpatinya sehingga sikapnya tidak memusuhi partai.

- b. Mengusahakan perluasan anggota/simpatisan dengan mendorong mereka untuk mencari anggota ABRI baru yang bisa dibina atau direkrut sehingga dalam waktu tertentu jaringannya bertambah banyak.
- c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh D.N. Aidit.

Adapun tugas-tugas khusus yang diberikan oleh D.N. Aidit dilaksanakan dengan cara:

1. Penanaman sel-sel. Apabila didapatkan seorang anggota ABRI, maka orang tersebut dididik dan ditingkatkan kesadaran politiknya secara teori dan praktek. Jika sudah dianggap cukup, orang itu kemudian diberi pekerjaan menurut tugas, kemampuan dan kesanggupannya. Dengan demikian anggota ABRI itu telah dianggap sebagai sel partai di tempatnya bekerja.
2. Penanaman simpatisan partai. Anggota ABRI yang telah dihubungi tetapi belum bisa ditarik menjadi anggota partai diberi tugas-tugas yang ringan. Anggota demikian biasanya disebut simpatisan partai, dan diberi brosur-brosur partai dan diajak berdiskusi mengenai teori-teori elementer Marxisme-Leninisme.
3. Mempertajam perbedaan antara bawahan dan atasan. Antara bawahan dan atasan ada kalanya terdapat perbedaan dalam kondisi sosial ekonominya. Perbedaan yang ada ini selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan jalan mempertajam dan memperluaskan rasa perbedaan tersebut.
4. Memanfaatkan hasil-hasil yang diperoleh untuk kepentingan partai. Anggota ABRI yang telah dibina partai bisa dimanfaatkan untuk

kepentingan partai, umpamanya, sebagaio sumber untuk mendapatkan informasi mengenai aktivitas ABRI atau dalam gerakan mengumpulkan uang untuk konggres.

Dengan jalan seperti itu diharapkan TNI bisa mereka pengaruhi, sehingga jalan menuju puncak kekuasaan menjadi semakin mulus.

Rencana strategi yang dibuat oleh Biro Khusus untuk menundukan TNI berujung pada pembunuhan terhadap para Jenderal Angkatan Darat, yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965, Biro Khusus Partai Komunis Indonesia sebagai perencana gerakan, sehingga menyeret PKI sebagai organisasi-pun terlibat. Perencanaan Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Biro Khusus secara rinci dapat dilihat dalam pelaksanaan sepuluh kali rapat yang kesemua itu digagas oleh Sjam Kamaruzzaman sebagai kepala Biro Khusus.

Mereka yang dituduh adalah petinggi-petinggi TNI-AD yang dianggap oleh Partai Komunis Indonesia sebagai Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal tersebut mereka culik dan kemudian dibunuh. A.Yani, Suprpto, D.I. Panjaitan, S.Parman, Haryono M.T., Sutoyo Siswomiharjo menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Tidak hanya itu pembunuhan juga terjadi di Yogyakarta terhadap Katamso dan Sugiono. Dalam tragedi itu ada yang menjadi korban salah sasaran yaitu Ade Irma Suryani putri Jenderal A.H. Nasution, Letnan dua inf. Pierre Andreas Tendean dan Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun. Semua operasi tersebut dikendalikan dibawah Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, ketika itu menjabat sebagai komandan Detasemen Cakrabirawa. Dilibatkannya Untung dan yang lainnya dari kalangan tentara dalam operasi

tersebut, untuk mengelabui tindakan politik Partai Komunis Indonesia yang sebenarnya sebagai motor penggerak operasi tersebut. Nantinya jika operasi tersebut diketahui, maka khalayak ramai akan mengatakan bahwa itu adalah konflik internal Angkatan Darat.

Setelah dikaji lebih dalam, maka apa yang dinamakan peristiwa Gerakan 30 September 1965 bukan semata-mata konflik internal Angkatan Darat, tetapi konflik yang sengaja dibuat oleh Partai Komunis Indonesia untuk menundukan Angkatan Darat sebagai musuh politiknya. Karena pada waktu itu Angkatan darat dan TNI umumnya yang menjadi penghalang Partai Komunis Indonesia menuju puncak cita-cita mereka menuju masyarakat sosialis. Sehingga Partai yang berlambang palu arit ini dibawah kepemimpinan Aidit membuat suatu skenario yang dijalankan oleh Biro Khusus partai yang ia bentuk sekitar tahun 1964 melakukan penyusupan terhadap tubuh Angkatan darat yang bermuara pada Gerakan 30 September 1965.

Suharto adalah salah satu pihak yang diuntungkan dalam peristiwa berdarah tersebut, karena dia sebagai perwira yang paling senior waktu itu, mengambil suatu tindakan untuk melakukan pembersihan terhadap seluruh komponen pasukan yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Walaupun berbagai sumber pustaka menganalisis, bahwa ada keterkaitan Soeharto dalam Gerakan 30 September 1965, karena sebelum dimulainya gerakan tersebut Soeharto sudah diberitahu oleh Latief, Soeharto diam saja, sikap yang diambil Soeharto tersebut terkesan ambigu. Satu sisi Soeharto secara tidak langsung membiarkan gerakan tersebut, di sisi lain Soeharto sulit untuk mengambil keputusan, karena naluri

sebagai seorang bapak yang harus menjaga anaknya ketika sakit terbentur naluri sebagai prajurit yang harus siap kapanpun diperlukan, dan yang paling sulit ketika harus menentukan keputusan mencegah atau membiarkan gerakan tersebut, karena orang-orang yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 merupakan orang-orang yang dekat dengan pribadinya, sebut saja Untung, Latief, Sjam dan Supardjo, kemudian jenderal-jenderal yang akan diculik juga merupakan rekan-rekan kerjanya meskipun ada beberapa jenderal yang pernah memiliki hubungan tidak baik dengan Soeharto, seperti D.I. Panjaitan dan Ahmad Yani yang membongkar kasus korupsi Soeharto ketika menjadi Panglima Divisi Diponegoro.

Namun fakta sejarah membuktikan bahwa ketika semua petinggi Angkatan darat dibunuhlah yang secara tidak langsung mengantarkan Soeharto menduduki posisi puncak terbuka lebar, dan setelah itu orang-orang yang dekat dengan pribadinya satu persatu diseret ke meja pengadilan militer luar biasa. Luputnya Partai Komunis Indonesia memperhitungkan keberadaan Soeharto, telah menjadi kesalahan bagi partai tersebut, karena terbukti kemudian Soeharto-lah yang menghabisi riwayat partai yang berlambang palu arit itu.

B. Saran

Gerakan 30 September 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Banyak fakta objektif yang bersifat mutlak dan tidak bisa dipungkiri, misalnya keterlibatan Partai Komunis Indonesia melalui Biro Khususnya, ambiguitas Soekarno, intrik dalam tubuh militer (khususnya AD), serta kedekatan hubungan personal antara pelaku utama Gerakan 30 September 1965 dengan

Mayjen Soeharto, ketika itu menjabat sebagai Pangkostrad/Pangkopkamtib, membuat masyarakat banyak mengambil persepsi bahwa mereka terlibat.

Bisa dikatakan gerakan itu gagal, kalau dilihat dari usaha untuk menggulingkan pemerintahan. Namun harus diakui bahwa, Partai Komunis Indonesia memiliki nyali besar untuk melakukan hal itu. Partai Komunis Indonesia menggunakan sebuah organisasi rahasia yang dikenal dengan nama Biro Khusus, untuk mengendalikan dan melancarkan usaha tersebut. Tingkat kerahasiaan organ partai ini dibuktikan dengan sedikitnya anggota legal partai yang mengetahui keberadaannya. Dari Biro Khusus inilah, gerakan itu diproyeksikan dan digulirkan.

Tidak dapat dipungkiri pula, bahwa Gerakan 30 September 1965 hampir meruntuhkan ideologi sebuah negara yang dibangun sudah sejak lama. Stigmatisasi yang dilakukan Soeharto terhadap mereka yang tidak terlibat langsung dengan komunisme, misalnya pelarangan anak-anak eks tapol menjadi pegawai negeri, merupakan cara efektif untuk menutup kemungkinan bangkitnya komunisme di Indonesia.

Hangatnya perdebatan mengenai sejarah seputar Gerakan 30 September 1965, membuat generasi muda Indonesia sekarang tidak banyak tahu tentang sejarah peristiwa tersebut. Mereka sudah terpengaruh oleh pandangan penulis-penulis yang memiliki kepentingan politik sendiri tanpa memikirkan rekonsiliasi nasional. Untuk itu, Sejarawan sangat memiliki andil dalam mengungkap kebenaran sejarah. Karena karya merekalah yang senantiasa menjadi pedoman masyarakat dalam mempelajari masa lalu bangsa. Dengan demikian penulisan sejarah bangsa

terutama yang berkaitan dengan sejarah Gerakan 30 September 1965 tidak berhenti sampai disini, karena kemungkinan untuk menemui data fakta yang baru masih terbuka lebar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef, (1971), *Komunis Dalam Teori dan Praktek*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Adisusilo, Sutardjo,(1994), *Kapita Selekta Sejarah Eropa Abad XVIII-XIX; Revolusi, Nasionalisme, Demokrasi, Komunisme*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- _____, (2005), *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Aidit, (1959) *Pilihan Tulisan Djilid I dan II*, Jajasan Pembaruan, Jakarta.
- _____,(1960), *Lahirnya PKI dan Perkembangannya*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- Adam, Asvi Warman, (2004), *Soeharto Sisi gelap Sejarah Indonesia*, Ombak, Yogyakarta.
- Agung, I Gusti Ngurah, (1992), *Metode Penelitian Sosial Pengertian Ide Pemahaman Praktis*, Gramedia, Jakarta.
- Atmadji Sumarkodjo,(2000), *Mendung Diatas Istana Merdeka: Menyingkap Peran Biro Khusus PKI dalam Pemberontakan G30S*, Times Communication & Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Atmowiloto, Arswendo (1986) *Penghianatan G 30 S/PKI*, pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Baskara T. Wardaya, (2006), *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal'65 hingga G30S*, Galang PressYogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, (1999), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bung Karno, 100 Tahun 6 Juni 1901-2001 Sebuah Liber Amicorum*, Hasta Mitra Jakarta, 2000.
- Center for Information Analysis, (1999), *Gerakan 30 September: Antara Fakta dan Rekayasa, Berdasarkan Kesaksian Para Pelaku Sejarah*, Center for Information Analysis & Media Pressindo, Yogyakarta.

- _____. (2005), *Saksi dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September 1965*, Penerbit Media Presindo, Yogyakarta.
- Crouch, Harold, (1986), *Militer dan Politik di Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Dagun, Save M., (2006), *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LKPN, Jakarta.
- Dhaniel Dhakidae, (2003), *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Gramedia, Jakarta.
- Djarot, Eros, dkk, (2006), *Siapa Sebenarnya Soeharto Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G-30-S/PKI*, Mediakita, Jakarta.
- Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia Djakarta 7-14 September 1959*, Jajasan Pembaruan, Jakarta, 1960.
- Edman, Peter, (2005), *Komunisme Ala Aidit Kisah Partai Komunis Indonesia di Bawah Kepemimpinan D.N. Aidit 1950-1965* (terjemahan), Center for Information Analysis, Yogyakarta.
- Endik Koeswoyo, (2007), *Siapa Memanfaatkan Letkol Untung Mengungkap Konspirasi Gerakan 30 September*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Feith, Herbert & Castles, Lance (ed) (1988), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3S, Jakarta.
- Forlan, John (Ed), (2004), *The Future Revolution; masa depan revolusi di era globalisasi dan mendefinisi ulang makna revolusi*, Yogyakarta, Insist Press.
- Gerungan, (1988), *Psikologi Sosial*, Eresco, Bandung.
- Giebels J, Lambert, (2005), *Pembantaian Yang Ditutup-tutupi Peristiwa Fatal Disekitar Kejatuhan Bung Karno*, Grasindo, Jakarta.
- Goenawan Moehammad, (1988), *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*, Jakarta, LSIK.
- Gottschalk, Louis, (1975), *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UI Press.
- Hanafi, AM, (1988), *A.M. Hanafi Menggugat: Kudeta jend. Soeharto, dari Gestapu ke Supersemar*, Montblanc, Lille.
- Harry Poeza, (1988), *Tan Malaka Pergulatan Menuju Republik Indonesia*, Jakarta: Graffiti.

- Harsutejo, (2003), *G30S Sejarah Yang Digelapkan Tangan Berdarah CIA dan Regim Suharto*, Hasta Mitra, Jakarta.
- Hulsebos, J, (1955), *Komunisme Pengaduan Djandji atau Antjaman?* (terjemahan) P.T. Pembangunan Djakarta.
- Imam Soedjono, (2006), *“Yang Berlawanan” Membongkar Tabir pemalsuan Sejarah PKI*, Resist Book, Yogyakarta.
- Isak, Joesoef (ed),(2001), *100 Tahun Bung Karno 6 Juni 1901-2001 Sebuah Liber Amicorum*, Hasta Mitra Jakarta.
- James Luhulima, (2006), *Menyingkap Dua Hari tergelap di tahun 1965 Melihat Peristiwa G30 S dari Perspektif Lain*, Kompas, Jakarta.
- Katoppo, Aristides, dkk., (1999), *Menyingkap Kabut Halim 1965*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kuntowijoyo, (1999), *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya.
- Latief, Kolonel, (1999), *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.
- MAHKAMAH MILITER LUAR BIASA (1968). *Putusan Nomor: PTS-027/MLB-I/K/1968. Perkara KAMARUSAMAN bin AHMAD MUBAIDAM, alias SJAM, DJIMIN, ALI MUCHTAR, ALI SASTRA, SJAMSUDIN dan KARMAN*, Jakarta.
- Moedjanto,G, (1988), *Indonesia Abad ke-20 I Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, Yogyakarta, Kanisius.
- , (1988), *Indonesia Abad Ke-20 II Dari Perang Kemerdekaan Pertama Sampai PELITA III*, Yogyakarta, Kanisius.
- Moerdiono, (1994), *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mukmin, Hidayat, (1991), *TNI Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Penyelesaian Konfrontasi Indonesia Malaysia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Napitupulu P., (1966), *Intelligence Fungsi dan Peranannya*, Bhatara, Jakarta.

- Nugroho Notosusanto & Ismail Saleh, (1993) *Tragedi Nasional Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia*, Intermasa, Jakarta.
- Oei Tjoe Tat, (1998), *Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno*, Editor Pramoedya Ananta Toer & Stanley Adi Prasetyo, Hasta Mitra, Jakarta.
- Oejeng Soewargana & Nugroho Notosusanto, (1967), *Rentjana Peladjaran Terurai Tentang Komunisme*, (tanpa penerbit) Bandung.
- Peter Salim, Yenny Salim, (1991), *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, edisi I*, Modern English Press, Jakarta.
- Poerwadarminta, (1976), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Penerangan Angkatan Darat, (1965), *Fakta-Fakta Persoalan Sekitar "Gerakan 30 September Jilid 1, 2, 3*, Jakarta.
- Ricklefs, M.C, (1993), *Sejarah Indonesia Modern*, Terjemahan Drs. Dharmono Hardjowidjono, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Saiful Arif & Eko Prasetyo, (2004), *Lenin Revolusi Oktober 1917 Sanggahan Atas Pemikiran Franz Magnis-Suseno*, Rensis Book, Yogyakarta.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia, (1994), *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, Jakarta.
- Sophiaan, Manai, (1994), *Kehormatan Bagi Yang Berhak*, Yayasan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Jakarta.
- Sudhan SD., (1995), *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Bentang, Jakarta.
- Sumadi Suryabrata, (1983), *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press
- _____, (1989), *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali.
- Sumanto, (1995), *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Aplikasi Metode Kuantitatif dan Statistika dalam Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta,.
- Sundhaussen, Ulf, (1986), *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, LP3ES, Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis, (1999), *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Suwarno, P.J., (2004), *Gerakan Politik tentara Nasional Indonesia*, Sanata Dharma, Yogyakarta.

Victor M. Fic, (2005), *Anatomy of The Jakarta Coup: October 1, 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

William, Ebenstein, dkk, (1987), *Isme-Isme Dewasa ini*, Erlangga, Jakarta.

Artikel-Artikel Internet:

Wahid Salahuddin, *Setelah 40 Tahun Peristiwa G30S Berlalu Bagaimana Kita Melihatnya?*, Personal Website H. Umar Said.

www.ADVOKASI.COM Wertheim : Soeharto Dalang G30S ?

www.google.com Tokoh Sjam Yang Misterius, oleh Aini Patria.

www.google.com Profil: Sjam Kamaruzzaman 09 September 2005.

Sumber : <http://www.kpu.go.id/Sejarah/pemilu1955.shtml>

www.tajuk.com, *Jejak Sjam di Pathook Mahameru*, 30 Oktober, 1999.

www.sejarahtni.mil.id.

Tabloid:

Detak, Tabloid (1998). No. 012 Tahun ke-I, edisi 29 September-5 Oktober

----- (1998). No.08/XXX/10 Oktober

Majalah Tempo, edisi 1-7 Oktober 2007

LAMPIRAN



DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG**

Dengan ini mengatakan dengan khidmat:

Bahwa anjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang disampaikan kepada segenap rakyat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari konstituante sebagaimana ditentukan dalam UUDS.

Bahwa berhubung dengan pernyataan sebagian terbesar anggota-anggota sidang pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercaya oleh rakyat kepadanya. Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakyat Indonesia dan didorong oleh keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negara Proklamasi.

Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian – kesatuan dengan konstitusi tersebut:

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

**KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG**

Menetapkan pembubaran konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan DPAS, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Juli 1959
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PANGLIMA TERTINGGI
ANGKATAN PERANG

SUKARNO



Sumber :
Herbert Feith & Lance Castles (ed) (1988), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3S, Jakarta, hlm. (86-87)

**DEKRIT NO.1
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN REVOLUSI
INDONESIA**

- I. Demi keselamatan Negara Republik Indonesia, demi pengamanan pelaksanaan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya, demi keselamatan Angkatan Bersenjata pada umumnya, pada waktu tengah malam hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah dilangsungkan gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal yang telah merencanakan Coup menjelang Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965. Sejumlah Jenderal telah ditangkap, alat-alat komunikasi dan objek-objek vital lainnya di Ibu Kota telah jatuh sepenuhnya ke dalam kekuasaan "Gerakan 30 September". Gerakan 30 September adalah gerakan semata-mata dalam tubuh Angkatan Darat untuk mengakhiri perbuatan sewenang-wenang jenderal-jenderal Anggota Dewan Jenderal serta perwira-perwira lainnya yang menjadi kaki tangan dan simpatisan anggota Dewan Jenderal. Gerakan ini dibantu oleh pasukan-pasukan bersenjata di luar Angkatan Darat.
- II. Untuk melancarkan tindak lanjut daripada Gerakan 30 September 1965, maka oleh Pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang anggotanya terdiri dari orang-orang sipil dan orang-orang militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Untuk sementara waktu menjelang pemilihan umum Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber daripada segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia adalah alat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mewujudkan Pancasila dan Panca Azimat Revolusi seluruhnya. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatan sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari komandan dan wakil-wakil komandan Gerakan 30 September.
- III. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan Negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner. Sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas Menteri diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin, menjaga ketertiban dalam Departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bias berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Revolusi Indonesia c.q. menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia.
- IV. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia, di daerah dibentuk Dewan Revolusi Propinsi (paling banyak 25 orang), Dewan Revolusi Kabupaten (paling banyak 15 orang), Dewan Revolusi Kecamatan (paling banyak 10 orang) dan Dewan Revolusi Desa (paling banyak 7 orang), terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

Dewan-dewan Revolusi Daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan, dan yang di propinsi dan kabupaten pekerjaannya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) masing-masing, sedangkan di kecamatan dan di desa dibantu oleh pimpinan Front Nasional setempat yang terdiri dari orang-orang yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve.

- V. Presidium Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari Komandan dan Wakil-wakil komandan Gerakan 30 September. Komandan dan wakil-wakil Komandan Gerakan 30 September adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Revolusi Indonesia.
- VI. Segera sesudah pembentukan Dewan Revolusi Daerah, Ketua Dewan Revolusi yang bersangkutan harus melaporkan kepada Dewan Revolusi setingkat di atasnya tentang susunan lengkap anggota dewan. Dewan-dewan Revolusi Propinsi harus mendapat pengesahan tertulis dari Presidium Dewan Revolusi Indonesia, Dewan Revolusi Kabupaten harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Propinsi. Dewan Revolusi Kecamatan dan Desa harus mendapat pengesahan tertulis dari Dewan Revolusi Kabupaten.

Jakarta, 1 Oktober 1965

KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER

Komandan : Letnan Kolonel Untung

Wakil Komandan : Brigjen Supardjo

Wakil Komandan : Letnan Kolonel Udara Heru

Wakil Komandan : Kolonel Laut Sunardi

Wakil Komandan : Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965, sekitar jam 13.00)

Sumber:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan PKI: Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta, 1994. lampiran, hlm. 9-10

**KEPUTUSAN NO. 1
TENTANG SUSUNAN DEWAN REVOLUSI INDONESIA**

- I. Memenuhi isi Dekrit No.1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia, maka dengan ini diumumkan anggota-anggota lengkap dari Dewan Revolusi Indonesia :
1. Letnan Kolonel Untung, Ketua Dewan
 2. Brigjen Supardjo, Wakil Ketua Dewan
 3. Letnan Kolonel Udara Heru, Wakil Ketua Dewan
 4. Kolonel laut Sunardi, Wakil Ketua Dewan
 5. Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas, Wakil Ketua Dewan
 6. Omar Dhani, Laksamana Madya Udara
 7. Sutjibto Judodihardjo, Inspektur Jendral Polisi
 8. E. Martadinata, Laksamana Madya Laut
 9. Dr. Subandrio
 10. Dr. J.Laimena
 11. Ir. Suracman (golongan nasionalis)
 12. Fattah Jassin (golongan agama)
 13. K.H.Siradjudin Abas (golongan agama)
 14. Tjugito (golongan komunis)
 15. Arudji Kartawinata
 16. Sjiwau Giok Tjan
 17. Sumarno, S.H.
 18. Hartono, Mayjen KKO
 19. Sutarto, Brigjen Polisi
 20. Zaini Mansyur (Front Pemuda Pusat)
 21. Jahja, S.H. (Front Pemuda Pusat)
 22. Sukatno (Front Pemuda Pusat)
 23. Bambang Kusnohadi (PPM)
 24. Rachman (Wakil Sekjen Front Nasionalis)
 25. Hardojo (Mahasiswa)
 26. Basuki Rachmat, Mayjen
 27. Ryacudu, Brigjen
 28. Solichin, Brigjen
 29. Amir Mahmud, Brigjen
 30. Andi Rivai, Brigjen
 31. Sujono, Mayor Udara
 32. Leo Wattimena, Komodor Udara
 33. Dr. Utami Surjadarma
 34. A.Latief, Kolonel
 35. Umar Wirahadikusumah, Mayjen
 36. Ny.Supeni
 37. Ny.Mahmudah Mawardi
 38. Ny.Suharti Suwarno
 39. Fatah, Kolonel
 40. Suherman, Kolonel

41. Samsu Sutjibto, Kolonel Laut
42. Suhardi (Wartawan)
43. Drs.Sumartono, Komisaris Besar Polisi
44. Dfjunta Suwardi
45. Karim D.P.(Persatuan Wartawan Indonesia)

- II. Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan merupakan Presidium Dewan Revolusi Indonesia yang di antara dua sidang lengkap Dewan bertindak atas nama Dewan.
- III. Semua Anggota Dewan Revolusi Indonesia dari kalangan sipil diberi hak memakai tanda pangkat militer Letnan Kolonel atau yang setingkat. Anggota Dewan Revolusi dari kalangan Angkatan Bersenjata tetap dengan pangkat yang lama, kecuali yang lebih tinggi dari Letnan Kolonel diharuskan memakai yang sama dengan pangkat Komandan Gerakan 30 September, yaitu Letnan Kolonel atau yang setingkat.

KOMANDAN GERAKAN 30 SEPTEMBER

Ketua Dewan Revolusi Indonesia

Ttd

(Letnan Kolonel Untung)

Jakarta, 1 Oktober 1965

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 13.00)

Sumber:
Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September
Pemberontakan PKI:Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta,
1994. Lampiran, hlm.11-12

KEPUTUSAN NO. 2 TENTANG PENURUNAN DAN PENAIKAN PANGKAT

- I. Berhubung segenap kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia pada tanggal 30 September 1965 diambil alih oleh Gerakan 30 September yang komandannya adalah perwira dengan pangkat Letnan Kolonel, maka dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang di atas Letnan Kolonel atau setingkat. Semua perwira yang tadinya berpangkat di atas Letnan Kolonel harus menyatakan kesetiaan secara tertulis kepada Dewan Revolusi Indonesia dan baru sesudah itu berhak memakai pangkat Letnan Kolonel. Letnan Kolonel adalah pangkat yang tertinggi dalam Angkatan Bersenjata Negara Republik Indonesia.
- II. Karena Gerakan 30 September pada dasarnya adalah gerakan daripada prajurit bawahan, terutama daripada tamtama dan bintara, maka dengan ini dinyatakan bahwa semua tamtama dan bintara dari semua Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mendukung Gerakan 30 September dinaikkan satu tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September 1965.
- III. Semua tamtama dan bintara yang langsung ambil bagian dalam gerakan pembersihan terhadap anggota-anggota Dewan Jenderal pada tanggal 30 September malam di Jakarta, dinaikkan pangkatnya 2 tingkat lebih tinggi daripada sebelum tanggal 30 September 1965.

Komandan Gerakan 30 September/Ketua

Dewan Revolusi Indonesia

ttd

(Letnan Kolonel Untung)

Jakarta, 1 Oktober 1965

Diumumkan oleh Bagian Penerangan Gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965.

(Disiarkan RRI Jakarta tanggal 1 Oktober 1965 sekitar jam 13.00)

Sumber :

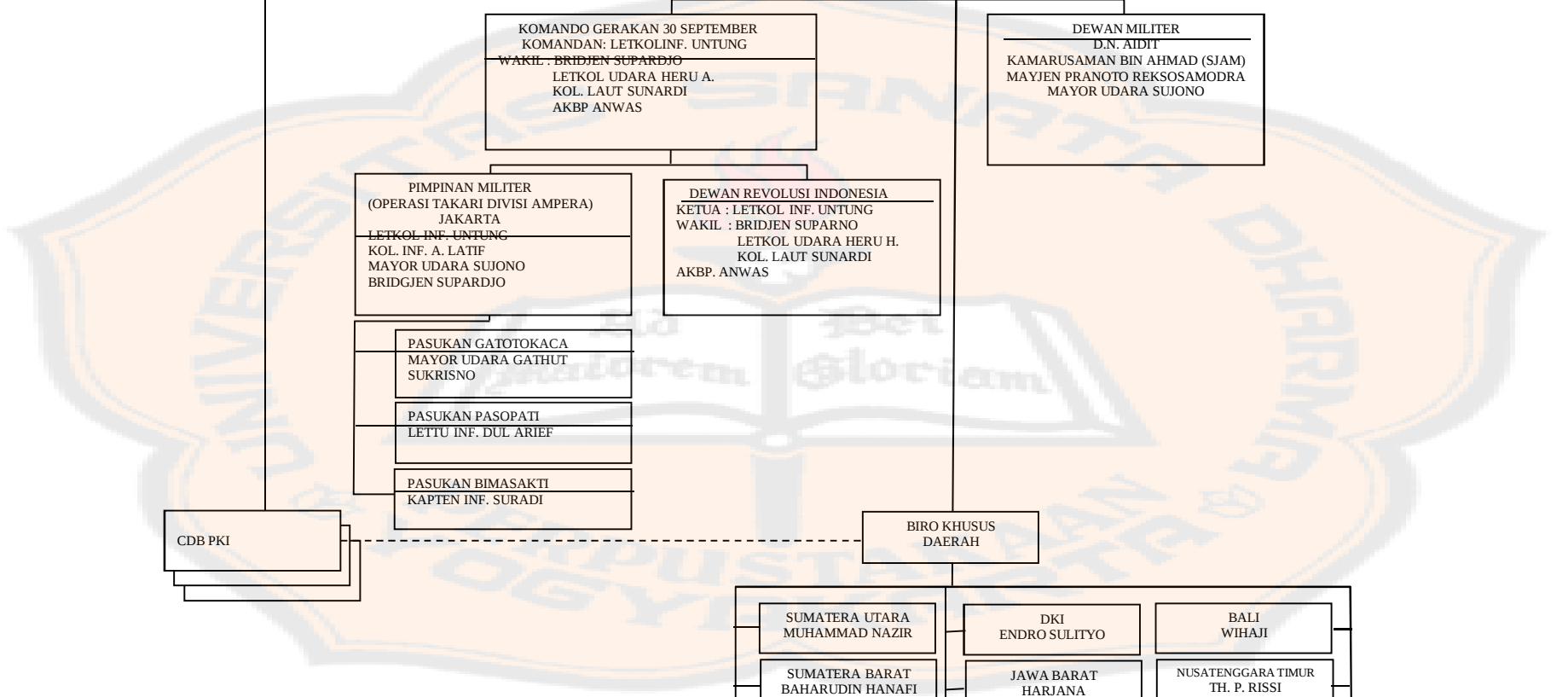
Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September
Pemberontakan PKI : Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Jakarta,
1994. lampiran, hlm.5

```
graph TD
    K30S[KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER  
KOMANDAN: LETKOLINF. UNTUNG  
WAKIL: BRIDJEN SUPARDJO  
LETKOL UDARA HERU A.  
KOL. LAUT SUNARDI  
AKBP ANWAS]
    DM[DEWAN MILITER  
D.N. AIDIT  
KAMARUSAMAN BIN AHMAD (SIAM)  
MAYJEN PRANOTO REKSOSAMODRA  
MAYOR UDARA SUJONO]
    PM[PIMPINAN MILITER  
(OPERASI TAKARI DIVISI AMPERA)  
JAKARTA  
LETKOL INF. UNTUNG  
KOL. INF. A. LATIF  
MAYOR UDARA SUJONO  
BRIDJEN SUPARDJO]
    DRI[DEWAN REVOLUSI INDONESIA  
KETUA: LETKOL INF. UNTUNG  
WAKIL: BRIDJEN SUPARNO  
LETKOL UDARA HERU H.  
KOL. LAUT SUNARDI  
AKBP. ANWAS]
    PG[PASUKAN GATOTOKACA  
MAYOR UDARA GATHUT  
SUKRISNO]
    PP[PASUKAN PASOPATI  
LETTU INF. DUL ARIEF]
    PB[PASUKAN BIMASAKTI  
KAPTEN INF. SURADI]
    CDBPKI[CDB PKI]
    BKH[BIRO KHUSUS DAERAH]
    SUU[SUMATERA UTARA  
MUHAMMAD NAZIR]
    DKS[DKI  
ENDRO SULITYO]
    BBI[BALI  
WIHAJI]
    SBB[SUMATERA BARAT  
BAHARUDIN HANAFI]
    JBB[JAWA BARAT  
HARJANA]
    NBT[NUSATENGGA TIMUR  
TH. P. RISSI]

    K30S --- DM
    K30S --- PM
    K30S --- DRI
    K30S --- PG
    K30S --- PP
    K30S --- PB
    K30S --- CDBPKI
    K30S --- BKH
    BKH --- SUU
    BKH --- DKS
    BKH --- BBI
    BKH --- SBB
    BKH --- JBB
    BKH --- NBT
```

```
graph TD
    K30S[KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER  
KOMANDAN: LETKOLINF. UNTUNG  
WAKIL: BRIDJEN SUPARDJO  
LETKOL UDARA HERU A.  
KOL. LAUT SUNARDI  
AKBP ANWAS]
    DM[DEWAN MILITER  
D.N. AIDIT  
KAMARUSAMAN BIN AHMAD (SIAM)  
MAYJEN PRANOTO REKSOSAMODRA  
MAYOR UDARA SUJONO]
    PM[PIMPINAN MILITER  
(OPERASI TAKARI DIVISI AMPERA)  
JAKARTA  
LETKOL INF. UNTUNG  
KOL. INF. A. LATIF  
MAYOR UDARA SUJONO  
BRIDJEN SUPARDJO]
    DRI[DEWAN REVOLUSI INDONESIA  
KETUA: LETKOL INF. UNTUNG  
WAKIL: BRIDJEN SUPARNO  
LETKOL UDARA HERU H.  
KOL. LAUT SUNARDI  
AKBP. ANWAS]
    PG[PASUKAN GATOTOKACA  
MAYOR UDARA GATHUT  
SUKRISNO]
    PP[PASUKAN PASOPATI  
LETTU INF. DUL ARIEF]
    PB[PASUKAN BIMASAKTI  
KAPTEN INF. SURADI]
    CDBPKI[CDB PKI]
    BKH[BIRO KHUSUS DAERAH]
    SUU[SUMATERA UTARA  
MUHAMMAD NAZIR]
    DKS[DKI  
ENDRO SULITYO]
    BBI[BALI  
WIHAJI]
    SBB[SUMATERA BARAT  
BAHARUDIN HANAFI]
    JBB[JAWA BARAT  
HARJANA]
    NBT[NUSATENGGA TIMUR  
TH. P. RISSI]

    K30S --- DM
    K30S --- PM
    K30S --- DRI
    K30S --- PG
    K30S --- PP
    K30S --- PB
    K30S --- CDBPKI
    K30S --- BKH
    BKH --- SUU
    BKH --- DKS
    BKH --- BBI
    BKH --- SBB
    BKH --- JBB
    BKH --- NBT
```



```
graph TD
    K30S[KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER  
KOMANDAN: LETKOLINF. UNTUNG  
WAKIL: BRIDJEN SUPARDJO  
LETKOL UDARA HERU A.  
KOL. LAUT SUNARDI  
AKBP ANWAS]
    DM[DEWAN MILITER  
D.N. AIDIT  
KAMARUSAMAN BIN AHMAD (SIAM)  
MAYJEN PRANOTO REKSOSAMODRA  
MAYOR UDARA SUJONO]
    PM[PIMPINAN MILITER  
(OPERASI TAKARI DIVISI AMPERA)  
JAKARTA  
LETKOL INF. UNTUNG  
KOL. INF. A. LATIF  
MAYOR UDARA SUJONO  
BRIDJEN SUPARDJO]
    DRI[DEWAN REVOLUSI INDONESIA  
KETUA: LETKOL INF. UNTUNG  
WAKIL: BRIDJEN SUPARNO  
LETKOL UDARA HERU H.  
KOL. LAUT SUNARDI  
AKBP. ANWAS]
    PG[PASUKAN GATOTOKACA  
MAYOR UDARA GATHUT  
SUKRISNO]
    PP[PASUKAN PASOPATI  
LETTU INF. DUL ARIEF]
    PB[PASUKAN BIMASAKTI  
KAPTEN INF. SURADI]
    CDBPKI[CDB PKI]
    BKH[BIRO KHUSUS DAERAH]
    SUU[SUMATERA UTARA  
MUHAMMAD NAZIR]
    DKS[DKI  
ENDRO SULITYO]
    BBI[BALI  
WIHAJI]
    SBB[SUMATERA BARAT  
BAHARUDIN HANAFI]
    JBB[JAWA BARAT  
HARJANA]
    NBT[NUSATENGGA TIMUR  
TH. P. RISSI]

    K30S --- DM
    K30S --- PM
    K30S --- DRI
    K30S --- PG
    K30S --- PP
    K30S --- PB
    K30S --- CDBPKI
    K30S --- BKH
    BKH --- SUU
    BKH --- DKS
    BKH --- BBI
    BKH --- SBB
    BKH --- JBB
    BKH --- NBT
```

KOMANDO GERAKAN 30 SEPTEMBER
KOMANDAN: LETKOLINF. UNTUNG
WAKIL: BRIDJEN SUPARDJO
LETKOL UDARA HERU A.
KOL. LAUT SUNARDI
AKBP ANWAS

DEWAN MILITER
D.N. AIDIT
KAMARUSAMAN BIN AHMAD (SIAM)
MAYJEN PRANOTO REKSOSAMODRA
MAYOR UDARA SUJONO

PIMPINAN MILITER
(OPERASI TAKARI DIVISI AMPERA)
JAKARTA
LETKOL INF. UNTUNG
KOL. INF. A. LATIF
MAYOR UDARA SUJONO
BRIDJEN SUPARDJO

DEWAN REVOLUSI INDONESIA
KETUA: LETKOL INF. UNTUNG
WAKIL: BRIDJEN SUPARNO
LETKOL UDARA HERU H.
KOL. LAUT SUNARDI
AKBP. ANWAS

PASUKAN GATOTOKACA
MAYOR UDARA GATHUT
SUKRISNO

PASUKAN PASOPATI
LETTU INF. DUL ARIEF

PASUKAN BIMASAKTI
KAPTEN INF. SURADI

CDB PKI

BIRO KHUSUS DAERAH

SUMATERA UTARA
MUHAMMAD NAZIR

DKI
ENDRO SULITYO

BALI
WIHAJI

SUMATERA BARAT
BAHARUDIN HANAFI

JAWA BARAT
HARJANA

NUSATENGGA TIMUR
TH. P. RISSI



DIPA NUSANTARA AIDIT
KETUA CENTRAL COMITTE PKI

Sumber:

Victor M. Fic, (2005), *Anatomy of The Jakarta Coup: October 1, 1965*, Yayasan
Obor Indonesia, Jakarta. hlm. xxii



TOKOH-TOKOH PKI

Sumber:

Victor M. Fic, (2005), *Anatomy of The Jakarta Coup: October 1, 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hlm. xxiii



JENDERAL ANGKATAN DARAT
KORBAN GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965

Sumber:

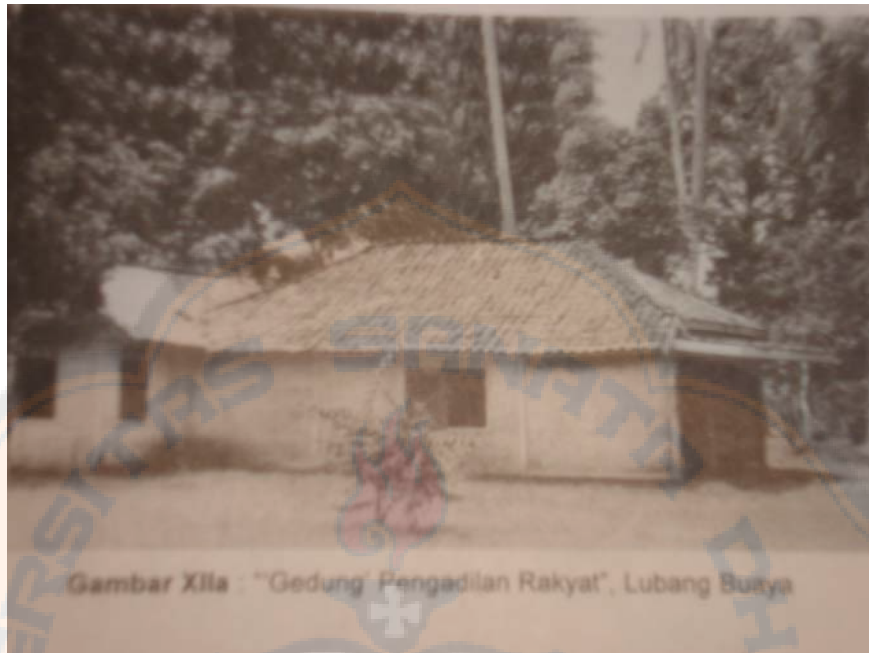
Badan Penyelenggara Buku Peringatan "Dwi Windu Orde Baru". (1982), *Dwi Windu Orde Baru*, Jakarta. hlm. 42



DANREM DAN KASREM PAMUNGKAS JUGA SEBAGAI KORBAN
GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965 DI YOGYAKARTA

Sumber:

Badan Penyelenggara Buku Peringatan “Dwi Windu Orde Baru”. (1982), *Dwi Windu Orde Baru*, Jakarta. hlm. 87



GEDUNG PENGADILAN RAKYAT DI DAERAH LUBANG BUAYA

Sumber:

Victor M. Fic, (2005), *Anatomy of The Jakarta Coup: October 1, 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. hlm. xxi



SJAM KAMARUZZAMAN
KETUA BIRO KHUSUS PARTAI KOMUNIS INDONESIA

Sumber;
Atmowiloto, Arswendo (1986) *Penghianatan G 30 S/PKI*, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta. hlm. 31

SILABUS BERBASIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah
 Satuan Pendidikan : SMA Negeri II Merawa
 Kelas/Program : XII
 Semester : I
 Standar Kompetensi : Kemampuan Memahami Perjuangan Bangsa Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Lahirnya Orde Baru

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber bahan
				Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan		
Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan G30S 1965	Menjelaskan perkembangan PKI setelah tahun 1950 dalam konstelasi politik dalam negeri dan masa pemilu 1955 serta demokrasi terpimpin 1959 sampai terbentuknya Biro Khusus PKI tahun 1964	a. Perkembangan PKI setelah tahun 1950 dalam konstelasi politik dalam negeri b. PKI pada masa Pemilu 1955 c. PKI pada masa demokrasi terpimpin 1959 d. Terbentuknya Biro Khusus PKI tahun 1964	• Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan tentang perkembangan PKI setelah tahun 1950 sampai periode Demokrasi Terpimpin 1959 sampai terbentuknya Biro Khusus PKI tahun 1964	Tugas kelompok	Uraian	1. Jelaskan perkembangan PKI di Indonesia setelah tahun 1950 sampai terbentuknya Biro Khusus PKI tahun 1964?	2X45 menit	Aidit, <i>Pilihan Tulisan Jilid I&II</i> , Yayasan Pembaruan Jakarta. .Asvi Warman Adam, <i>Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia</i> , Ombak, Yogyakarta. G Moedjanto, <i>Indonesia Abad ke-20 jilid 2</i> , Kanisius, Yogyakarta. Buku Sejarah Untuk SMA, Erlangga.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	1964							
	Menjelaskan Peranan Biro Khusus PKI dalam Gerakan 30 September 1965	1. Biro Khusus PKI 2. Peranan Biro Khusus PKI dalam Gerakan 30 September 1965 3. Biro Khusus PKI sebagai perencana Gerakan 30 September 1965	• Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan proses munculnya Biro Khusus PKI • Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan Peranan Biro Khusus PKI dalam Gerakan 30 September 1965 • Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan Biro Khusus	Tugas kelompok	Uraian	1. Jelaskan bagaimana proses munculnya Biro Khusus PKI, serta peran Biro Khusus PKI dalam Gerakan 30 September 1965?	2x45 menit	.Buku paket Atmadji Sumarkidjo, <i>Mendung Di atas Istana Merdeka</i>, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Harold Crouch, <i>Militer Dan Politik di Indonesia</i>, Sinar Harapan Jakarta. Asvi Warman Adam, <i>Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia</i>, Ombak, Yogyakarta. G Moedjanto, <i>Indonesia Abad ke-20 jilid 2</i>, Kanisius, Yogyakarta. Surya Lesmana, <i>Saksi dan Pelaku Gestapu Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30</i>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			PKI sebagai perencana Gerakan 30 September 1965 4. Langkah-langkah yang dilakukan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia menjelang Gerakan 30 September 1965 5. PKI ingin menjatuhkan presiden dan merebut kekuasaanya	• Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Biro Khusus Partai Komunis Indonesia menjelang Gerakan 30 September 1965 • Melalui diskusi kelompok siswa dapat menjelaskan PKI ingin menjatuhkan presiden dan merebut kekuasaanya					September 1965, Media Pressindo, Yogyakarta.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Menjelaskan hubungan Suharto dan Untung, Latief, Supardjo dan Sjam Kamaruzaman sebelum Gerakan 30 September 1965 dan menganalisis tindakan Suharto dalam Gerakan 30 September 1965.	1.Hubungan Soeharto dengan Untung sebelum Gerakan 30 September 1965 2.Hubungan Soeharto dengan Latief sebelum Gerakan 30 September 1965 3.Hubungan Soeharto dengan Supardjo sebelum Gerakan 30 September 1965 4.Hubungan Soeharto dengan Sjam sebelum Gerakan 30 September 1965	• Melalui tugas individu siswa dapat menjelaskan hubungan antara Suharto dan Untung sebelum G30S 1965. • Melalui tugas individu siswa dapat menjelaskan hubungan antara Suharto dan Latief sebelum G30S 1965. • Melalui tugas individu siswa dapat menjelaskan hubungan antara Suharto dan Supardjo sebelum G30S 1965 • Melalui tugas individu siswa dapat menjelaskan	Tugas Individu	Uraian	1.Jelaskan hubungan Suharto dengan Untung, Latief, Supardjo dan Sjam Kamaruzaman sebelum Gerakan 30 September 1965? 2. Jelaskan tindakan Soeharto dalam Gerakan 30 September 1965?	2x45 menit	.Buku paket Lambert Giebels, <i>Pembantaian yang Ditutup-tutupi Peristiwa Fatal Di Sekitar Kejatuhan Bung Karno</i>, Gramedia, Jakarta. Harold Crouch, <i>Militer Dan Politik di Indonesia</i>, Sinar Harapan Jakarta. Asvi Warman Adam, <i>Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia</i>, Ombak, Yogyakarta. G Moedjanto, <i>Indonesia Abad ke-20 jilid 2</i>, Kanisius, Yogyakarta. Yahya Muhaimin, <i>Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966</i>, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Center For Information Analysis, <i>Gerakan</i>
--	---	---	--	----------------	--------	--	------------	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

		September 1965	hubungan antara Suharto dan Sjam sebelum G30S 1965.					30 September 1965, antara Fakta dan Rekayasa, Media Presindo Yogyakarta.
		5. Tindakan Soeharto dalam Gerakan 30 September 1965	Melalui diskusi kelompok siswa dapat menganalisis tindakan Suharto dalam Gerakan 30 September 1965.					

Yogyakarta, ...Juni 2007

Guru Mata Pelajaran

Mengetahui
Kepala Sekolah

Drs. Deri Jangod, M.Si.

Hendrikus Christianus